KABUPATEN NGANJUK
JAWA TIMUR

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk
Telepon (0358)321756 Fax (0358)321111
www.nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga telah dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis dan akurat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 mencakup hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2022 berdasarkan 4 (empat) kelompok utama capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada tataran :

1. Capaian kinerja makro;
2. Capaian kinerja keluaran *(output)*;
3. Capaian kinerja hasil *(outcome)*; dan
4. Capaian kinerja penunjang pemerintahan.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* maka laporan ini disusun dalam rangka mengetahui capaian kinerja pemerintahan daerah dan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk, 30 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.1.1 Penjelasan Umum ..... I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah ..... I - 1
b. Data Geografis Wilayah ..... I - 3
c. Jumlah Penduduk ..... I - 8
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan ..... I - 12
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Daerah ..... I - 12
f. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan ..... I - 16
g. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja ..... I - 23
h. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan ..... I - 34
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah ..... I - 35
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah ..... I - 35
b. Visi dan Misi Kepala Daerah ..... I - 61
c. Program Pembangunaan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ..... I - 69
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan ..... I - 73
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ..... I – 85

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... II - 1
2.1 Capaian Kinerja Makro ..... II - 1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... II - 2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran ..... II - 2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil ..... II - 60
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II - 77
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ..... II - 80
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ..... II – 80

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja ..... II - 83
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya ..... II - 87
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD ..... II - 91
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai ..... II - 94
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja ..... II – 97

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ..... III - 1
3.1 Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk ..... III - 1
3.2 Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ..... III - 8
3.3 Tugas Pembantuan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ..... III – 12

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... IV - 1
4.1 Urusan Pendidikan ..... IV - 4
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 4
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 5
4.1.3 Realisasi ..... IV - 6
4.1.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 11
4.1.5 Dukungan Personil ..... IV - 14
4.1.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 15
4.2 Urusan Kesehatan ..... IV - 16
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 16
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 18
4.2.3 Realisasi ..... IV - 19
4.2.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 34
4.2.5 Dukungan Personil ..... IV - 39
4.2.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 42
4.3 Urusan Pekerjaan Umum ..... IV - 47
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 47
4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 48

4.3.3 Realisasi ..... IV - 49
4.3.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 51
4.3.5 Dukungan Personil ..... IV - 53
4.3.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 54
4.4 Urusan Perumahan Rakyat ..... IV - 54
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 54
4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 55
4.4.3 Realisasi ..... IV - 56
4.4.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 59
4.4.5 Dukungan Personil ..... IV - 60
4.4.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 61
4.5 Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ..... IV - 61
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 61
4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 63
4.5.3 Realisasi ..... IV - 63
4.5.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 64
4.5.5 Dukungan Personil ..... IV - 66
4.5.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 67
4.6 Sub Urusan Kebakaran Daerah ..... IV - 67
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 67
4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 68
4.6.3 Realisasi ..... IV - 69
4.6.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 70
4.6.5 Dukungan Personil ..... IV - 72
4.6.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 72
4.7 Sub Urusan Kebencanaan ..... IV - 73
4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 73
4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 74
4.7.3 Realisasi ..... IV - 75
4.7.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 77
4.7.5 Dukungan Personil ..... IV - 78
4.7.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 79
4.8 Urusan Sosial ..... IV - 80
4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 80
4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 81

4.8.3 Realisasi ..... IV - 82
4.8.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 88
4.8.5 Dukungan Personil ..... IV - 90
4.8.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 91

BAB V PENUTUP ..... V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai suatu wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Nganjuk dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah otonom di lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 ini disusun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup laporan ini meliputi : (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, sejumlah aturan perundang-undangan digunakan sebagai landasan yakni antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara No 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022; dan
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

b. Data Geografis Wilayah

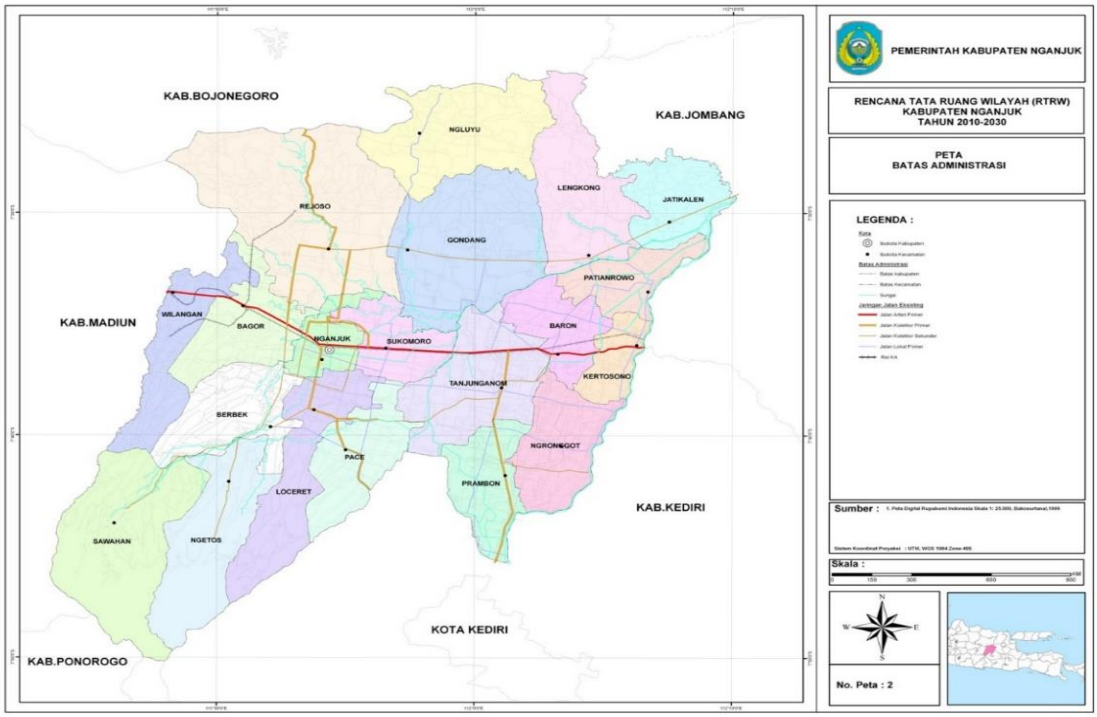
1) Letak Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111º5’ sampai dengan 111º13’ Bujur Timur dan 7º20’ sampai dengan 7º50’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah seluas 1.288,22 km². Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan, dimana wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Rejoso, yaitu sebesar 156,82 km² dan paling kecil di wilayah Kecamatan Nganjuk dengan luas 23,49 km². Posisi Kabupaten nganjuk dibatasi oleh beberapa kabupaten lain, yaitu:

Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
Sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungagung
Sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kediri
Sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah, 11.577,68 ha (8,98%) di dataran sedang 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara, hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wilangan, sebagian Kecamatan Loceret dan Kecamatan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk



Geografis Kabupaten Nganjuk berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi, Kota Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah kecamatan juga cukup banyak dan variatif, sehingga membutuhkan adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sawahan	11 588.60	9.47
2	Ngetos	6 021.20	4.92
3	Berbek	4 829.70	3.94
4	Loceret	6 869.50	5.61
5	P a c e	4 845.70	3.96
6	Tanjunganom	7 084.20	5.79
7	Prambon	4 115.80	3.36
8	Ngronggot	5 298.50	4.33

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
9	Kertosono	2 267.50	1.85
10	Patianrowo	3 559.30	2.91
11	Baron	3 680.20	3.01
12	Gondang	9 594.30	7.84
13	Sukomoro	3 538.80	2.89
14	Nganjuk	2 258.60	1.84
15	Bagor	5 115.30	4.18
16	Wilangan	5 063.90	4.14
17	Rejoso	15 166.30	12.39
18	Ngluyu	8 614.90	7.04
19	Lengkong	8 717.30	7.12
20	Jatikalen	4 203.50	3.43
TOTAL		**122 433.10**	**100.00**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

2) Klimatologi dan Hidrologi

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Nganjuk beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di tahun 2022, Kabupaten Nganjuk mengalami musim kemarau pada bulan Juli sampai dengan bulan September dan musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Juni. Rincian terkait jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan yang terjadi selama tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
Januari	498,2	25	3,8
Februari	491,2	21	3,0
Maret	342,6	27	4,0
April	400,0	18	5,3
Mei	310,3	18	6,0
Juni	218,0	13	6,7
Juli	33,5	3	7,4
Agustus	130,2	4	7,6
September	47,4	6	7,3
Oktober	398,5	18	4,1
November	665,0	26	3,6
Desember	303,0	21	3,6

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.3
Suhu dan Kelembapan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	19.0	24.8	29.9	53.0	84.1	100.0
Februari	17.2	24.5	28.8	62.0	85.5	100.0
Maret	17.2	25.1	29.6	70.0	85.9	98.0
April	17.0	25.5	30.0	65.0	82.8	100.0
Mei	18.0	25.8	29.8	66.0	82.9	98.0
Juni	17.6	25.4	29.4	63.0	81.4	98.0
Juli	16.2	25.6	29.8	55.0	76.8	98.0
Agustus	16.8	25.8	30.7	46.0	74.2	98.0
September	19.8	26.7	31.2	37.0	70.4	100.0
Oktober	19.2	25.2	30.8	61.0	83.4	100.0
November	19.8	24.9	30.3	62.0	85.2	100.0
Desember	19.0	24.9	30.2	63.0	83.5	98.0

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.4
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0	3	10	929,7	933,6	936,6
Februari	1	3	15	929,2	933,1	936,3
Maret	1	2	6	929,2	932,8	936,8
April	0	3	8	930,3	933,7	1014,0
Mei	1	3	8	930,4	933,9	937,4
Juni	1	2	6	930,9	934,0	936,6
Juli	0	3	8	931,0	933,9	936,6
Agustus	1	3	5	931,5	934,2	937,4
September	1	3	8	930,3	934,8	935,8
Oktober	1	2	6	930,0	934,0	937,3
November	0	2	8	929,6	933,7	937,7
Desember	0	3	8	928,5	932,6	939,2

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

3) Topografi

Wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Kondisi topografi ini terbagi menjadi dua bagian menurut ketinggiannya yaitu 25-100 meter dari permukaan laut (dpl) dan 100-1.000 meter dpl. Wilayah dengan ketinggian 25-100 meter dpl seluas 62%, sedang ketinggian 100-

1.000 meter dpl seluas 34,05%. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar keseluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut :

Kondisi wilayah yang berada diketinggian 25-100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 km^2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Jatikalen.

Kondisi wilayah yang berada diketinggian 100-1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 km^2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, Sawahan, dan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 m DPL yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Brebek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan Barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.

Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 km^2 atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 m dpl, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25-100 meter dpl dan 100-1.000 meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret. Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. Menurut kelerengannya wilayah ini dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

Wilayah dengan kelerengan antara 0%-2%, luasnya meliputi 52,95% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.

Wilayah dengan kelerengan 2%-15%, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.

Wilayah dengan kelerengan 15%-40%, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.

Wilayah dengan kelerengan > 40%, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Jumlah Penduduk

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 mencapai angka 1.132.219 jiwa yang terdiri atas 570.392 penduduk laki-laki dan 561.827 penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebesar 1.130.910 jiwa, maka dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.309 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin di Tahun 2022 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Sawahan	19.969	19.603	39.572
2	Ngetos	19.603	19.307	38.910
3	Berbek	30.716	29.890	60.606
4	Loceret	38.875	38.239	77.114
5	Pace	34.406	33.580	67.986
6	Prambon	37.374	36.833	74.207
7	Ngronggot	43.680	42.152	85.832
8	Kertosono	28.525	28.202	56.727
9	Patianrowo	23.152	22.406	45.558
10	Baron	28.066	27.275	55.341
11	Tanjunganom	60.279	59.719	119.998
12	Sukomoro	23.915	23.652	47.567
13	Nganjuk	34.598	35.010	69.608
14	Bagor	31.508	31.410	62.918
15	Wilangan	15.608	15.538	31.146
16	Rejoso	36.864	36.535	73.399
17	Gondang	28.397	28.038	56.435
18	Ngluyu	7.239	7.161	14.400
19	Lengkong	17.049	16.846	33.895
20	Jatikalen	10.569	10.431	21.000
	TOTAL	**570.392**	**561.827**	**1.132.219**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.6
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2013-2022 (Jiwa)

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sawahan	34.189	35.020	35.883	36.524	37.134	37.874	38.458	39.109	39.515	39.572
2	Ngetos	32.644	33.865	34.731	35.406	36.147	37.001	37.736	38.433	38.835	38.910
3	Berbek	51.793	53.147	54.702	55.752	56.813	57.896	58.882	59.827	60.484	60.606
4	Loceret	65.759	67.496	69.537	70.879	72.180	73.670	74.897	76.144	77.084	77.114
5	Pace	57.839	59.483	61.213	62.473	63.597	64.903	65.996	67.148	67.900	67.986
6	Prambon	62.249	63.920	66.706	68.103	69.367	70.717	71.989	73.254	74.020	74.207
7	Ngronggot	71.163	73.503	76.864	78.581	80.149	81.837	83.266	84.751	85.591	85.832
8	Kertosono	47.981	49.244	51.247	52.328	53.232	54.202	55.154	56.091	56.633	56.727
9	Patianrowo	39.092	40.040	41.157	41.918	42.660	43.469	44.203	44.966	45.601	45.558
10	Baron	46.780	48.059	49.566	50.631	51.545	52.680	53.656	54.612	55.262	55.341
11	Tanjunganom	102.498	105.115	108.215	110.339	112.252	114.522	116.533	118.486	119.916	119.998
12	Sukomoro	40.511	41.651	42.935	43.777	44.539	45.444	46.203	46.989	47.527	47.567
13	Nganjuk	59.867	61.387	63.432	64.613	65.710	66.782	67.770	68.787	69.753	69.608
14	Bagor	54.222	55.539	57.204	58.218	59.185	60.640	61.262	62.195	62.898	62.918
15	Wilangan	26.473	27.247	28.104	28.698	29.182	29.775	30.276	30.759	31.081	31.146
16	Rejoso	63.279	64.854	66.782	68.016	69.130	70.352	71.446	72.545	73.336	73.399
17	Gondang	48.641	49.623	51.171	52.126	53.007	54.055	54.845	55.751	56.289	56.435
18	Ngluyu	12.695	12.965	13.296	13.507	13.672	13.869	14.033	14.217	14.372	14.400
19	Lengkong	29.449	30.093	30.883	31.401	31.867	32.410	32.933	33.492	33.833	33.895
20	Jatikalen	18.233	18.680	19.199	19.513	19.810	20.134	20.415	20.768	20.980	21.000
TOTAL		**965.357**	**990.931**	**1.022.827**	**1.042.803**	**1.061.178**	**1.081.910**	**1.099.953**	**1.118.324**	**1.130.910**	**1.132.219**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2013-2022 (%)

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sawahan	0.59	0.24	0.37	0.33	0.31	0.28	0.24	0.71	1.74	0.55
2	Ngetos	0.75	-0.17	0.25	0.21	0.19	0.15	0.12	0.97	2.50	0.80
3	Berbek	0.56	0.08	0.28	0.24	0.22	0.19	0.15	0.93	0.34	0.77
4	Loceret	0.68	-0.11	0.24	0.21	0.19	0.15	0.12	0.89	0.54	0.73
5	Pace	1.08	-0.83	0.08	0.05	0.03	0.00	-0.04	1.09	0.61	0.91
6	Tanjunganom	0.10	1.05	0.54	0.51	0.47	0.45	0.41	0.75	0.57	0.59
7	Prambon	0.26	0.76	0.46	0.43	0.41	0.37	0.34	0.61	0.93	0.45
8	Ngronggot	-0.19	1.47	0.60	0.57	0.54	0.51	0.47	1.01	1.90	0.84
9	Kertosono	0.78	-0.34	0.18	0.15	0.12	0.09	0.05	0.70	-0.28	0.54
10	Patianrowo	0.60	0.18	0.35	0.32	0.29	0.26	0.22	0.82	-0.02	0.66
11	Baron	0.41	0.39	0.36	0.32	0.30	0.27	0.23	1.18	0.62	1.01
12	Gondang	0.92	-0.42	0.21	0.18	0.15	0.12	0.08	0.96	0.27	0.79
13	Sukomoro	-0.36	1.89	0.73	0.69	0.67	0.63	0.60	1.02	-0.31	0.85
14	Nganjuk	0.14	0.97	0.51	0.48	0.46	0.42	0.39	0.46	-0.59	0.31
15	Bagor	0.40	0.57	0.44	0.41	0.39	0.35	0.32	0.75	-0.50	0.59
16	Wilangan	0.91	-0.38	0.22	0.19	0.16	0.13	0.10	1.17	0.96	0.99
17	Rejoso	0.44	0.55	0.46	0.42	0.40	0.37	0.33	0.76	0.49	0.60
18	Ngluyu	1.75	-1.47	0.10	0.07	0.05	0.01	-0.03	0.34	0.80	0.19
19	Lengkong	0.74	0.04	0.35	0.31	0.29	0.26	0.22	0.56	-0.36	0.40
20	Jatikalen	0.58	0.30	0.40	0.36	0.35	0.30	0.28	0.43	-0.65	0.14
TOTAL		**0.45**	**0.40**	**0.38**	**0.35**	**0.33**	**0.30**	**0.26**	**0.82**	**0.50**	**0.66**

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 tercatat sebesar 0,66 persen atau naik sebesar 0,16 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 0,45 persen dan terus mengalami tren kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 Kecamatan yang meliputi 264 Desa dan 20 Kelurahan. Rincian jumlah desa dan kelurahan pada masing-masing Kecamatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Bagor	19	2	21
2	Jatikalen	11	-	11
3	Kertosono	13	1	14
4	Lengkong	16	-	16
5	Loceret	22	-	22
6	Nganjuk	2	13	15
7	Ngetos	9	-	9
8	Ngluyu	6	-	6
9	Ngronggot	13	-	13
10	Pace	18	-	18
11	Patianrowo	11	-	11
12	Prambon	14	-	14
13	Rejoso	24	-	24
14	Sawahan	9	-	9
15	Sukomoro	10	2	12
16	Tanjunganom	14	2	16
17	Wilangan	6	-	6
18	Baron	11	-	11
19	Berbek	19	-	19
20	Gondang	17	-	17
TOTAL		**264**	**20**	**284**

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dibentuklah Perangkat Daerah yang memiliki 3 tujuan mendasar yaitu, (1) untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi, (2) untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dan (3) untuk melaksanakan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah memiliki beberapa tugas yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan penggordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah), menyelenggarakan administrasi yang mendukung tugas dan fungsi DPRD (Sekretariat DPRD), membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan oleh perangkat daerah (Inspektorat), melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Dinas) dan untuk melaksanakan fungsi penunjang (Badan).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk :

Tabel 1.9
Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14.	Dinas Tenaga Kerja
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
19.	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Dinas Pertanian
21.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Satuan Polisi Pamong Praja
24.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27.	Badan Pendapatan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	RSUD Nganjuk
32.	RSUD Kertosono

No.	Perangkat Daerah
33.	Kecamatan Nganjuk
	Kelurahan Payaman
	Kelurahan Kartoharjo
	Kelurahan Kauman
	Kelurahan Ringinanom
	Kelurahan Begadung
	Kelurahan Cangkringan
	Kelurahan Bogo
	Kelurahan Ploso
	Kelurahan Ganung Kidul
	Kelurahan Mangundikaran
	Kelurahan Werungotok
	Kelurahan Kramat
	Kelurahan Jatirejo
34.	Kecamatan Bagor
	Kelurahan Kedondong
	Kelurahan Guyangan
35.	Kecamatan Rejoso
36.	Kecamatan Sukomoro
	Kelurahan Kapas
	Kelurahan Sukomoro
37.	Kecamatan Pace
38.	Kecamatan Tanjunganom
	Kelurahan Warujayeng
	Kelurahan Tanjunganom
39.	Kecamatan Kertosono
	Kelurahan Banaran
40.	Kecamatan Prambon
41.	Kecamatan Berbek
42.	Kecamatan Loceret
44.	Kecamatan Ngronggot
45.	Kecamatan Lengkong
46.	Kecamatan Patianrowo
47.	Kecamatan Gondang
48.	Kecamatan Baron
49.	Kecamatan Wilangan
50.	Kecamatan Ngluyu
51	Kecamatan Ngetos
52.	Kecamatan Sawahan
53.	Kecamatan Jatikalen

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi. Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus di dukung oleh sistem informasi kepegawaian

yang baik. Informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya perlu didukung dengan Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kualitas pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik perlu didukung oleh jumlah ASN yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Analisa terkait kebutuhan dan kualitas ASN selaku pelayan publik harus dioptimalkan sebagai bagian dari pendukung utama kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah ASN Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Jabatan
Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Struktural	785	708	674	615	372
2.	Fungsional Umum	2.303	1.748	1.609	2.617	2.610
3.	Fungsional Pendidikan	4.965	5.303	4.799	3.167	3.077
4.	Fungsional Kesehatan	1.498	1.473	1.489	2.189	1.974
5.	Fungsional Lainnya	0	0	0	99	102
Jumlah ASN		**9.551**	**9.232**	**8.571**	**8.687**	**8.135**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

Selama 5 tahun terakhir, komposisi pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah fungsional pendidikan (guru tenaga pendidik) dan diikuti dengan fungsional umum. Jumlah ASN fungsional pendidikan dan fungsional umum semakin menurun disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, sementara penerimaan ASN belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 1.11
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Pendidikan
Tahun 2018 - 2022

No.	Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD	105	128	116	66	57

No.	Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.	SLTP	185	147	139	130	101
3.	SLTA	1.351	1.014	948	1.171	893
4.	D-I	169	28	22	7	7
5.	D-II	821	160	135	91	91
6.	D-III	868	820	796	1.026	1.113
7.	D-IV	78	197	215	153	153
8.	S1	5.589	4.689	5.598	5.607	5.300
9.	S2	304	2.045	598	432	416
10.	S3	0	4	4	4	4
11.	Spesialis	0	0	0	0	0
12.	Profesi	81	0	0	0	0
Jumlah ASN		**9.544**	**9.232**	**8.571**	**8.687**	**8.135**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

f. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 selain mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, juga berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2022 yang berpengaruh terhadap masing-masing jenis penerimaan daerah. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian yang tentunya berdampak pula pada pendapatan daerah. Selain itu, kebijakan Pemerintah Pusat untuk refocussing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 terutama terkait kebijakan dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan dan didukung oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan cara :

a. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

   Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan pendekatan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, optimalisasi terhadap pemberian pelayanan dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak maupun retribusi daerah melalui sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan.

b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

   Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baru dengan merubah peraturan daerah baik pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan daerah, mengalokasikan

anggaran belanja yang dapat menghasilkan penerimaaan dengan kompensasi pendapatan asli daerah, serta meninjau kembali peraturan daerah yang sudah tidak sesuai.

c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap petugas pungut

Baik pajak maupun retribusi daerah perlu dilakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap petugas pungut sehingga penyimpangan dapat dicegah secara dini.

Untuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah khusus pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perijinan maupun ketentuan lain yang sah dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Disamping perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2022 dan kondisi perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.452.965.706.266,00**	**2.502.103.857.992,94**	**102,00**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	384.183.486.327,00	445.923.933.540,94	116,07
4.2	Pendapatan Transfer	1.910.407.441.736,00	1.906.670.928.426,00	99,80
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	158.374.778.203,00	149.508.996.026,00	94,40

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 secara umum tercapai sebesar Rp. 2.502.103.857.992,94 dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah meliputi :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan perencanaan PAD yaitu dengan penggalian sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah terus ditingkatkan, baik dengan jalan intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian proporsinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan. Untuk itu perencanaan ke depan harus diusahakan tetap semakin meningkat, sehingga prosentasenya terhadap APBD akan semakin besar. Dalam upaya peningkatan pendapatan diusahakan agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Di tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 445.923.933.540,94 atau 116,07% dari target yang ditetapkan yang nilainya adalah Rp. 384.183.486.327,00. Adapun rincian target dan realisasi PAD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**384.183.486.327,00**	**445.923.933.540,94**	**116,07**
4.1.1	Pajak Daerah	122.305.000.000,00	135.071.942.647,00	110,44
4.1.2	Retribusi Daerah	27.301.537.582,00	26.492.593.548,82	97,04
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.099.258.628,00	4.099.258.627,94	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	230.477.690.117,00	280.260.138.717,18	121,60

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

1) Pajak Daerah

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp.135.071.942.647,00 atau 110,44% dari target yang ditetapkan yang nilainya adalah sebesar Rp. 122.305.000.000.00.

2) Retribusi Daerah

Realisasi penerimaan dari Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 26.492.593.548,82 atau 97,04% dari target yang ditetapkan yang nilainya adalah sebesar Rp.27.301.537.582,00 meliputi capaian dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk retribusi jasa umum yang realisasinya tidak mencapai 100% yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Untuk retribusi jasa usaha yang realisasinya tidak mencapai 100% yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah retribusi izin mendirikan bangunan.

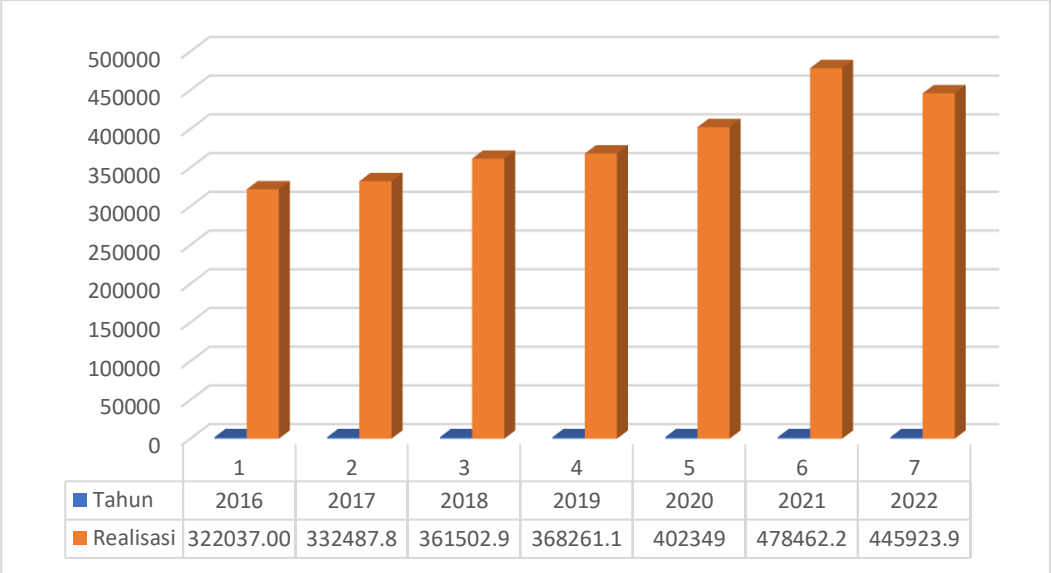
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara keseluruhan realisasinya adalah sebesar Rp. 4.099.258.627,94 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni Rp. 4.099.258.628,00.

4) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan dari pos ini secara umum dapat memenuhi target dengan realisasi sebesar Rp. 280.260.138.717,18 atau 121,60% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 230.477.690.117,00.

Gambar 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 (Juta Rp)



Secara umum dapat disimpulkan bahwa semua komponen PAD dapat tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Di tahun 2022, perolehan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 445.923.933.540,94 atau 116,07%

dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan perolehan PAD tahun 2021 sebesar Rp. 478,462,298,146.24, maka terdapat penurunan sebesar Rp. 33.576.949.065,64. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target dikarenakan semakin banyak berdirinya klinik-klinik kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS mengakibatkan beralihnya kepesertaan. Adanya aturan tambahan terkait standart pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi PKM supaya pembayaran klaim bisa cair penuh dan verifikasi klaim yang ketat sehingga adanya kemungkinan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan yang diajukan.
2. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mencapai target karena beralihnya vendor sehingga tidak bisa mengetahui alamatnya yang jelas atas peralihan vendor terebut.
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak mencapai target dikarenakan Taman Rekreasi Anjuk Ladang tidak operasional penuh dalam satu tahun dikarenakan ada pemeliharaan/penataan.
4. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan tidak mencapai target dikarenakan adanya perubahan aturan yang semula Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sekarang menjadi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Peraturan tersebut di dalamnya mengatur kelengkapan berkas permohonan PBG yang dirasa lebih sulit dan banyak dikeluhkan oleh pemohon pelayanan sehingga dibentuk Tim Profesi Ahli (TPA) yang Surat Keputusan Tim tersebut baru ditandatangani pada pertengahan tahun.

b) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer telah mencapai Rp. 1.929.805.071.426,00 atau 101,02% dari pagu APBD yang ditetapkan yang nilainya adalah sebesar Rp. 1.910.407.441.736,00. Pendapatan Transfer terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.747.009.461.094,00 atau 99,96% dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 182.795.610.332,00 atau 112,36%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.458.536.000.294,00 atau 99.97%, dari target Rp. 1.458.921.467.585,00 yang meliputi realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 119.268.970.042,00 atau 114,79% dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 978.993.349.898,00 atau 99,60%, realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

sebesar Rp. 133.543.067.662,00 atau 93,55%, realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 226.730.612.692,00 atau 98,88%. Realisasi Dana Desa sebesar Rp. 288.473.460.800,00 atau 99,89%.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari realisasi Pendapatan Bagi Hasil-Pajak sebesar Rp. 165.996.447.332,00 atau 112,94% dari target, realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 172.733.000,00 atau 1,01%.

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke Daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaannya.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU setiap tahun ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Adapun rincian pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.910.407.441.736,00**	**1.929.805.071.426,00**	**101,02**
4.2.1	Pendapatan Transfer	1.747.725.464.585,00	1.747.009.461.094,00	99,96

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pemerintah Pusat			
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.458.921.467.585,00	1.458.536.000.294,00	99.97
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.902.589.000,00	119.268.970.042,00	114.79
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	982.963.245.000,00	978.993.349.898,00	99.60
4.2.1.01.03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.748.959.600,00	133.543.067.662,00	93.55
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	229.306.673.985,00	226.730.612.692,00	98.88
4.2.1.05	Dana Desa	288.803.997.000,00	288.473.460.800,00	99,89
4.2.1.05.01	Dana Desa	288.803.997.000,00	288.473.460.800,00	99,89
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	162.681.977.151,00	182.795.610.332,00	112,36
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	146.981.564.151,00	165.996.447.332,00	112.94
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	15.700.413.000,00	16.799.163.000,00	107.00

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

c) Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 sebesar Rp. 89.874.107.027,00 atau 56.75% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.158.374.778.203,00.

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**158.374.778.203,00**	**89.874.107.027,00**	**56.75**
4.3.1	Pendapatan Hibah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	152.374.778.203,00	83.874.107.027,00	55.04
4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	117.046.873.418,00	63.759.365.739,00	54.47

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.3.3.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	117.046.873.418,00	63.759.365.739,00	54.47
4.3.3.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.327.904.785,00	20.114.741.288,00	56,94
4.3.3.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.327.904.785,00	20.114.741.288,00	56,94

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat. Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat terhadap dana transfer yang tidak bersifat final menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah daerah. Karena alokasi dana transfer sangat bergantung pada kinerja Pendapatan Dalam Negeri yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus cermat, tepat dan hati-hati dalam mengelola seluruh anggaran pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah harus mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan daerah secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi aktual kehidupan perekonomian ditingkat nasional, regional dan internal di Kabupaten Nganjuk.

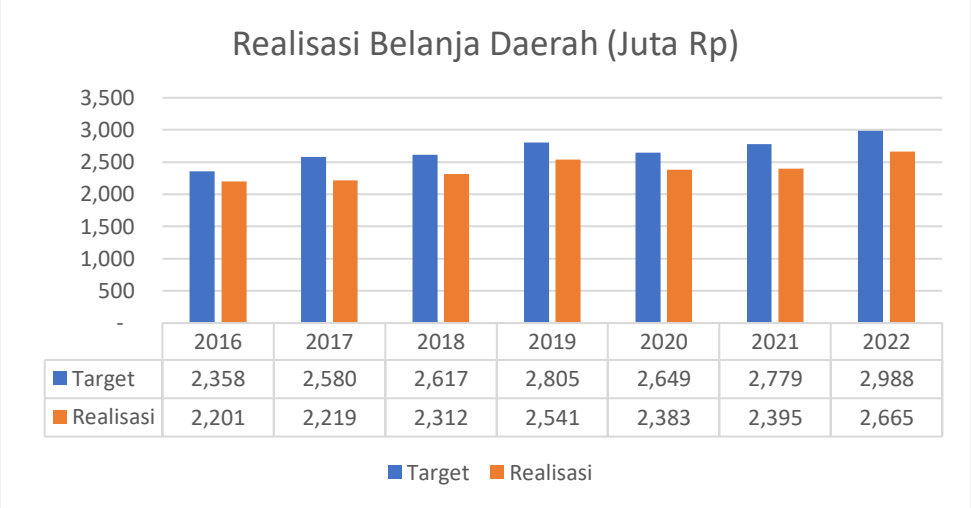
g. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Penyusunan alokasi belanja daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengingat bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan *output* atas *input* yang telah dialokasikan sesuai target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah. Deskripsi singkat realisasi belanja daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	2,358	2,580	2,617	2,805	2,649	2,779	2,988
Realisasi	2,201	2,219	2,312	2,541	2,383	2,395	2,665

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

a) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Pagu belanja daerah sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.988.815.068.883,00 dan terealisasi Rp. 2.665.246.243.350,72 atau 89,17%. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 2.045.501.788.257 dan terealisasi Rp. 1.786.000.891.253,16 atau 87,31%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 478.072.532.880,00 dan terealisasi Rp. 445.280.815.784,56 atau 93,14%, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 36.718.524.088,00 dan teresalisasi Rp. 6.235.275.135,00 atau 16,98%, dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 428.522.223.658,00 dan terealisasi Rp. 427.729.261.178,00 atau 99,81%. Rincian target dan realisasi Belanja Daerah tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.988.815.068.883.00**	**2.665.246.243.350,72**	**89.17**
5.1	**Belanja Operasi**	2.045.501.788.257,00	1.786.000.891.253,16	87,31
5.1.1	Belanja Pegawai	1.166.247.434.794,00	977.691.021.110,00	83,83

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.317.406.463,00	722.376.769.806,89	90,26
5.1.5	Belanja Hibah	63.721.947.000,00	73.353.150.336,27	115,11
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.215.000.000,00	12.579.950.000,00	82,68
5.2	**Belanja Modal**	478.072.532.880,00	445.280.815.784,56	93,14
5.2.1	Belanja Tanah	5.515.592.500,00	5.305.199.700,00	96,19
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	131.754.003.114,00	123.899.653.221,82	94,04
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	168.465.816.425,00	161.670.035.681,14	95,97
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.904.161.711,00	149.834.805.029,60	94,29
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.432.959.130,00	4.571.122.152,00	34,03
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	36.718.524.088,00	6.235.275.135,00	16,98
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	36.718.524.088,00	6.235.275.135,00	16,98
5.4	**Belanja Transfer**	428.522.223.658,00	427.729.261.178,00	99,81
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.057.795.100,00	18.024.368.820,00	99,81
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	410.464.428.558,00	409.704.892.358,00	99,81

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut:

a.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.786.000.891.253,16 atau 87,31% dari target Rp. 2.045.501.788.257,00 yang meliputi Belanja Pegawai terserap sebesar 83,83%, Belanja Barang dan Jasa terserap sebesar 90,26%, Belanja Hibah terserap sebesar 115,11%, dan Belanja Bantuan Sosial terserap sebesar 82,68%.

a.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 445.280.815.784,56 atau 93,14% dari target Rp. 478.072.532.880,00 yang meliputi Belanja Tanah terserap sebesar 96,19%, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 94,04%, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 95,97%, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 94,29%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 34,03%.

a.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 6.235.275.135,00 atau 16,98% dari target Rp. 36.718.524.088,00 yang dipergunakan untuk penanganan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat hasil dari refocussing dan realokasi anggaran.

a.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp. 427.729.261.178,00 atau 99,81%. dari target Rp. 428.522.223.658,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil terserap sebesar 99,81% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 99,81%.

Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengingat bahwa Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan output atas input yang telah dialokasikan sesuai dengan target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah. Deskripsi singkat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17
Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**		**1,548,453,929,938**	**1,353,409,013,466**	**428,262,863,567**	**398,798,519,362**	-	-	-	-	**1,976,716,793,505**	**1,752,208,182,829**	**88.64%**
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	862,654,237,500	745,420,620,763	126,023,208,494	108,706,727,644					988,677,445,994	854,127,348,407	86.40%
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	552,959,710,414	490,250,906,567	87,830,308,657	86,710,011,441					640,790,019,071	576,960,918,009	90.04%
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,795,021,536	62,901,330,678	200,596,330,662	190,406,258,281					269,391,352,198	253,307,588,959	94.03%
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			2,756,174,293	2,756,174,293					2,756,174,293	2,756,174,293	100.00%
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15,924,115,632	14,299,921,293	9,456,989,722	8,803,694,555					25,381,105,354	23,103,615,848	91.03%
8	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	11,143,615,900	9,928,274,118	568,924,089	525,444,448					11,712,539,989	10,453,718,566	89.25%
9	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,996,346,930	5,151,618,686	468,758,150	459,495,200					6,465,105,080	5,611,113,886	86.79%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
10	Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,421,840,970	3,415,448,265	478,004,250	348,491,100					5,899,845,220	3,764,589,365	63.81%
11	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25,559,041,056	22,040,893,096	84,165,250	82,222,400					25,643,206,306	22,123,115,496	86.27%
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**		**150,005,940,261**	**133,283,316,104**	**24,351,918,638**	**22,466,931,447**	-	-	-	-	**174,357,858,899**	**155,750,247,551**	**89.33%**
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	8,562,472,450	6,244,622,581	4,560,000	4,441,450					8,567,032,450	6,249,064,031	72.94%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	795,608,250	723,436,414							795,608,250	723,436,414	90.93%
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8,098,623,350	7,408,293,698	14,415,000	10,778,910					8,113,038,350	7,419,072,608	91.45%
4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,118,637,650	839,832,185							1,118,637,650	839,832,185	75.08%
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	25,126,624,006	23,440,603,547	7,923,048,700	7,419,667,725					33,049,672,706	30,860,271,272	93.38%
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	9,510,696,374	7,605,840,658	1,454,596,015	1,449,112,824					10,965,292,389	9,054,953,482	82.58%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
		Sipil											
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10,005,127,298	9,805,393,165	263,563,100	263,395,452					10,268,690,398	10,068,788,617	98.05%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19,323,385,830	17,930,210,125	24,346,500	23,350,000					19,347,732,330	17,953,560,125	92.79%
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	32,690,918,444	28,613,907,349	2,441,978,614	2,302,965,759					35,132,897,058	30,916,873,108	88.00%
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,764,461,236	10,733,547,042	2,057,233,509	1,855,133,137					13,821,694,745	12,588,680,179	91.08%
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5,946,236,650	4,620,666,160	311,565,200	304,292,750					6,257,801,850	4,924,958,910	78.70%
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,123,540,650	4,168,241,433	9,059,000	9,059,000					5,132,599,650	4,177,300,433	81.39%
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3,935,287,150	3,898,772,964	94,510,000	94,350,000					4,029,797,150	3,993,122,964	99.09%
14	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	119,959,000	99,649,500							119,959,000	99,649,500	83.07%
15	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	22,800,000	22,522,500	12,000,000	10,141,840					34,800,000	32,664,340	93.86%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
16	Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2,976,848,900	2,959,682,519							2,976,848,900	2,959,682,519	99.42%
17	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	586,292,900	551,875,934	9,392,200,000	8,434,589,100					9,978,492,900	8,986,465,034	90.06%
18	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4,298,420,123	3,616,218,330	348,843,000	285,653,500					4,647,263,123	3,901,871,830	83.96%
C	**URUSAN PILIHAN**		**67,953,413,369**	**62,660,963,347**	**5,610,042,150**	**4,981,590,709**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,563,455,519**	**67,642,554,056**	**91.95%**
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	640,829,500	621,010,050	745,000	745,000					641,574,500	621,755,050	96.91%
2	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	8,790,341,280	8,145,082,025	303,330,000	177,803,000					9,093,671,280	8,322,885,025	91.52%
3	Pertanian	Dinas Pertanian	43,849,360,822	40,390,354,229	2,827,638,550	2,431,255,701					46,676,999,372	42,821,609,930	91.74%
4	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,148,955,700	3,967,837,168	2,425,000,000	2,321,448,508					6,573,955,700	6,289,285,676	95.67%
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10,463,926,067	9,481,493,175	53,328,600	50,338,500					10,517,254,667	9,531,831,675	90.63%
6	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	60,000,000	55,186,700							60,000,000	55,186,700	91.98%
D	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**		**279,088,504,689**	**236,647,598,335**	**19,847,708,525**	**19,033,124,266**	**428,522,223,658**	**427,755,261,178**	**36,718,524,088**	**6,235,275,135**	**764,176,960,960**	**689,645,258,914**	**90.257%**
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	50,084,582,119	43,183,239,895	7,524,027,791	7,127,782,200					57,608,609,910	50,331,022,095	87.37%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
2	Pengawasan	Inspektorat	9,168,608,760	7,961,728,179	125,200,000	120,254,700					9,293,808,760	8,081,982,879	86.96%
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,144,449,550	7,869,898,679	122,880,500	121,646,010					9,267,330,050	7,991,544,689	86.23%
4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16,017,504,455	12,154,432,850	526,719,606	479,004,640	428,522,223,658	427,729,261,178	36,718,524,088	6,235,275,135	481,784,971,807	446,597,973,064	92.70%
5	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	14,856,501,000	12,759,649,231	1,659,273,651	1,603,052,030					16,515,774,651	14,362,701,261	86.96%
6	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,833,458,902	6,302,946,580	22,000,000	20,787,200					7,855,458,902	6,323,733,780	80.50%
7	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,545,596,450	3,418,197,280							3,545,596,450	3,418,197,280	96.41%
8	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,039,584,000	2,400,709,616							3,039,584,000	2,400,709,616	78.98%
9	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	72,689,125,345	65,920,238,132	1,500,507,840	1,327,820,200					74,189,633,185	67,248,058,332	90.64%
10	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Bagor	4,679,272,400	4,043,502,246	1,080,579,026	1,053,890,652					5,759,851,426	5,097,392,898	88.50%
11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Baron	3,181,278,430	2,504,618,510	168,931,014	168,431,000					3,350,209,444	2,673,049,510	79.79%
12	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Berbek	3,403,991,560	2,968,873,859	72,097,050	68,198,000					3,476,088,610	3,037,071,859	87.37%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
13	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Gondang	3,029,043,094	2,712,215,097	86,026,650	84,969,150					3,115,069,744	2,797,184,247	89.80%
14	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Jatikalen	2,453,190,850	1,888,371,723	80,386,250	75,953,483					2,533,577,100	1,964,325,206	77.53%
15	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Kertosono	5,185,690,563	3,793,566,366	343,557,100	340,579,772					5,529,247,663	4,134,146,138	74.77%
16	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Lengkong	3,186,749,680	2,091,943,232							3,186,749,680	2,091,943,232	65.65%
17	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Loceret	3,241,827,131	2,690,160,393	65,392,600	63,770,495					3,307,219,731	2,753,930,888	83.27%
18	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Nganjuk	19,287,057,674	14,722,011,013	3,723,408,076	3,680,926,164					23,010,465,750	18,402,937,177	79.98%
19	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Ngetos	2,222,197,655	1,574,390,956	84,412,932	81,562,800					2,306,610,587	1,655,953,756	71.79%
20	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Ngluyu	1,927,899,948	1,324,815,200	46,055,039	34,511,750					1,973,954,987	1,359,326,950	68.86%
21	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Ngronggot	3,448,724,530	2,988,782,383	56,717,840	56,717,840					3,505,442,370	3,045,500,223	86.88%
22	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Pace	3,398,439,450	2,712,427,977	62,765,400	62,692,800					3,461,204,850	2,775,120,777	80.18%
23	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Patianrowo	2,874,190,346	2,176,034,774	110,138,950	109,428,750					2,984,329,296	2,285,463,524	76.58%
24	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Prambon	2,961,776,619	2,544,938,689	78,872,780	67,752,676					3,040,649,399	2,612,691,365	85.93%
25	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Rejoso	3,363,683,550	2,448,806,135	105,416,365	98,658,027					3,469,099,915	2,547,464,162	73.43%

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TIDAK TERDUGA		TOTAL REALISASI BELANJA		PROSENTASE
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
26	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Sawahan	3,134,317,613	2,274,347,633	95,255,300	91,840,400					3,229,572,913	2,366,188,033	73.27%
27	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Sukomoro	4,029,039,755	3,663,892,684	1,160,607,380	1,152,573,375					5,189,647,135	4,816,466,059	92.81%
28	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Tanjunganom	5,399,115,530	4,686,724,122	836,583,777	833,124,950					6,235,699,307	5,519,849,072	88.52%
29	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Wilangan	2,706,256,950	2,339,053,188	38,645,100	38,095,200					2,744,902,050	2,377,148,388	86.60%
30	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9,595,350,780	8,527,081,713	71,250,508	69,100,002					9,666,601,288	8,596,181,715	88.93%

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

h. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan bagian penting yang bisa menutup anggaran apabila terjadi belanja daerah lebih besar dari pendapatan (defisit) dan sebaliknya apabila terjadi pendapatan lebih besar dari belanja, kelebihan pendapatan dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan ini. Pembiayaan daerah di Tahun 2022 meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. SILPA diperoleh dari realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan rencana yang disebabkan antara lain oleh adanya sisa lelang, efisiensi belanja kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, dan adanya pelampauan target pendapatan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal PT BPR Anjuk Ladang, PDAM, PDAU dan Bank UMKM Jatim. Kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan umum pemerintah daerah yang dilakukan agar prioritas kegiatan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dan bertujuan untuk tetap terjaminnya terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dari kegiatan yang diinginkan. Sebagai akibat dari banyaknya belanja daerah yang harus dianggarkan sementara pendapatan daerah sangat terbatas, sehingga mengakibatkan terjadinya defisit yang harus ditutup dari pembiayaan.

1) Target dan Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 551.290.877.717,47 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 551.299.362.617,00. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari beberapa komponen yaitu penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (2021) sebesar Rp. 551.064.757.631,11 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 226.120.086,36. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan realisasinya 100% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 15.450.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagai berikut :

1. PDAM sebesar Rp. 6.000.000.000,00
2. PDAU sebesar Rp. 1.750.000.000,00
3. BPR Anjuk Ladang sebesar Rp. 7.500.000.000,00
4. Bank UMKM Jatim sebesar Rp. 200.000.000,00

Adapun rincian target dan realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

No	Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**551.299.362.617,00**	**551.290.877.717,47**	**100.00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	551.064.757.613,00	551.064.757.631,11	100.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	234.604.986.00	226,120,086.36	96.38
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**15,450,000,000.00**	**15,450,000,000.00**	**100.00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15,450,000,000.00	15,450,000,000.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**535,849,362,617.00**	**535,840,877,717.47**	**100.00**

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1) Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dan isu-isu strategis di daerah merupakan persoalan-persoalan yang akan diselesaikan melalui pembangunan yang dilaksanakan. Agar pembangunan bisa efektif dan efisian dalam menangani permasalahan maupun isi-isu strategis, maka diperlukan perencanaan yang baik dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan kewenangan yang dimiliki daerah. Agar permasalahan bisa diselesaikan secara komprehensif maka pemasalahan perlu analisis dan diurai akar permasalahannya.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan cermin kondisi obyektif yang selanjutnya dimanifestasikan dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama dalam perumusan program prioritas berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan **Masalah Pokok** yang bersifat makro bagi daerah dan lintas sektor/urusan. Penyebab dari Masalah Pokok disebut sebagai Masalah, dan penyebab Masalah disebut sebagai Akar Masalah. Masalah dan Akar Masalah pada umumnya lebih bersifat teknis dan sektoral sesuai urusan pemerintahan daerah. Masalah Pokok dipecahkan melalui rumusan Misi, Tujuan, dan Sasaran, sedangkan Masalah dan Akar Masalah dipecahkan melalui Strategi dan Arah Kebijakan.

Permasalahan pembangunan dapat dirumuskan dari kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja pembangunan yang direncanakan dalam periode 2018 – 2023 yang telah diuraikan pada Dokumen Perubahan RPJMD, BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah. Dalam konteks masa datang, permasalahan pembangunan daerah dapat dirumuskan dari kesenjangan antara kondisi ideal pada masa datang yang ingin dicapai atau telah ditetapkan dibandingkan dengan kondisi daerah saat ini. Kondisi ideal dapat diselaraskan dengan kebijakan provinsi (target RPJMD provinsi), nasional (target RPJMN, standar pelayanan minimal), maupun isu-isu internasional, misalnya SDG's.

Berdasarkan pedoman perumusan permasalahan pembangunan di atas dan hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018 – 2023, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang meliputi aspek kesejahteraan rakyat dan aspek daya saing daerah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A.	**Kesejahteraan Rakyat:**		
1.	Penurunan angka kemiskinan belum optimal	1. Pendapatan keluarga miskin rendah	1. Rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin
			2. Rendahnya kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi warga miskin
		2. Banyaknya masyarakat yang rentan miskin karena dampak kebijakan/peristiwa ekonomi dan sosial	1. Kerentanan masyarakat miskin terhadap dampak peristiwa ekonomi (kenaikan harga pangan dan pangan)
			2. Kerentanan masyarakat miskin terhadap dampak bencana dan keadaan sakit

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Rendahnya minat baca masyarakat
			4. Adanya Pandemi covid
2.	Pertumbuhan ekonomi belum optimal	1. PDRB sektor pertanian kontribusi menurun	1. Kualitas sumber daya manusia petani dan peternak terbatas
			2. Sarana dan prasarana produksi pertanian dan peternakan terbatas dan mahal
			3. Lahan pertanian berkurang akibat alih fungsi lahan
			4. Lemahnya akses permodalan bagi petani dan peternak
			5. Belum optimalnya dukungan industri dan UM pengolahan produk pertanian dan peternakan
			6. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dengan sistem pengelolaan pertanian terpadu.
		2. PDRB sektor usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif belum tergarap optimal	1. Belum adanya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta ekonomi kreatif
			2. Sistem permodalan, perijinan usaha, dan pemasaran belum optimal
			3. Kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha dan koperasi masih terbatas
			4. Rendahnya jumlah pelaku usaha industri yang berdaya saing
		3. PDRB sektor pariwisata belum optimal	1. Pengembangan destinasi wisata belum optimal
			2. Dukungan infrastruktur belum optimal
			3. Kapasitas sumber daya manusia pelaku wisata masih terbatas
			4. Pemasaran pariwisata belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Kurangnya sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata
		4. Ketahanan pangan belum optimal	1. Produksi dan diversifikasi produk pangan lokal hasil pertanian belum optimal
			2. Keamanan pangan masih rentan dari bahan berbahaya
			3. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun
			4. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal
3.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan pelestarian seni budaya	1. Akses dan kualitas pendidikan belum merata	1. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas
			2. Belum optimalnya implementasi kurikulum 2013
			3. Kuantitas, kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan belum optimal
			4. Belum terintegrasi pemanfaatan tata kelola pendidikan berbasis informasi dan teknologi
			5. Belum optimalnya pendidikan karakter dan budi pekerti bagi peserta didik
			6. Berkurangnya kegiatan belajar-mengajar karena pembatasan kegiatan karena covid 19
			7. Masih rendahnya minat baca masyarakat
		2. Derajat kesehatan masyarakat belum optimal	1. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas
			2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi masih belum optimal
			3. Masih terdapat kasus balita gizi buruk
			4. Masih tingginya prevalensi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			stunting
			5. Masih tingginya kasus penyakit tidak menular
			6. Cakupan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin masih terbatas
			7. Capaian kinerja rumah sakit umum daerah (RSUD) pada beberapa sasaran masih di bawah standar
			8. Belum optimalnya Upaya Kesehatan Berswadaya Masyarakat
		3. Pengarusutamaan gender dan hak anak belum optimal	1. Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender
			2. Implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak belum sinergi
			3. Meningkatnya angka kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak
		4. Prestasi pemuda dan olah raga belum optimal	1. Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah
			2. Meningkatnya masalah sosial di kalangan pemuda
			3. Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi
			4. Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah
			5. Pembinaan olah raga belum optimal
		5. Belum maksimalnya pelestarian seni budaya dan kearifan lokal	1. Minat masyarakat terhadap seni budaya dan kearifan lokal mulai luntur
			2. Kurang optimalnya pengelolaan event kegiatan seni budaya dan kearifan lokal
		6. Belum maksimalnya	1. belum optimalnya cakupan pemukiman perkotaan yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	dilayani pengangkutan sampah
B.	**Daya Saing Daerah:**		
1.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur belum mantap	1. Pembangunan infrastruktur daerah belum merata dan berwawasan lingkungan	1. Tingkat kerusakan jalan, jembatan, pengairan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan
			2. Kurangnya peralatan dan tenaga teknis
			3. Belum adanya sinergi pembangunan infrastruktur daerah dan desa
			4. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana perhubungan
2.	Iklim investasi belum optimal	1. Gangguan kriminalitas masih terjadi dan perlindungan masyarakat dari bencana belum optimal	1. Penegakan Perda belum optimal
			2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan
			3. Penanganan ketentraman dan ketertiban belum optimal
			4. Masih sering terjadi bencana
		2. Kualitas layanan perijinan belum optimal	1. Kurangnya promosi potensi dan informasi investasi
			2. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat
			3. Kurang respon pelaku usaha terhadap penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal
			4. Belum dilaksanakan online Single Submission (OSS) sebagaimana PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		3. Desa swasembada yang merepresentasikan kemampuan	1. Pertumbuhan ekonomi desa belum optimal
			2. Tata kelola pemerintahan desa belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ekonomi rakyat jumlahnya masih sedikit	3. Swadaya, partisipasi, gotong royong masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun
			4. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal
			5. Koordinasi pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal
		4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	1. Proses perencanaan dan penganggaran belum terintegrasi
			2. Kemandirian keuangan daerah belum optimal yang ditunjukkan ketergantungan keuangan daerah pada dana transfer
			3. Kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara belum optimal
			4. Akuntabilitas kinerja masih rendah
			5. Kinerja koordinasi penyusunan dan pengendalian kebijakan belum optimal
			6. Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
C.	**Pertanahan:**		
1	Luas Lahan Bersertifikat	1. Aset Pemda Bersertifikat	1. Belum optimalnya aset tanah Pemda dan desa yang bersertifikat

Sumber data : Perubahan RPJMD Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel permasalahan diatas, dapat dijelaskan gambaran permasalahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Rakyat

a. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang mencerminkan belum terwujudnya

kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 13,14% menjadi 11,98% pada tahun 2017, namun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk masih lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 11,77 pada tahun 2017 dan nasional sebesar 10,12% pada tahun 2017. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target RPJMN yang menargetkan pada tahun 2019 angka kemiskinan pada kisaran 7-8% (kondisi yang diharapkan). Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk mencapai angka 11,85% dan di tahun 2022 mencapai angka 10,70% sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan penduduk dari tahun ke tahun.

2. Belum optimalnya intensifikasi dan extensifikasi lahan dan diversifikasi produksi pertanian.

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang diukur dari pertumbuhan/perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang cenderung stagnan pada angka 5% bahkan pertumbuhan PDRB di tahun 2020 menurun menjadi – 1,71%, dengan sektor unggulan pertanian yang meskipun produksinya meningkat namun kontribusinya mengalami trend penurunan (tahun 2017 sebesar 30,78%, tahun 2020 menjadi 29,19%) seiring dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan. Sebagai daerah yang mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian, maka sektor pertanian membutuhkan prioritas penyelesaian masalah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

3. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif.

   Capaian prosentase koperasi aktif tahun 2017 sebesar 46% mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 pada angka 45,04% dari 922 unit karena kurangnya pengawasan dan pembinaan secara intensif. Persentase Usaha Mikro Kecil pada tahun 2017 realisasi kinerja berada pada angka 41,24% dari target yang telah ditetapkan 98,20%, mengalami penurunan karena adanya pengalihan kewenangan pembinaan sektor usaha kecil dan menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi. Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya

sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan koperasi yang dapat diatasi dengan cara meningkatkan keterpaduan program pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

4. Belum optimalnya penanganan ketahanan pangan.

   Ketahanan pangan masih menjadi tantangan di Kabupaten Nganjuk. Ketahanan pangan suatu daerah diindikasikan antara lain dalam bentuk ketersediaan pangan dan akses pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, meskipun secara target kinerja periode 2016 – 2018 telah terpenuhi target peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2016 sebesar 3,73%, tahun 2017 sebesar 3,50%, dan pada tahun 2018 sebesar 3,07%. Dari data tersebut meskipun ketersediaan makanan tercukupi, tetapi ada kecenderungan penurunan. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, ketahanan pangan dengan indikator ketersediaan pangan utama juga menunjukkan penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 286,03 % dan tahun 2020 sebesar 249,94 %. Salah satu penyebab penurunan adalah makin berkurangnya lahan produktif yang beralih fungsi. Dalam hal akses pangan diindikasikan antara lain melalui tingkat konsumsi beras. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi beras Kabupaten Nganjuk sebesar 104.506,4 ton, sedangkan rata-rata tingkat konsumsi Jawa Timur sebesar 100.986 ton.

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni budaya dan kepariwisataan daerah dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah.

   Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi pariwisata, namun pengembangannya belum optimal. Event kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan dalam periode 2018-2020 hanya berjumlah 8 kegiatan setiap tahun. Sementara itu, pelestarian situs dan benda cagar budaya sudah cukup optimal dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2020. Penyebab utama permasalahan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata adalah karena kurangnya momentum kegiatan yang dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan kreativitas seni, budaya, dan pariwisata; seniman Nganjuk yang banyak jumlahnya dan berkemampuan tinggi namun belum dioptimalkan perannya; serta belum adanya keterpaduan antara desa, daerah, lembaga swasta dalam pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.

6. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta penerapan literasi serta peningkatan minat baca di Kabupaten Nganjuk.

   Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari segi pemerataan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI sudah 98,21%, tingkat SMP/MTs masih di kisaran 90,59%, dan SMA/MA/SMK 80,71 % dan PAUD kurang dari 100%. Selain itu masih ada anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK karena berbagai hal meskipun tidak banyak. Dari sisi kualitas pendidikan, kualitas guru juga masih belum standar. Rata rata hasil ujian nasional anak sekolah tingkat SD adalah 7,9 dan SMP 5,9 pada tahun 2019 dan tingkat kualifikasi guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Penyebab utama permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, serta manajemen pelayanan pendidikan yang belum optimal.

7. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan.

   Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk yang di dalamnya memuat indikator indeks kesehatan, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. IPM pada tahun 2021 sebesar 71,97 dan tahun 2022 meningkat menjadi 72,93 yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 71,60 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 71,95 tahun. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, masih terdapat permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan antara lain: angka kematian bayi 8,1 per 1000 kelahiran, angka kematian ibu 83,47 per 100 ribu kelahiran , balita gizi buruk, balita stunting 10 %, penyakit HIV dan TBC. Disamping itu pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga anak-anak yang baru lahir akan meningkatkan *human capital* di masa depan.

8. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak.

   Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada aspek kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nganjuk di tahun 2020 sebesar 93,26 dan di tahun 2021 sebesar 93,76. Namun demikian, permasalahan utama yang terjadi adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam jabatan publik (DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa) masih kurang. Ini menjadi masalah, sebab dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki serta meningkatnya kesadaran mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial, akan menimbulkan permasalahan perempuan yang perlu mendapatkan penyelesaian. Di sisi lain, anak-anak (penduduk usia 0 sampai 18 tahun) berjumlah 28,65% dari 1.103 902 jiwa penduduk Nganjuk (BPS: Nganjuk Dalam Angka 2021). Kondisi ini, menimbulkan tuntutan kebutuhan pemenuhan hak anak antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak-hak anak lainnya.

9. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, baik olah raga prestasi, olah raga rekreasi (tradisional) masyarakat dan olah raga sekolah.

   Untuk olah raga prestasi, prestasi pemuda Nganjuk dalam keolahragaan cukup baik. Banyak prestasi yang sudah diraih dalam bidang olah raga baik tingkat asia tenggara, nasional maupun tingkat provinsi. Sebagai bagian dari wujud kesejahteraan rakyat, perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk masih perlu ditingkatkan. Meskipun capaian kinerja bidang pemuda dan olah raga selama 2018 – 2020 telah mencapai 100% dari target, namun olah raga masyarakat Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah. Penyebab permasalahan ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga, kurangnya sarana prasarana penunjang olah raga, terbatasnya sumber daya manusia tenaga pelatih yang berkualitas.

10. Belum optimalnya cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah, Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 4 (empat) unit TPA.

2. Permasalahan Daya Saing Daerah

1. Belum optimalnya penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah dan fasilitas umum lainnya.

Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai salah satu aspek daya saing daerah merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan mampu mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Nganjuk serta mendukung pelayanan publik. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian pembangunan infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cenderung stagnan. Pada 2016 jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 62,86%, naik sedikit menjadi 62,88% pada 2017 dan tahun 2018 naik menjadi 75,65%, naik sedikit menjadi 75,72% pada 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 88,33%. Adanya kegiatan proyek nasional dengan aktivitas pengangkutan material berat mengakibatkan kondisi jalan banyak yang rusak sudah di tangani.

2. Belum optimalnya pemenuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan dan sanitasi lingkungan.

   Ketersediaan air bersih merupakan salah satu aspek daya saing daerah. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 19,13%, sementara bila dibandingkan target RPJMN tahun 2019 sebesar 100% sehingga terdapat kesenjangan/*gap* sebesar 80.87%. Di sisi lain, proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sebesar 78,17% (jumlah penduduk : 1.046.495), sementara target RPJMN tahun 2019 sebesar 68,42%, artinya Kabupaten Nganjuk telah mencapai target, namun yang menjadi masalah adalah penyediaan air bersih belum merata di semua wilayah. Selain itu, akses air minum penduduk sebagian besar menggunakan sumur gali sebagai sumber air baku, sedangkan kemampuan PDAM Kabupaten untuk mensuplai air bersih masih terbatas.

3. Belum optimalnya strategi pemanfaatan ruang dan penciptaan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan strategis selingkar wilis (tunggal rogo mandiri) serta pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati termasuk pengembangan potensi MIGAS) yang berwawasan lingkungan.

4. Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri serta pengembangan kawasan industri.

   Iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi tingkat investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Kinerja investasi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan nilai investasi antara tahun 2013 – 2017 menunjukkan peningkatan meskipun terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, kemudahan proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Lama proses perijinan di Kabupaten Nganjuk yakni 1 – 2 hari untuk izin mendirikan bangunan, 1 – 4 hari untuk surat ijin usaha perdagangan dan ijin reklame, dan 5 – 7 hari untuk tanda daftar perusahaan, ijin usaha industri, tanda daftar industri, ijin usaha kawasan industri. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013, jenis pajak daerah terdapat 10 jenis meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk mendukung peningkatan investasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Sementara itu, jumlah persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total jumlah desa di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2014 sebesar 2,65%, tahun 2015 sebesar 4,55%, tahun 2016 sebesar 8,33% dan tahun 2017 sebesar 12,12%, yang berarti mengalami peningkatan tiap tahun. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang dapat menarik minat investasi di Kabupaten Nganjuk.

5. Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi dan elektronik government menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

   Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yang bisa dilihat dari adanya kesenjangan kinerja urusan penunjang pemerintahan daerah antara lain pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, yang perlu didukung

teknologi pengawasan, dan fungsi penyusunan kebijakan daerah. Penyebab utama dari belum optimalnya perencanaan daerah adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya ASN perencana pada perangkat daerah, manajemen data pembangunan yang belum optimal, serta regulasi dan standar operasional prosedur mengenai perencanaan yang perlu diperbarui. Pada aspek pengelolaan keuangan, masih terdapat permasalahan terutama ketergantungan pendapatan daerah pada dana perimbangan meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, padahal pajak daerah berpotensi naik seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya kualitas data potensi pendapatan daerah, kurangnya sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak. Pada aspek kepegawaian, permasalahan utama adalah kurangnya kompetensi dan kapasitas pegawai yang tercermin dari persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural baru mencapai 80% pada tahun 2019 dan persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional sebesar 90,29% pada tahun 2017. Penyebab utama permasalahan adalah menurunnya jumlah aparatur sipil negara dan belum optimalnya penerapan penempatan jabatan sesuai kompetensi. Disamping itu pada tahun anggran 2020 kegiatan diklat di tunda sampai pandemi covid mereda. Pada aspek pengawasan, masih terdapat permasalahan menyangkut efektivitas tindak lanjut temuan pengawasan. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas khususnya jumlah auditor yang masih kurang. Permasalahan lainnya dalam fungsi koordinasi ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2020 mendapat predikat B (65,56) . Penyebab utama permasalahan antara lain kurangnya kapasitas sumber daya manusia lembaga pembentuk peraturan daerah, kurangnya ketepatan perencanaan program pembentukan peraturan daerah, belum optimalnya koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

6. Belum optimalnya koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penciptaan stabilisasi ketentraman, ketertiban, kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.

   Penanganan kebencanaan serta penciptaan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari pelayanan urusan dasar wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah. Kabupaten Nganjuk tergolong daerah kategori tinggi rawan bencana

dengan skor Indeks Resiko Bencana sebesar 152,8. Penyebab utama permasalahan adalah belum tersusunnya strategi pengurangan resiko bencana, kurang optimalnya koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana serta kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terbatas. Disamping itu masih adanya konflik yang terkait pemilihan kepala desa maupun perangkat desa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak, pencurian, perkelahian antar perguruan silat.

7. Belum optimalnya aset tanah Pemda dan desa yang bersertifikat, jumlah aset tanah pemda tahun 2017 sebesar 1.354 dan jumlah aset tanah pemda yang sudah bersertifikat sebesar 960 atau asset baru 71% yang sudah bersertifikat masih terdapat 29% aset pemda yang belum bersertifikat.

2) Identifikasi dan Penelaahan Isu Strategis

1. Posisi Geografis dan Geo-ekonomi Daerah

Menurut RTRW 2010-2030 Kawasan strategis Kabupaten Nganjuk dibagi menjadi kawasan strategis yang meliputi: Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari 6 jenis kawasan yaitu: kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 9 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

2. Kondisi Demografi

Kabupaten Nganjuk termasuk daerah dengan laju pertumbuhan yang cukup rendah di Provinsi Jawa Timur, dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, maka beberapa isu strategi kependudukan antara lain: (a) memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

3. Lingkungan Sosial Budaya

Kabupaten Nganjuk adalah daerah yang memiliki beberapa obyek yang dapat menjadi tujuan wisata baik alam, buatan maupun sejarah. Wisata sejarah dipusatkan di Museum Anjuk Ladang yang menyimpan berbagai cagar budaya peninggalan sejarah berupa candi Ngetos, candi lor, bukit batu Songgong, bukit batu Ngroto dll. Sedangkan, untuk obyek wisata alam berupa air terjun dan goa serta gunung. Nilai sejarah Nganjuk yang lekat dengan jaman keemasan Mpu Sindok sebagai cikal bakal Kerajaan Nganjuk, sudah saatnya dilakukan penggalian nilai-nilai sejarah budaya Nganjuk untuk memberikan kontribusi penting dalam kekayaan sejarah bangsa. Kebijakan untuk mengembangkan Cagar Budaya perlu diprioritaskan di beberapa wilayah Nganjuk dengan mengembangkan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas sebagai forum warga yang potensial dimanfaatkan sebagai modal sosial dan budaya daerah.

4. Telaah Isu Strategis RPJPD Nganjuk Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2020, dimaksudkan untuk memberikan arah bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Nganjuk (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat diwujudkan gambaran masa depan yang diinginkan untuk setiap tahapan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta masa depan 20 tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat terwujud tujuan pembangunan daerah. Visi yang ingin dicapai dalam masa 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, adalah: "***NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA".*** Pencapaian Visi ini ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai,
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari;

RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan tahap ketiga pencapaian RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025. Ditahap pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018 fokus pembangunan diarahkan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan meningkatnya perekonomian daerah melalui terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat yang dilandasi moral agama. Fokus pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 lebih diarahkan pada penguatan capaian hasil yang telah dicapai dengan menitik beratkan pada :

1. Penciptaan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kerukunan melalui apresiasi seni, budaya, keolahragaan yang berlandaskan gotong royong serta kearifan lokal di masyarakat ;
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) dan pelayanan publik yang prima berlandaskan keimanan yang ber-Ketuhanan YME ;
3. Peningkatan daya saing produk sektor unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, peningkatan mutu dan perlindungan produk lokal daerah;
4. Peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan ;
5. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pembinaan ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan berusaha serta daya saing industri ;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dari keenam fokus pembangunan tersebut perlu dikembangkan tema pembangunan tahunan dalam setiap penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk.

5. Telaah Isu Strategis Internasional SDG's

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's)*. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berkewajiban untuk mendukung pencapaian target SDG's. SDG's (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDG's adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDG's ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDG's (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGD's sekarang diganti dengan SDG's.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, SDG's (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDG's tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Tujuan dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.

6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
9. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
10. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
11. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
12. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
13. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
14. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
15. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
16. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Mempertimbangkan kesepakatan global *Sustainable Development Goals* **(SDGs)** dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun perencanaan daerah tahun 2018-2023 dengan memprioritaskan: (1) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; (4) mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (5) menciptakan kondisi masyarakat stabil, harmonis, dan kolaboratif.

6. Telaah Isu Strategis Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Nganjuk mempersiapkan mental dan ketrampilan hidup penduduk Kabupaten Nganjuk menghadapi MEA; yaitu:(a) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (b) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (c) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

7. RPJMN Tahun 2020-2024

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan .
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Senada dengan arahan presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) 2020-2024, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk mengambil peran secara aktif yang disebut tri cita bakti : (1) Infrastruktur publik yang berkualitas (senada dengan arahan kedua yaitu Pembangunan Infrastuktur), (2) Sumber Daya Manusia yang Unggul (senada dengan arahan pertama yaitu Pembangunan SDM), dan (3) Kemandirian Ekonomi (senada dengan arahan kelima Transformasi Ekonomi) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk lokal di pasaran yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat.

8. Telaah Isu Strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi. Amanah ini agar terjadi sinkronisasi sehingga perencanaan pembangunan di tingkat bawah dan yang lebih tinggi saling melengkapi satu sama lain agar ketercapaian visi dan misi yang diemban dua dokumen perencanaan tersebut dapat menunjang satu sama lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah: **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"**

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut ditindaklanjuti dengan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.**

   Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata seluruh warga jawa timur . Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2. **Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.**

   Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3. **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

   Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.

4. **Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.**

   Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup.

9. **Telaah isu strategis RTRW (Nasional, Provinsi dan Kabupaten).**

   Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan salah satu prinsip dalam penyusunan RPJMD adalah

bahwa RPJMD harus merupakan Integrasi dari rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini akan mendukung terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan agar terjadi integrasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sehingga mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018. Sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen ini telah mengacu pada ketentuan pasal 25 Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 yaitu tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Secara implisit menerangkan bahwa dokumen RPJMD yang mengacu pada RTRW Kabupaten yang telah secara signifikan menjadikan RTRW provinsi dan Nasional juga sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya tampung dan kebutuhan ruang untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan Kebijakan dan Strategi serta rencana pola ruang untuk Kabupaten Nganjuk.

3) Isu Strategis Kabupaten Nganjuk

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih

berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk ada beberapa isu prioritas yaitu Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air, Belum optimalnya penanganan terhadap permasalahan kemiskinan, dan Belum optimalnya kelembagaan dan birokrasi.

Dari rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah (aspek kesejahteraan dan aspek daya saing) serta permasalahan urusan, serta disinergikan dengan hasil penelaahan isu strategis internasional (*SDG's*), nasional maupun regional dapat dirumuskan isu-isu strategis utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dan strategi efektifitas kebijakan intervensi program pengentasan kemiskinan;
2. Pelembagaan strategi dan intervensi program penanganan kecukupan pangan dan gizi;
3. Penurunan prevalensi balita gizi buruk dan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan kualitas aksesibilitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
5. Pelembagaan dan intervensi program pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
6. Penguatan strategi penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah, dan fasilitas umum lainnya;
7. Pemenuhan kebutuhan pemukiman yang layak dengan mempertimbangkan pembangunan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana penunjang transportasi jalan;
9. Peningkatan pelayanan pemenuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan kekeringan dan pengelolaan sumber daya air;
10. Penguatan strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri serta pengembangan kawasan industri;
11. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19*;

12. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan;
13. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pasar tradisional untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat;
14. Tata kelola dan pengembangan seni, budaya dan kepariwisataan daerah, kawasan pedesaan dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah;
15. Pengembangan wilayah agropolitan lingkar wilis (tunggal rogo mandiri);
16. Optimalisasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Penguatan upaya peningkatan sarana prasarana, kualitas pendidikan dasar dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta pengembangan budaya baca dan literasi;
18. Optimalisasi pemanfaatan ruang, ruang terbuka hijau (RTH) publik dan penciptaan kawasan strategis cepat tumbuh serta pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati termasuk pengembangan potensi MIGAS) yang berwawasan lingkungan;
19. Peningkatan sarana prasarana pendukung dan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat dan akurat;
20. Keberpihakan Pemerintah daerah terhadap keberlanjutan peningkatan pertumbuhan usaha mikro serta pengembangan ekonomi kreatif;
21. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan elektronik government menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dengan mengembangkan kemitraan global, kerjasama Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha;
22. Mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta stabilisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat;
23. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, baik olah raga prestasi, olah raga rekreasi (tradisional) masyarakat dan olah raga sekolah;
24. Peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi tata kelola pemerintahan desa yang baik;
25. Peningkatan pendapatan asli daerah dari obyek pajak sektor pertanian,

perdagangan, industri dan konstruksi yang memiliki kontribusi PDRB tinggi.

26. Menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko pencemaran lingkungan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, selanjutnya dirumuskan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Visi harus memiliki pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi menjadi arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 digali dari visi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Nganjuk yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun serta disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangun Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DANBERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut :

Tabel 1.20
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)	MAJU	Pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju. Kemajuan Nganjuk dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi di level makro daerah yang berimbas dengan pemerataan "kue ekonomi" di level keluarga/masyarakat. Kemajuan juga dicerminkan dari meningkatnya kesejahteraan sosial yakni pendidikan yang semakin maju, derajat kesehatan yang semakin tinggi. Kabupaten Nganjuk yang maju dicerminkan dari kondisi terpenuhinya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan daerah yang maju dengan penerapan *smart government* yakni serangkaian sistem elektronik yang didukung teknologi informasi guna meningkatkan kinerja birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
	BERMARTABAT	Harapan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju tentu dengan tidak meninggalkan jati diri manusia yang bermartabat. Oleh sebab itu, pembangunan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dimensi hubungan dengan Sang Pencipta. Selain itu, dalam dimensi hubungan antar manusia, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki etika yang luhur, toleran, ramah, memiliki etos kerja tinggi. Pada lingkup pemerintahan, kemartabatan diwujudkan melalui kepemimpinan dan keteladanan setiap aparatur Pemerintah Kabupaten, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
	NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO Harmonis dan dinamis antara desa dan kota	Nganjuk Nyawiji bermakna bersatu, kerjasama, gotong royong, melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak ada sekat antara seorang pemimpin dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan daerah yang bermartabat. Konsep ini sebagai spirit dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023. Adapun penjelasan secara umum dari konsep Nganjuk Nyawiji sebagaimana berikut : 1. Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang besar dan tersebar di desa dan kota. Potensi tersebut antara lain: pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata, IMKM, UMKM, kesenian tradisional, adat dan budaya lokal, serta lainnya. Apabila semua potensi sumber daya tersebut dimanfaatkan secara optimal maka akan menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat di desa dan kota. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya, ekonomi yang memadai. 2. Kabupaten Nganjuk kaya akan keragaman budaya yang mempunyai nilai-nilai illahiyah (Ketuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna lainnya yang mempunyai implikasi positif dalam membangun peradaban manusia seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. lntinya keberagaman budaya dapat dijadikan sebuah spirit penguatan ikatan sosial antar masyarakat.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: Peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan, toleransi dan kerukunan umat beragama; Peningkatan kemampuan fasilitasi layanan keagamaan; Peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, kenyamanan lingkungan.

2. **Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan institusi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang bermartabat melalui: Penciptaan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis elektronik (e-government); Pelaksanaan integrasi perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengawas internal; Peningkatan sistem koordinasi, sarana dan prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung sinergitas kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang), penyusunan kebijakan dan produk hukum Pemerintahan Daerah; Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan; Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung publikasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi

terintegrasi dengan mengembangkan konsep Kabupaten Cerdas (Nganjuk Smart City); Pemantapan manajemen kearsipan, sarana prasarana, dan kapasitas pengelola arsip; Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan peneliti untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi pembangunan daerah; Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis manajemen SDM berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil merit system; Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, sarana dan prasarana, dan tata kelola pelayanan publik yang terintegrasi; Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. **Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan efektivitas program pemberdayaan masyarakat; Peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa; Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi. Penyelenggaraan manajemen pelayanan pendidikan yang didukung sarana prasarana yang memadai; Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;Peningkatan kemampuan dan minat berprestasi pemuda dalam olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masyarakat; Peningkatan pelayanan kesehatan; Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB; Peningkatan pemberdayaan peran Perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak.

4. **Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: Pemberian kemudahan akses permodalan Petani (Kartu Nganjuk Mandiri bidang Pertanian); Pemberian bantuan sarana prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian; Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center;

Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan daerah; Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan; Pengembangan keunggulan teknologi tepat guna; Penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan industri dan pusat perdagangan terintegrasi; Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan koperasi serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Fasilitasi dan kemudahan proses perizinan usaha; Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda wirausaha; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

5. **Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang kaya akan keragaman budaya, dengan peradaban yang penuh nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. Upaya tersebut diwujudkan melalui: Pengembangan pemasaran pariwisata dan sumber daya kepariwisataan; Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal; Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta kerjasama investasi kepariwisataan.

6. **Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.**

   Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju melalui:Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang memenuhi standar; Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Selingkar Wilis di Kabupaten Nganjuk; Pembangunan jalan poros desa terpencil/ terisolir/ perbatasan; Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan yang berkualitas; Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saluran irigasi dan prasarana sumber daya air yang memadai; Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; Peningkatan penyediaan rumah layak huni dan prasarana pemukiman; Pengembangan sinergitas pembangunan desa dan daerah; Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan; Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran; Peningkatan fasilitas dan tata kelola persampahan,

pertamanan serta ruang terbuka hijau lainnya; Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana.

Keterkaitan visi, pokok visi, dan misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.21
Perwujudan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	**Misi**	**Penjelasan Misi**
MAJU	Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan masyarakat yang gemar membaca; peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan; peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.
	Misi 4 : Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui : peningkatan pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani; peningkatan volume usaha sektor industri dan perdagangan; peningkatan perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro; peningkatan kemandirian pangan daerah; peningkatan kemandirian Desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	**Misi**	**Penjelasan Misi**
	Misi 6 : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "MAJU", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju melalui: peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal; peningkatan ketaatan pemanfaatan ruang Daerah; peningkatan penyelenggaraan transportasi Daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan; peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam; peningkatan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
BERMARTABAT	Misi 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: peningkatan kehidupan sosial masyarakat yang religius, yang aman, tentram, dan tertib; peningkatan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis.
	Misi 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan institusi Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang bermartabat melalui: peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	**Misi**	**Penjelasan Misi**
	Misi 5 : Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang kaya akan keragaman budaya, dengan peradaban yang penuh nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah era globalisasi saat ini. Upaya tersebut diwujudkan melalui: peningkatan daya saing pariwisata Daerah; peningkatan pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan strategi umum dan arah kebijakan umum, selanjutnya dirumuskan tema/fokus pembangunan tahunan yang menggambarkan tahapan dan program prioritas setiap tahun. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahun ke tahun lainnya dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yakni **"Pemulihan ekonomi dengan penguatan sektor unggulan daerah berbasis pertanian pariwisata, industri dan perdagangan dengan didukung Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas**". Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2022. Rumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan.*

   Fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor, pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, pelayanan PMKS dan lansia miskin, pengurangan angka pengangguran, melaksanakan program-program KB,

peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dsb.

2. *Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk.*

   Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan kawasan strategis cepat tumbuh serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan. Selain dari sisi investasi, fokus pada prioritas ini juga meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk yang diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian dan sebagainya. Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada peningkatan akses permodalan pada sektor usaha mikro, pembinaan terhadap UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sektor pariwisata dan budaya pada Tahun 2022 prioritas pada pengembangan potensi pariwisata dengan peningkatan promosi kepariwisataan dan budaya daerah, pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata, pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian seni budaya dan kearifan lokal. Penumbuhan kembali sektor-sektor ekonomi produktif pasca pandemi COVID-19 harus menjadi fokus dan prioritas pembangunan dikarenakan sektor ini terdampak sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

3. *Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat.*

   Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah pembangunan dan rehabilitasi puskesmas induk, puskesmas pembantu, poskesdes, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedik serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader-kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat-obatan yang bermutu, peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat, pelayanan

khusus kepada ibu hamil, balita dan lansia, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya prioritas dalam rangka kesiapan menghadapi wabah penyakit disemua aspek kesehatan promotif, preventif, maupaun kuratif.

4. *Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman.*

   Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas perhubungan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan terpencil serta jalur-jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan, angkutan umum, kelaikan kendaraan dan pengamanan lalu lintas. Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru, pembinaan petani pemakai air dsb. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, normalisasi drainase, pembuatan saluran pembuang, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan.

5. *Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan.*

   Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas; meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku-buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapat perhatian.

6. *Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.*

   Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020, menunjukkan pentingnya penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat serta pentingnya kolaborasi dan kesiapan terhadap bencana yang tidak diprediksi terutama ancaman wabah penyakit. Munculnya pandemi COVID-19 menjelaskan bahwa perhatian ke penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19. Dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economy loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sisitem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, dan penanganan pasca bencana. Di bidang lingkungan hidup, prioritas tahun 2022 adalah terkait tata kelola persampahan dan pencemaran serta ruang terbuka hijau.

7. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).*

   Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (open and clean government), meningkatkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pelayanan publik

dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov).

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Untuk rincian program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.22
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**1,704,569,267,014.00**	**1,495,833,624,836.24**	**87.75**
	1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**988,677,445,994.00**	**854,108,880,555.02**	**86.39**
	Dinas Pendidikan	**988,677,445,994.00**	**854,108,880,555.02**	**86.39**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743,202,803,389.00	629,799,939,163.00	84.74
	Program Pengelolaan Pendidikan	219,647,211,605.00	200,117,417,232.02	91.11
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,699,681,600.00	24,129,217,760.00	93.89
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	127,749,400.00	62,306,400.00	48.77
	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**640,790,019,071.00**	**576,960,780,170.11**	**90.04**
	Dinas Kesehatan	**243,305,936,873.00**	**194,225,186,159.02**	**79.83**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	126,352,655,214.00	103,453,167,064.82	81.88
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109,287,832,809.00	84,097,903,100.20	76.95
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,610,440,000.00	5,163,798,391.00	92.04
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	341,892,000.00	171,978,797.00	50.30
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,713,116,850.00	1,338,338,806.00	78.12
	RSUD Nganjuk	**238,031,879,198.00**	**232,616,189,559.00**	**97.72**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	236,531,879,198.00	231,131,976,603.00	97.72
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,500,000,000.00	1,484,212,956.00	98.95
	RSUD Kertosono	**159,452,203,000.00**	**150,119,404,452.09**	**94.15**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	159,452,203,000.00	150,119,404,452.09	94.15
	3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**269,391,352,198.00**	**253,307,588,958.81**	**94.03**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,352,563,276.00	28,663,813,541.00	88.60
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23,425,098,919.00	20,387,522,953.00	87.03
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	24,437,000,000.00	24,302,752,300.00	99.45

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Program Penataan Bangunan Gedung	34,983,200,000.00	34,425,926,345.20	98.41
Program penataan bangunan dan lingkungannya	4,579,448,292.00	4,473,243,000.00	97.68
Program Penyelenggaraan Jalan	148,279,962,961.00	139,933,296,679.61	94.37
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	167,600,000.00	130,047,950.00	77.59
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,166,478,750.00	990,986,190.00	84.96
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**25,381,105,354.00**	**23,103,615,847.71**	**91.03**
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	**25,381,105,354.00**	**23,103,615,847.71**	**91.03**
Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,309,719,782.00	12,285,919,730.00	92.31
Program Pengembangan Perumahan	8,263,439,722.00	7,568,693,081.71	91.59
Program Kawasan Permukiman	1,606,381,950.00	1,341,016,098.00	83.48
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	726,168,900.00	473,614,866.75	65.22
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1,461,684,000.00	1,426,087,421.25	97.56
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	13,711,000.00	8,284,650.00	60.42
5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**24,077,490,289.00**	**19,562,765,116.60**	**81.25**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6,465,105,080.00**	**5,611,113,885.60**	**86.79**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,554,460,590.00	3,853,128,583.80	84.60
Program Penanggulangan Bencana	1,910,644,490.00	1,757,985,301.80	92.01
Satuan Polisi Pamong Praja	**11,712,539,989.00**	**10,187,061,866.00**	**86.98**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,299,183,550.00	7,274,123,619.00	87.65
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,413,356,439.00	2,912,938,247.00	85.34
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0.00	0.00	0.00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	**5,899,845,220.00**	**3,764,589,365.00**	**63.81**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,325,449,970.00	2,331,153,690.00	53.89
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,574,395,250.00	1,433,435,675.00	91.05
6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**25,643,206,306.00**	**22,097,583,146.80**	**86.17**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**25,643,206,306.00**	**22,097,583,146.80**	**86.17**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,460,129,956.00	12,449,793,998.20	80.53
Program Pemberdayaan Sosial	341,966,950.00	325,393,330.40	95.15
Program Rehabilitasi Sosial	935,735,950.00	830,681,324.20	88.77
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,942,999,850.00	2,864,410,850.00	97.33
Program Penanganan Bencana	5,908,840,750.00	5,575,995,554.00	94.37
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	53,532,850.00	51,308,090.00	95.84
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**174,357,858,899.00**	**155,769,309,145.71**	**89.34**
7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**8,567,032,450.00**	**6,249,064,031.00**	**72.94**

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	Dinas Tenaga Kerja	**8,567,032,450.00**	**6,249,064,031.00**	**72.94**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,676,658,650.00	3,011,997,291.00	64.40
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,395,973,800.00	2,877,541,390.00	84.73
	Program Penempatan Tenaga Kerja	346,800,000.00	221,278,000.00	63.81
	Program Hubungan Industrial	147,600,000.00	138,247,350.00	93.66
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**795,608,250.00**	**748,968,764.20**	**94.14**
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**795,608,250.00**	**748,968,764.20**	**94.14**
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	242,150,000.00	234,475,177.00	96.83
	Program Perlindungan Perempuan	56,973,800.00	52,226,350.00	91.67
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	105,217,850.00	95,157,090.40	90.44
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	16,830,000.00	16,338,686.40	97.08
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	220,006,600.00	203,282,056.40	92.40
	Program Perlindungan Khusus Anak	68,580,000.00	64,889,404.00	94.62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85,850,000.00	82,600,000.00	96.21
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**8,113,038,350.00**	**7,419,072,608.27**	**91.45**
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**8,113,038,350.00**	**7,419,072,608.27**	**91.45**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,856,289,050.00	5,379,712,086.27	91.86
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1,843,875,000.00	1,840,225,362.00	99.80
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kemandirian Pangan	389,848,300.00	177,368,250.00	45.50
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	23,026,000.00	21,766,910.00	94.53
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**1,118,637,650.00**	**839,832,185.00**	**75.08**
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	**1,118,637,650.00**	**839,832,185.00**	**75.08**
	Program Penatagunaan Tanah	1,118,637,650.00	839,832,185.00	75.08
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**33,049,672,706.00**	**30,860,271,272.00**	**93.38**
	Dinas Lingkungan Hidup	**33,049,672,706.00**	**30,860,271,272.00**	**93.38**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,511,556,350.00	12,696,644,479.00	93.97
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	796,084,000.00	713,642,626.00	89.64
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	728,266,673.00	673,914,579.00	92.54
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10,192,191,863.00	9,488,712,088.00	93.10
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	290,850,000.00	155,298,457.00	53.39
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	108,747,000.00	61,308,800.00	56.38
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	129,400,000.00	95,668,200.00	73.93
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45,000,000.00	20,569,000.00	45.71
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	171,700,000.00	133,181,582.00	77.57

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	Program Pengelolaan Persampahan	7,075,876,820.00	6,821,331,461.00	96.40
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10,965,292,389.00**	**9,054,953,482.00**	**82.58**
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**10,965,292,389.00**	**9,054,953,482.00**	**82.58**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,409,245,639.00	8,565,232,010.00	82.28
	Program Pendaftaran Penduduk	265,602,250.00	236,359,950.00	88.99
	Program Pencatatan Sipil	125,189,300.00	109,313,600.00	87.32
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	165,255,200.00	144,047,922.00	87.17
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**10,268,690,398.00**	**10,068,876,617.00**	**98.05**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**10,268,690,398.00**	**10,068,876,617.00**	**98.05**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,929,881,798.00	5,636,515,986.00	95.05
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	159,750,100.00	147,159,035.00	92.12
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	195,850,000.00	187,973,368.00	95.98
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,356,483,500.00	3,527,754,951.00	105.10
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	626,725,000.00	569,473,277.00	90.86
	Sekretariat Daerah	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**19,347,732,330.00**	**17,953,560,125.00**	**92.79**
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**19,347,732,330.00**	**17,953,560,125.00**	**92.79**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,537,900,160.00	5,278,234,903.00	95.31
	Program Pengendalian Penduduk	275,515,000.00	270,556,379.00	98.20
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8,104,716,420.00	7,951,528,647.00	98.11
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	5,429,600,750.00	4,453,240,196.00	82.02
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**35,132,897,058.00**	**30,917,826,265.24**	**88.00**
	Dinas Perhubungan	**35,132,897,058.00**	**30,917,826,265.24**	**88.00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,996,657,708.00	24,195,223,020.00	86.42
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7,136,239,350.00	6,722,603,245.24	94.20
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**13,821,694,745.00**	**12,588,680,179.00**	**91.08**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	**13,821,694,745.00**	**12,588,680,179.00**	**91.08**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,245,149,144.00	5,573,382,822.00	89.24
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,029,949,000.00	1,658,142,590.00	81.68
	Program Aplikasi Informatika	5,546,596,601.00	5,357,154,767.00	96.58

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**6,257,801,850.00**	**4,924,958,910.00**	**78.70**
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	**6,257,801,850.00**	**4,924,958,910.00**	**78.70**
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4,908,404,050.00	3,669,133,860.00	74.75
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	284,873,500.00	276,810,400.00	97.17
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	73,458,000.00	68,758,000.00	93.60
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	470,345,000.00	444,457,950.00	94.50
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	15,321,300.00	14,308,800.00	93.39
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	207,300,000.00	179,800,500.00	86.73
	Program Pengembangan UMKM	298,100,000.00	271,689,400.00	91.14
	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**5,132,599,650.00**	**4,177,300,433.00**	**81.39**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**5,132,599,650.00**	**4,177,300,433.00**	**81.39**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,353,205,650.00	3,563,399,949.00	81.86
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	158,300,000.00	154,399,700.00	97.54
	Program Promosi Penanaman Modal	62,500,000.00	62,015,000.00	99.22
	Program Pelayanan Penanaman Modal	78,000,000.00	74,892,000.00	96.02
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	460,594,000.00	303,003,784.00	65.79
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20,000,000.00	19,590,000.00	97.95
	19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**4,029,797,150.00**	**3,985,611,050.00**	**98.90**
	Satuan Polisi Pamong Praja	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			
	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	**4,029,797,150.00**	**3,985,611,050.00**	**98.90**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	800,000,000.00	792,488,086.00	99.06
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,478,000,000.00	1,473,093,932.00	99.67
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,751,797,150.00	1,720,029,032.00	98.19
	20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**119,959,000.00**	**99,649,500.00**	**83.07**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	**119,959,000.00**	**99,649,500.00**	**83.07**
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	119,959,000.00	99,649,500.00	83.07
	21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**34,800,000.00**	**32,664,340.00**	**93.86**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	**34,800,000.00**	**32,664,340.00**	**93.86**
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	34,800,000.00	32,664,340.00	93.86
	Program Aplikasi Informatika	0.00	0.00	0.00!
	22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**2,976,848,900.00**	**2,959,682,519.00**	**99.42**
	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	**2,976,848,900.00**	**2,959,682,519.00**	**99.42**
	Program Pengembangan Kebudayaan	1,539,973,900.00	1,537,240,900.00	99.82

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	260,375,000.00	256,595,000.00	98.55
Rogram Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	376,500,000.00	368,643,649.00	97.91
Program Pengelolaan Permuseuman	800,000,000.00	797,202,970.00	99.65
23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**9,978,492,900.00**	**8,986,465,035.00**	**90.06**
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	**9,978,492,900.00**	**8,986,465,035.00**	**90.06**
Program Pembinaan Perpustakaan	9,964,592,900.00	8,975,515,034.00	90.07
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0.00	0.00	0.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,900,000.00	10,950,000.00	78.78
24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**4,647,263,123.00**	**3,901,871,830.00**	**83.96**
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	**4,647,263,123.00**	**3,901,871,830.00**	83.96
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,306,854,273.00	3,569,173,544.00	82.87
Program Pengelolaan Arsip	273,789,750.00	268,598,086.00	98.10
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	15,118,700.00	13,248,450.00	87.63
Program Perizinan Penggunaan Arsip	51,500,400.00	50,851,750.00	98.74
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**73,338,665,369.00**	**67,300,998,353.74**	**91.77**
24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**641,574,500.00**	**621,755,050.00**	**96.91**
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**641,574,500.00**	**621,755,050.00**	**96.91**
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	326,016,500.00	319,540,000.00	98.01
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	41,253,000.00	38,495,500.00	93.32
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	261,705,000.00	252,919,550.00	96.64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,600,000.00	10,800,000.00	85.71
25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**9,093,671,280.00**	**8,322,885,025.00**	**91.52**
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	**9,093,671,280.00**	**8,322,885,025.00**	**91.52**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,074,336,750.00	5,710,783,141.00	94.01
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,711,516,530.00	1,554,589,702.00	90.83
Program Pemasaran Pariwisata	839,000,000.00	599,004,182.00	71.40
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	468,818,000.00	458,508,000.00	97.80
26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**46,452,209,222.00**	**42,480,054,227.74**	**91.45**
Dinas Pertanian	**46,452,209,222.00**	**42,480,054,227.74**	**91.45**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,785,258,122.00	33,702,152,214.00	91.62
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,539,624,000.00	6,137,601,310.74	93.85
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	341,892,000.00	171,978,797.00	50.30
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	517,040,400.00	446,741,417.00	86.40
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,441,029,850.00	1,356,747,700.00	94.15
Program Perizinan Usaha Pertanian	15,000,000.00	13,571,900.00	90.48
Program Penyuluhan Pertanian	812,364,850.00	651,260,889.00	80.17

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**6,573,955,700.00**	**6,289,285,676.00**	**95.67**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**6,573,955,700.00**	**6,289,285,676.00**	**95.67**
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	56,975,800.00	41,172,678.00	72.26
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,909,499,200.00	5,707,276,942.00	96.58
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	84,171,200.00	61,872,206.00	73.51
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	169,358,400.00	147,882,414.00	87.32
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	349,751,100.00	326,881,436.00	93.46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00
28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**10,517,254,667.00**	**9,531,831,675.00**	**90.63**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**10,517,254,667.00**	**9,531,831,675.00**	**90.63**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,911,124,667.00	8,991,321,739.00	90.72
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	417,175,000.00	378,052,290.00	90.62
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	40,726,000.00	31,631,428.00	77.67
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	148,229,000.00	130,826,218.00	88.26
28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**60,000,000.00**	**55,186,700.00**	**91.98**
Dinas Tenaga Kerja	**60,000,000.00**	**55,186,700.00**	**91.98**
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	60,000,000.00	55,186,700.00	91.98
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**764,169,760,960.00**	**689,641,945,314.92**	**90.25**
1 SEKRETARIAT DAERAH	**57,608,609,910.00**	**50,317,866,143.00**	**87.34**
Sekretariat Daerah	**57,608,609,910.00**	**50,317,866,143.00**	**87.34**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,723,554,360.00	45,812,100,251.00	90.32
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,395,396,050.00	2,609,431,113.00	59.37
Program Perekonomian dan Pembangunan	2,489,659,500.00	1,896,334,779.00	76.17
2 SEKRETARIAT DPRD	**74,189,633,185.00**	**67,243,979,032.00**	**90.64**
Sekretariat DPRD	**74,189,633,185.00**	**67,243,979,032.00**	**90.64**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,801,342,135.00	37,500,086,246.00	94.22
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	34,388,291,050.00	29,743,892,786.00	86.49
3 PERENCANAAN	**9,267,330,050.00**	**7,991,544,689.00**	**86.23**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**9,267,330,050.00**	**7,991,544,689.00**	**86.23**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,250,895,650.00	6,115,815,432.00	84.35
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	690,611,000.00	672,962,484.00	97.44
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,325,823,400.00	1,202,766,773.00	90.72
4 KEUANGAN	**498,300,746,458.00**	**460,960,675,064.00**	**92.51**
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**481,784,971,807.00**	**446,597,973,803.00**	**92.70**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	474,100,388,657.00	441,270,749,108.80	93.08

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4,760,235,150.00	3,386,107,225.50	71.13
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,924,348,000.00	1,941,117,468.70	66.38
Badan Pendapatan Daerah	**16,515,774,651.00**	**14,362,701,261.00**	**86.96**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,529,742,551.00	11,978,559,490.00	88.54
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,986,032,100.00	2,384,141,771.00	79.84
5 KEPEGAWAIAN	**7,855,458,902.00**	**6,323,733,780.00**	**80.50**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**7,855,458,902.00**	**6,323,733,780.00**	**80.50**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,459,934,302.00	4,746,330,462.00	86.93
Program Kepegawaian Daerah	2,395,524,600.00	1,577,403,318.00	65.85
6 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**3,545,596,450.00**	**3,418,197,280.00**	**96.41**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**3,545,596,450.00**	**3,418,197,280.00**	**96.41**
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,545,596,450.00	3,418,197,280.00	96.41
7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**3,032,384,000.00**	**2,395,709,616.00**	**79.00**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**3,032,384,000.00**	**2,395,709,616.00**	**79.00**
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3,032,384,000.00	2,395,709,616.00	79.00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**9,293,808,760.00**	**8,081,982,879.00**	**86.96**
1 INSPEKTORAT DAERAH	**9,293,808,760.00**	**8,081,982,879.00**	**86.96**
Inspektorat	**9,293,808,760.00**	**8,081,982,879.00**	**86.96**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,570,367,760.00	7,607,922,614.00	88.77
Program Penyelenggaraan Pengawasan	554,228,500.00	376,584,365.00	67.95
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	169,212,500.00	97,475,900.00	57.61
UNSUR KEWILAYAHAN	**91,409,591,957.00**	**74,312,075,116.92**	**81.30**
1 KECAMATAN	**91,409,591,957.00**	**74,312,075,116.92**	**81.30**
1 Kecamatan Bagor	**5,759,851,426**	**5,097,392,898**	**88.50**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,649,134,650	3,077,564,248	84.34
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	406,697,212	379,317,236	93.27
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,219,434,250	1,209,896,500	99.22
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160,340,014	149,830,164	93.45
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5,150,100	4,951,250	96.14
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	319,095,200	275,833,500	86.44
2 Kecamatan Baron	**3,350,209,444**	**2,671,971,163**	**79.76**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,111,250,044	2,452,338,863	78.82
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39,533,000	35,137,000	88.88
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13,608,500	12,387,500	91.03

URAIAN					ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,785,500	17,475,000	93.02
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146,020,600	134,460,800	92.08
					21,011,800	20,172,000	96.00
		3	**Kecamatan Berbek**		**3,476,088,610**	**3,037,071,859**	**87.37**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,130,917,960	2,714,122,761	86.69
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52,345,000	50,742,500	96.94
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	224,690,450	205,109,800	91.29
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,400,000	12,397,000	99.98
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24,874,200	24,854,500	99.92
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30,861,000	29,845,298	96.71
		4	**Kecamatan Gondang**		**3,115,069,744**	**2,797,184,247**	**89.80**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,588,139,294	2,319,286,697	89.61
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,056,650	64,337,000	81.38
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,678,850	34,926,050	85.86
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,070,000	11,782,650	78.19
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5,625,000	5,625,000	100.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	386,499,950	361,226,850	93.46
		5	**Kecamatan Jatikalen**		**2,533,577,100**	**1,964,325,206**	**77.53**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,310,513,900	1,791,814,812	77.55
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50,673,950	48,670,500	96.05
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27,286,800	15,705,500	57.56
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,052,800	2,162,500	53.36
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	108,668,500	85,844,644	79.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32,381,150	20,127,250	62.16
		6	**Kecamatan Kertosono**		**5,529,247,663**	**4,134,146,138**	**74.77**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,686,169,163	3,341,996,162	71.32
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33,554,000	18,003,500	53.66
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	553,974,500	519,046,476	93.70
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,750,000	15,500,000	98.41
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5,350,000	5,350,000	100.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	234,450,000	234,250,000	99.91
		7	**Kecamatan Lengkong**		**3,186,749,680**	**2,091,943,232**	**65.65**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,777,016,480	1,759,715,882	63.37
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	55,827,400	33,010,400	59.13

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	235,992,000	232,858,550	98.67
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,912,000	25,423,400	98.11
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6,521,000	4,455,000	68.32
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85,480,800	36,480,000	42.68
8	**Kecamatan Loceret**	**3,307,219,731**	**2,753,930,888**	**83.27**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,960,378,181	2,458,334,143	83.04
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	111,689,700	91,401,800	81.84
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43,815,150	37,939,500	86.59
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,380,700	41,470,545	91.38
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	139,611,000	118,686,500	85.01
		6,345,000	6,098,400	96.11
9	**Kecamatan Nganjuk**	**23,010,465,750**	**18,402,937,177**	**79.98**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,434,355,206	12,033,335,560	73.22
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	135,490,650	93,644,450	69.12
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,522,096,894	4,443,860,267	98.27
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,229,650	3,375,000	22.16
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,675,000	8,675,000	100.00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,894,618,350	1,820,046,900	96.06
#	**Kecamatan Ngetos**	**2,306,610,587**	**1,655,953,756**	**71.79**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,059,098,587	1,466,570,506	71.22
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50,925,500	46,289,000	90.90
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	64,861,500	52,348,500	80.71
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,000,000	990,000	8.25
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73,350,000	57,456,250	78.33
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46,375,000	32,299,500	69.65
#	**Kecamatan Ngluyu**	**1,973,954,987**	**1,359,326,950**	**68.86**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,649,162,687	1,177,640,950	71.41
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65,033,800	26,576,250	40.87
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50,596,500	23,891,000	47.22
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,900,000	9,525,000	34.14
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37,470,000	11,147,500	29.75
		143,792,000	110,546,250	76.88
#	**Kecamatan Ngronggot**	**3,505,442,370**	**3,045,500,223**	**86.88**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,181,478,020	2,782,444,233	87.46

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	62,587,750	37,983,680	60.69
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	180,401,750	156,268,340	86.62
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,900,000	14,795,410	70.79
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30,699,850	24,846,280	80.93
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29,375,000	29,162,280	99.28
# Kecamatan Pace	**3,461,204,850**	**2,775,120,777**	**80.18**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,043,889,700	2,427,315,775	79.74
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,367,750	58,513,038	73.72
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	159,427,100	146,048,275	91.61
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	51,343,900	38,340,351	74.67
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101,900,800	86,899,500	85.28
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,275,600	18,003,838	71.23
# Kecamatan Patianrowo	**2,984,329,296**	**2,285,463,524**	**76.58**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,614,677,046	1,988,762,624	76.06
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	61,555,000	51,260,000	83.28
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22,672,950	19,208,500	84.72
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,154,700	12,638,400	69.62
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	229,353,000	182,697,600	79.66
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37,916,600	30,896,400	81.49
# Kecamatan Prambon	**3,040,649,399**	**2,612,691,365**	**85.93**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,686,991,929	2,360,494,365	87.85
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63,100,000	32,616,000	51.69
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17,950,000	16,366,000	91.18
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26,492,970	800,000	3.02
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33,964,500	27,650,000	81.41
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	212,150,000	174,765,000	82.38
# Kecamatan Rejoso	**3,469,099,915**	**2,547,464,162**	**73.43**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,102,052,415	2,266,593,462	73.07
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84,990,000	28,482,500	33.51
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	129,285,300	110,096,000	85.16
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	18,100,000	12,425,000	68.65
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	118,372,200	114,897,200	97.06
	16,300,000	14,970,000	91.84
# Kecamatan Sawahan	**3,229,572,913**	**2,366,188,033**	**73.27**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,840,449,663	2,101,065,933	73.97
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	71,852,000	24,257,000	33.76
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	51,905,000	37,076,900	71.43
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	229,048,750	179,996,200	78.58
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36,317,500	23,792,000	65.51
# Kecamatan Sukomoro	**5,189,647,135**	**4,816,466,059**	**92.81**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,352,568,005	3,057,264,144	91.19
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86,746,280	67,618,050	77.95
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,236,434,900	1,217,258,315	98.45
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22,104,350	12,280,150	55.56
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,350,000	3,336,500	99.60
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	488,443,600	458,708,900	93.91
# Kecamatan Tanjunganom	**6,235,699,307**	**5,519,849,072**	**88.52**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,745,698,207	4,087,984,872	86.14
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publ3ik	63,980,000	57,958,000	90.59
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,399,521,800	1,349,742,400	96.44
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5,725,000	5,645,800	98.62
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6,272,500	6,105,000	97.33
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,501,800	12,413,000	85.60
# Kecamatan Wilangan	**2,744,902,050**	**2,377,148,388**	**86.60**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,286,929,750	1,972,634,459	86.26
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	117,785,100	115,183,469	97.79
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	58,811,300	56,106,140	95.40
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	22,872,800	21,717,600	94.95
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22,890,100	22,745,400	99.37
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	235,613,000	188,761,320	80.11
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	**9,666,601,288.00**	**8,596,181,715.00**	**88.93**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Badan kesatuan bangsa dan politik	**9,666,601,288.00**	**8,596,181,715.00**	**88.93**
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7,735,905,588.00	7,084,586,857.00	91.58
Program penguatan ideologi pancasila	226,207,550.00	106,636,800.00	47.14
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	182,455,600.00	81,110,500.00	44.45
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	6,397,650.00	1,826,000.00	28.54
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	214,325,000.00	184,914,800.00	86.28

	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1,301,309,900.00	1,137,106,758.00	87.38

Sumber data : LRA TA 2022 (Unaudited)

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Penerapan SPM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal *(pasal 1).*
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

   Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah *(pasal 18).*
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM *(pasal 298).*

Perubahan Paradigma Penerapan SPM sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- Batasan pengertian SPM secara tekstual tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun

terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

- Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

B. Jenis Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten/Kota

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 4.23
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
			yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

C. Prinsip Penerapan SPM Kabupaten/Kota

a. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

b. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

c. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

d. Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

D. Tahapan Penerapan SPM

1. Pengumpulan Data

   Tahapan pengumpulan data mencakup:

   a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan

identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan

b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Dasar :

a. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

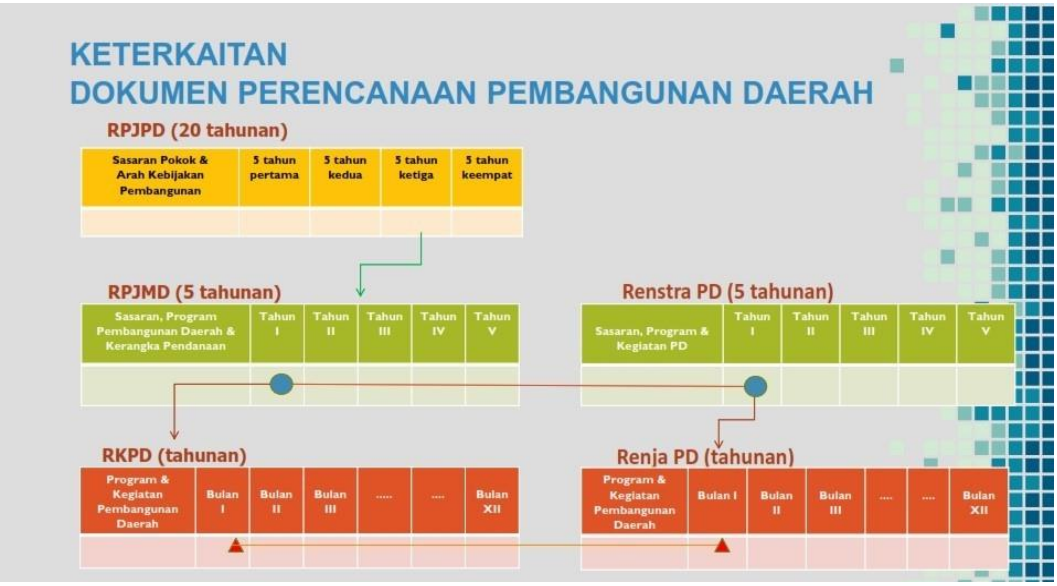
b. Ketersediaan diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah**.**

c. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.

e. Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan : (1) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri, (3) kondisi bencana, dan/atau (4) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

E. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar (Termasuk Pendanaan)



a) Penyusunan Perencanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Yang Dituangkan Dalam Dokumen Perencanaan

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
5. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
7. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

b) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan meliputi :

1. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
2. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan

dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar; merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

5. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan meliputi :

1. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

d) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD dilakukan pada saat perumusan meliputi :

1. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,97	72.93	1.33
2	Angka Kemiskinan	11,85	10.70	- 9.70
3	Angka Pengangguran	4,98	4.74	- 4.82
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,61	4.84	34.07
5	Pendapatan Per Kapita	28.053,33	30.82	9.88
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,31	0.30	- 3.23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PENDIDIKAN	1. Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	Sudah cukup jelas	513 Lembaga	
		2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Sda.	765 Anak	
		3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	30.028 Anak	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Sda.	2.002 Orang	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD	Sda.	2.742 Orang	
		6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sda.	2.413 Orang	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau	Sda.	787 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang			
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	Sda.	626 Lembaga	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Sda.	0 Siswa	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda.	0 Siswa	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	94.869 Siswa	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	51.648 Siswa	
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda.	3.388 Orang	
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	1.614 Orang	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda.	7.614 Orang	
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	3.543 Orang	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sda.	696 Orang	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	168 Orang	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sda.	689 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	204 Orang	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda.	6.622 Orang	
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda.	3.557 Orang	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	696 Orang	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	204 Orang	
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sda.	575 Orang	
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sda.	559 Orang	
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Sda.	8 Lembaga	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda.	315 Siswa	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	514 Siswa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda.	45 Orang	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda.	74 Orang	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sda.	72 Orang	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	696 Orang	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sda.	11 Orang	
2	KESEHATAN	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	5 Rumah Sakit	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sda	5 Rumah Sakit	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan.	Dukungan logistik seperti: - Vaksin Tetasus Difetri (Td) - Tablet Tambah Darah - Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin - Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu - Buku KIA, dll	643.370	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sudah cukup jelas	1.994 Orang	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Dukungan logistik seperti: - Formulir Photograf - Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu - Buku KIA, dll	29.655	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sudah cukup jelas	1.994 Orang	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Dukungan logistik seperti: - Vaksin Hepatitis BO - Vitamin K1 Injeksi - Salep/Tetes Mata Antibiotik - Formulir Bayi Baru Lahir - Formulir MTBM - Buku KIA , dll	60.542	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar bagi bayi baru lahir	Sudah cukup jelas	1.992 Orang	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku - Formulir DDTK - Vitamin A Biru , Vitamin A Merah - Vaksin Imunisasi Dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib, Campak Rubell - Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT-HB-Hib, Campak Rubella Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA, dll	383.207	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sudah cukup jelas	5.995 Orang	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Buku Raport Kesehatanku - Buku Pemantauan Kesehatan - Kuesioner Skrining Kesehatan - Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah - Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, dll	14.734	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sudah cukup jelas	4.470 Orang	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan	Dukungan logistik seperti :	846.525	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang tersedia bagi orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	- Pedoman dan Media KIE: Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), dll		
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan bagi orang usia 15-59 tahun sesuai standar	Sudah cukup jelas	2.839 Orang	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Strip Uji Pemeriksaan: Gula Darah, Kolesterol - Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) - Buku Kesehatan Lansia, dll	232.385	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan bagi orang usia 60 tahun sesuai standar	Sudah cukup jelas	2.419 Orang	
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE - Tensimeter - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM, dll	454	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	Sudah cukup jelas	2.010 Orang	
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Glukometer: Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM - Pedoman dan Media KIE, dll	846.631	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita DM sesuai standar	Sudah cukup jelas	2.058 Orang	
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan	Dukungan logistik seperti:	29	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang tersedia bagi ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	- Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) - Kit Berisi 2 Alat Fiksasi - Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan Media KIE, dll		
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	Sudah cukup jelas	40 Orang	
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dukungan logistik seperti: - Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) - Reagen Zn TB - Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 - Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering - Catridge Tes Cepat Molekuler - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Pedoman/Standar Operasional Prosedur, dll	135.205	
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Sudah cukup jelas	399 Orang	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dukungan logistik seperti: - Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner - Tes Cepat HIV (RDT) Pertama - Bahan Medis Habis Pakai: Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai, Alat tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK - Lainnya...	301.707	
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk	Sudah cukup jelas	419 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sudah cukup jelas	122.435 ha	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	Sda	95 m	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sda	0 ha	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sda	10.796,8 ha	
		5. Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten	Ada/tidak	Ada	
		6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	Ada/tidak	Ada	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	Jumlah	15 Sarana Prasarana	
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Nihil	
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	$\frac{10.398 \text{ ha}}{14.951 \text{ ha}} \times 100\%$ = 69,5472 %	
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada /Tidak)	Ada/tidak	Ada	
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Tidak	
		13. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada/tidak	1 BUMD/UPTD	
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	0 Izin	
		15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Sda	0 Kerjasama	
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sda	18264 Rumah	
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sda	0 Rumah	
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sda	329711 Rumah	
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	Nihil	
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Sda	Nihil	
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{347.975}{348.488} \times 100\%$ = 99,8528 %	
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	Nihil	
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}} \times 100\%$	Nihil	
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{329,711}{348.488} \times 100\%$ = 94.6119 %	
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	Nihil	
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	$\frac{10}{26} \times 100\%$ = 38.4615 %	
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	38 IMB	
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Ada Perda Nomor 3 Tahun 2017	
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Ada KEPUTUSAN BUPATI NOMER 188/42/K411.013/2022	
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	0 Bangunan	
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sda	0 Bangunan	
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	Sda	211 Bangunan	
		37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	Sda	98 Bangunan	
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten	Sudah cukup jelas	1.153,482 km	
		39. Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	25.208 m	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		40. Panjang jembatan yang dibangun	Sda	0 m	
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sda	21.278 m	
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sda	152,1 m	
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi / direhabilitasi	Sda	56.139 km	
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sda	91,2 m	
		45. Panjang jalan yang dipelihara	Sda	1.016,419 km	
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	Sda	7,5 m	
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten	Sda	1 Pelatihan (122 Peserta)	
		48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten	Sda	120 orang	
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten	Sda	120 orang	
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Ada SIPJAKI	
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	Sda	Ada SIPJAKI	
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Sda	Ada SIPJAKI	
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sda	Tidak Ada	
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa	Sda	Ada SIPJAKI	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten	Sda	Ada	
		56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yangdiregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Sda	Ada 1 Kegiatan	
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Sda	Ada	
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kabupaten	Sda	Ada	
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Sda	Ada	
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sda	Tidak	
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sda	Nihil	
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	498 Pengawasan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	PERUMAHAN RAKYAT	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup jelas	31 Rumah	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sda	86 Rumah	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sda	86 Orang	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sda	86 Rumah	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sda	Nihil	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sda	Nihil	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sda	45 Unit	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sda	86	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sda	Nihil	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	258 Rumah Tangga	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	Nihil	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	13 Rumah Tangga	
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah	Sda	258 Rumah Tangga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	Nihil	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Sda	23,724 Ha	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sda	131,2 Ha	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sda	282.180 Unit	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Sda	63,81 Ha	
		19. Jumlah rumah di Kabupaten	Sda	327.281 Unit	
		20. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sda	282.180 Unit	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	Sda	45.101 Unit	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sda	Nihil	
		23. Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$	$\frac{283,654}{327,281}$ = 86.6699 %	
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Sda	1.988 Unit	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	10 Perumahan (430 Unit)	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sda	10 Perumahan (430 Unit)	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sda	10 Perumahan (430 Unit)	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	Sda	10 Perumahan (430 Unit)	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sda	Nihil	
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sda	10 Perumahan (430 Unit)	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sda	10	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sda	10	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sda	10	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	Sudah cukup jelas	49	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sda	800	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sda	2	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sda	2 Orang	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak	Ada (11 SOP)	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Sda	Ada	
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	$\frac{409.287}{409.287} \times 100\% = 100\ \%$	
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	
		10. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{980}{980} \times 100\% = 100\ \%$	
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{980}{980} \times 100\% = 100\ \%$	
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{1.134.617}{1.134.617} \times 100\% = 100\ \%$	
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Sudah cukup jelas	123 Layanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		(operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten			
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak	Ada	
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/tidak	Ada	
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	Nihil	
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	44 Sarpras	
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	4 orang	
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	0 / Nihil	
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	86 Kegiatan	
6	SOSIAL	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	6 Layanan	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan	Sda	215 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		OTM			
		3. Jumlah TimReaksi Cepat yang dibentuk	Sda	1 Tim	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sda	215 Orang	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sda	4 Unit	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sda	209 Orang	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sda	1 Rumah Singgah	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sda	115 Orang	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sda	84 Orang	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sda	1 (Kursi Roda)	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sda	7 Paket	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sda	115 Orang	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sda	1 Nakes	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial	Sda	993 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang disediakan			
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sda	215 Orang	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sda	115 Kegiatan	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sda	8 Orang	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sda	6 Orang	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Sda	115 Orang	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sda	18 Orang	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sda	9 Orang	
		22. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sudah cukup jelas	150 Orang	
		23. Jumlah korban bencana yang	Sda	15 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		menerima paket sandang			
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sda	7 Penampungan	
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sda	96 Paket	
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/tidak	Ada 69 Orang	
		27. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Sda	993 Orang	
7	TENAGA KERJA	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak	
		2. Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{Realisasi indikator - target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	$\frac{566.095 - 540.126}{566.095} \times 100\%$ = 4.5874%	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	16 Perusahaan	
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{2} \times 100\%$ = 0%	
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{64}{64} \times 100\% = 100\ \%$	
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{43}{858} \times 100\% = 5.0117\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{3}{64} \times 100\% = 4.6875\ \%$	
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{64}{64} \times 100\% = 100\ \%$	
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas	858 Orang	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{858}{858} \times 100\% = 100\ \%$	
		11. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{751}{858} \times 100\% = 87.5291\ \%$	
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{418}{858} \times 100\% = 48.7179\%$	
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah CPMI dilatih}}{\text{Jumlah CPMI terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{0}{520} \times 100\% = 0\ \%$	
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas	Nihil	
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{4}{180} \times 100\% = 2.2222\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		16. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)	73,92%	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	$\frac{18}{85} \times 100\% = 21.1765\ \%$	
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	$\frac{7}{13} \times 100\% = 53.8462\ \%$	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas	16 SP/SB	
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\ \%$	
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	$\frac{149}{180} \times 100\% = 82.7778\ \%$	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{3}{180} \times 100\% = 1.6667\ \%$	
		23. Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas	2 mogok kerja	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Sda	2 Perusahaan	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sda	Nihil	
		27. Jumlah perselisihan PHK	Sda	4 Perselisihan	
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sda	106 Orang	
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sda	1 Perselisihan	
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	Ada/tidak	Ada	
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}}$ x 100%	$\frac{1}{4}$ x 100% = 25 %	
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten	Sudah cukup jelas	2.599 Lowongan kerja	
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten	Sda	3.051 Orang	
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten	Sda	48 BKK	
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten	Sda	33 Orang	
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sda	1 Orang	
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten	Sda	Nihil	
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	Sda	3603 Perjanjian	
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sda	2509 Tenaga Kerja	
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\text{Jumlah CPMI/CTKI}}$ x 100%	$\frac{520}{520}$ x 100% = 100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	520 Orang	
		42. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi PMI/TKI yang dipulangkan}}{\text{Jumlah PMI/TKI yang pulang}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\ \%$	
		43. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\text{Jumlah PMI/TKI}} \times 100\%$	$\frac{0}{520} \times 100\% = 0\ \%$	
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	Nihil	
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	$\frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	Nihil	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	30 Lembaga	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten	Sda	50/73 Program/Kegiatan	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sda	2 Media Massa	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sda	10 Lembaga	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	21 Lembaga	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten)	Sudah cukup jelas	22 Lembaga	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	32 Organisasi	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten yang sudah dilatih	Sda	33 Orang	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sda	33 Lembaga	
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten	Sda	305 Lembaga	
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sda	1 Kebijakan	
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	Sda	2 lembaga	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{46}{46} \times 100\% = 100\%$	
9	PANGAN	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tidak	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
10.	PERTANAHAN	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$	
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Dokumen izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Nihil	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap: a.Indeks Kualitas Air (IKA) b.Indeks Kualitas Udara (IKU) c.Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai relatif = $\frac{Ci}{Lij}$ $:IP=\frac{\sqrt{(\frac{Ci}{Lij})^2 \text{ rata-rata}+(\frac{Ci}{Lij})^2 \text{ maksimum}}}{2}$ Rumus Metode IP : 0≤PIj ≤1,0 →baik(memenuhi baku mutu) 1,0 < *PIj* ≤5,0 →cemar ringan 5,0 < *PIj* ≤5,0 →cemar sedang Pij > 10.0 →cemar berat **IKTL = 100 – ((84,3 – (TH x 100)) x 50/54,3)** IKU 100 – [50/0.9 x (leu – 0,1)] Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	67,37	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}}$ x 100%	$\frac{3}{5}$ x 100% = 60%	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten}}$ x 100%	Dalam proses	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}}$ x 100% Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	$\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}}$ x 100%	$\frac{0}{1}$ x 100% = 0%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$	Dalam proses	
		8. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{9}{9} \times 100\%$ = 100%	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{14}{17} \times 100\%$ = 82.3529 %	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{5} \times 100\%$ = 60 %	
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{2.002}{2.113} \times 100\%$ = 94.7468 %	
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun}}{\text{2 tahun}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100%	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	230 desa	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	0 desa	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	273 Lembaga LKD = 234 LAD = 39	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	39 Desa	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Ada	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	$\frac{203.120}{24}$ = 8463,33	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFRi = $\frac{b_i}{P_i} \times k$ ASFI adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	$\frac{12.643}{268.231} \times 1.000$ = 47,13%	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	$\frac{521.162}{449.129} \times 100\%$ = 116,0384%	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Nihil	
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	$\frac{38}{38} \times 100\%$ = 100%	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	$\frac{141.410}{180.898} \times 100\%$ = 78.1711%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	49 Kelompok Kerja KKBPK	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	$\frac{14.050}{12.643} \times 100\%$ = 111.1287%	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	$\frac{10}{20} \times 100\%$ = 50%	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	Nihil	
15	PERHUBUNGAN	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang Angkutan Jalan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}}$ x 100%	$\frac{13,698}{15,882}$ x 100% = 86.25 %	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}}$ x 100%	Nihil	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{55}{126}$ x 100% = 43.65 %	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$ x 100%	$\frac{51}{52}$ x 100% = 98.08 %	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daearah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo}}{\text{Jumlah perangkat desa}}$ x 100% Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	$\frac{51}{52}$ x 100% = 98.08 %	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pad Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	$\frac{86}{87} \times 100\%$ = 98.85%	
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\%$ = 100%	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\%$ = 100%	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{18}{18} \times 100\%$ = 100%	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{95}{110} \times 100\%$ = 86.36%	
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	$\frac{109}{110} \times 100\%$ = 99.09%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	$\frac{74}{110} \times 100\% = 67.27\%$	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	$\frac{206}{206} \times 100\% = 100\%$	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 1$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 10$	$\frac{18}{19} \times 100\% = 94.74\%$	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak Ada) 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			- Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	$\frac{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{Mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten}}$ x 10 Komunitas masyarakat/ mitra strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	$\frac{20}{103}$ x 100% = 19.42%	
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kotasesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan Kabupaten dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi}}$ x 100	$\frac{2.359}{2.359}$ x 100% = 100 %	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik}}$ x 100%	$\frac{6.604}{6.604}$ x 100% = 100 %	
17	KOPERASI UKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penebitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}}$ x 100%	$\frac{5}{854}$ x 100% = 0.59 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{jumlah permohonan izin pembukaan Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100$	Nihil	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{129}{904} \times 100\%$ = 14.27 %	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	$\frac{100}{904} \times 100\%$ = 11.06 %	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{230}{904} \times 100\%$ = 25.44 %	
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan koperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{2.000}{235.393} \times 100\%$ = 0.85 %	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{252}{904} \times 100\%$ = 27.88%	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	Nihil	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{289}{904} \times 100\%$ = 31.97 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{140}{904} \times 100\% = 15.49\%$	
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{1}{904} \times 100\% = 0.11\%$	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{230}{904} \times 100\% = 25.44\ \%$	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{6}{904} \times 100\% = 0.66\ \%$	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	$\frac{6.900}{7.389} \times 100\% = 93.38\ \%$	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem *online data system* (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	Nihil	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usah mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{85}{35.511} \times 100\% = 0.24\%$	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitassi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha yang belum mendapakan dukungan pemasaran}}$ x 100%	$\frac{257}{6.643}$ x 100% = 3.87 %	
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}}$ x 100%	$\frac{550}{6,900}$ x 100% = 7.97 %	
		20. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}}$ x 100%	$\frac{100}{6.900}$ x 100% = 1.45 %	
18	PENANAMAN MODAL	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Nihil	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Nihil	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Nihil	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	1 Kegiatan	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Nihil	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	15 Konsultasi	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	8.161 Penerbitan	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Rp 4.529.076.183.502	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	3 Orang	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Dalam proses	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Kabupaten	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	9 Permintaan	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	285 Orang	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	1 Orang	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	70 Orang	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	18 Orang	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan. Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	109 Orang	
		6. Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	6 Event	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	STATISTIK	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	52 Survey	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	186 Kompilasi	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Nihil	
		5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 Kompilasi	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{79}{186} \times 100\% = 42.47\%$	
21	PERSANDIAN	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain. Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis. Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMK1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e procurement, e persuratan, simda dll Aplikasi keamanan lektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	$\frac{95}{110} \times 100\%$ = 86.36%	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko katergori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah di audit dengan reriko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33.33%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			mendeteksi ada tidaknya kerawanan		
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}}$ x 100% Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	$\frac{1}{1}$ x 100% = 100%	
22	KEBUDAYAAN	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	771 Obyek	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	782 Obyek	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	21 Obyek	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	56 Orang	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran,	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	1 Cagar Budaya	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengjasian penetapan, pencatatan, pemeringkatan,penghapusan)			
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	19 Cagar Budaya	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Nihil	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	226 Cagar Budaya	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	19 Cagar Budaya	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	305 Koleksi	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	13.896 Pengunjung	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Kabupaten	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	159 Orang	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Nihil	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Nihil	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Nihil	
		16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	27 SDM	
		17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan pemuseuman Kabupaten	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	5 SDM	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB +Museum)	19 Unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7 Kegiatan	
23	PERPUSTAKAAN	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	Dalam proses	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 1($	Dalam proses	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	Dalam proses	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$ Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	$\frac{533}{1151} \times 100\%$ = 46.31%	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	62,41%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	Dalam proses	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayah (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item). Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	22	
24	KEARSIPAN	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}}$ x 100% Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal intansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit	Dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}}$ x 100% Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier. Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan	Dalam proses	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}}$ x 100% Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	$\frac{3}{3}$ x 100% = 100%	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kabupaten}}$ x 100% Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	$\frac{12}{12}$ x 100% = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	1083 Arsip	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Nihil	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan / pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Nihil	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	974	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Nihil	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	52	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	537 Rumah Tangga	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang diterbitkan	79 Izin	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	1.150 Pembudidaya	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	20.741.303 Ekor	
26	PARIWISATA	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi. Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	13 Kawasan	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata - Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian - Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	89 Sarpras	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :	19 TDUP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			- Daya Tarik usaha - Kawasan pariwisata - Jasa transportasi wisata - Jasa perjalanan wisata - Jasa makanan dan minuman - Penyediaan akomodasi - Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran - Jasa informasi pariwisata - Jasa konsultan pariwisata - Jasa pramuwisata - Wisata tirta - Spa		
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Nihil	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri, bisa sebagai peserta atau penyelenggara	11 Kegiatan	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	Nihil	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	1 Industri	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga	$\frac{7}{751} \times 100\%$ = 0.93%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah: - Sub sektor biro perjalanan wisata - Sub sektor hotel dan restoran - Sub sektor spa - Sub sektor restoran, bar dan jasa boga Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader): - Bidang kepemanduan wisata selam - Bidang kepemanduan wisata - Bidang kepemanduan ekowisata - Bidang arung jeram - Bidang kepemanduan wisata agro - Bidang jasa boga - Bidang kepemanduan wisata goa - Bidang manajerial spa - Bidang MICE		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\%$ = 100%	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	33 Lokasi	
27	PERTANIAN	1. Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan - Pengadaan sarana produksi pupuk urea (non subsidi) dan pupuk NPK (non subsidi) kegiatan bantuan sosial penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 bidang pertanian TA 2020, Nomor: 600/405/411.316/PPK/2020 Tanggal 13	74 Unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Agustus 2020 a. Prasarana pertanian bidang perkebunan sebanyak 23 unit b. Prasarana pertanian bidang tanaman pangan sebanyak 197 unit c. Alat pengolahan saribuah dan keripik buah (APBD Provinsi Jawa Timur), 1 kelompok tani (satu paket) d. Pengolahan dan pemasaran hasil holtikultura (APBN) 2 kelompok tani/gapoktan sebanyak 189 unit (1 paket)		
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	36 Unit	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	1 Dokumen	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	$\frac{1583,6}{1584} \times 100\% = 99.97\ \%$	
28	KEHUTANAN	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Urusan kehutanan tidak diampu oleh Kab. Nganjuk, melainkan kewenangan Provinsi	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi		
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun		
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
	MINERAL			Kab.Nganjuk tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral karena tidak memiliki kawasan panas bumi	
30	PERDAGANGAN	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan/atau benar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan/atau benar}} \times 100\%$	a. Pusat perbelanjaan = Nihil b. Toko swalayan $\frac{224}{224} \times 100\%$ = 100%	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$ = 100%	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{37}{37} \times 100\%$ = 100%	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri: $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri: $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri: $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	Dalam proses	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	97%	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	5,96 %	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	0,0008%	
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Dalam proses	
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	Dalam proses	
31	PERINDUSTRIAN	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dalam proses	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK	100	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		menjadi PERDA	Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		
		3. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}}$ x 100%	Dalam proses	
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}}$ x 100%	Dalam proses	
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di Kabupaten yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten}}$ x 100%	Dalam proses	
32	TRANSMIGRASI	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Nihil	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			dengan daya tampung 300-500 keluarga		
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Sudah cukup jelas	Nihil	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	PENDIDIKAN	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{30,028}{30,265} \times 100\% = 99.2169\%$	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{90,821}{101,625} \times 100\% = 89.3688\%$	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{46,830}{51,990} \times 100\% = 90.0750\ \%$	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{323}{323} \times 100\% = 100\%$	
2.	KESEHATAN	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{905}{1,062,357} \times 100\% = 0.0852\ \%$	
		2. Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{11,828}{15,519} \times 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 76.2163 %	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12,557}{14,813} \times 100\%$ = 84.7701 %	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12,271}{14,108} \times 100\%$ = 86.9790 %	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{46,619}{57,985} \times 100\%$ = 80.3984 %	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{99,500}{128,661} \times 100\%$ = 77.3350 %	
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{373,342}{661,392} \times 100\%$ = 56.4479 %	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{101,599}{185,454} \times 100\%$ = 54.7839 %	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{90,038}{381,080} \times 100\%$ = 23.6271 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di Kabupaten x 100%	22,247 / 22,018 x 100% = 101.0401 %	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten x 100%	2,674 / 2,018 x 100% = 132.5074 %	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di Kabupaten x 100%	4,501 / 14,180 x 100% = 31.7419 %	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten x 100	21,055 / 16,694 x 100% = 126.1232 %	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) x 100%	54,030 / 68,405 x 100% = 78.9855 %	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m) x 100	98,604 / 99,600 x 100% = 99 %	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun existing / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100%	10,398 / 14,951 x 100% = 69.5472%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindugi dalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{332,868}{348,488} \times 100\%$ = 95.5178%	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{348,975}{348,488} \times 100\%$ = 100.1397%	
		6. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{38}{150} \times 100\%$ = 25.3333%	
		7. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1,016.419}{1,153.482} \times 100\%$ = 88.1175%	
		8. Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{120}{201} \times 100\%$ = 59.7015%	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100$	$\frac{498}{498} \times 100\%$ = 100%	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$	$\frac{131}{131} \times 100\%$ = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	$\frac{63.81}{131,2} \times 100\% = 48.6357\%$	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{45,101}{327,281} \times 100\% = 13.7805\%$	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{1,134,617}{1.134.617} \times 100\% = 100\ \%$	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{263,655}{409,287} \times 100\% = 64.4181\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}}$ x 100	$\frac{19}{19}$ x 100% = 100%	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}}$ x 10	Masih dalam proses	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	Masih dalam proses	
6.	SOSIAL	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}}$ x 100%	$\frac{215}{215}$ x 100% = 100%	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{150}{150}$ x 100% = 100%	
7.	TENAGA KERJA	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}}$ x 100	$\frac{3}{5}$ x 100% = 60 %	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}}$ x 100%	$\frac{266}{17{,}727}$ x 100% = 1.5005 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja	$\frac{19.543.180.000.000\ KetA}{539.243\ KetB}$ x 100% =36.241.879.8204KetD	
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100%	$\frac{30}{180}$ x 100% = 16.6667 %	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	$\frac{2,509}{3,051}$ x 100% = 82.2353 %	
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD / Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD x 100%	$\frac{650,588,483,225}{2,988,815,068,883}$ x 100% = 21.7674 %	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi / Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100%	$\frac{30}{30}$ x 100% = 100%	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000	$\frac{46}{555.356}$ x 100.000 = 8,282.9752	
9.	PANGAN	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan x 100%	Masih dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
10.	PERTANAHAN	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$	$\frac{221.089}{221.089} \times 100\% = 100\%$	
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{10.495,35}{58.834,35} \times 100\% = 17,8388\ \%$	
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{221,089}{221,089} \times 100\% = 100\%$	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Nihil	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	Nihil	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (ITH x 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	(61,61 x 0,376) + (79,45 x 0,405) + (54,91 x 0,219) = 67,37%	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total volume timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{72,34}{144,16} \times 100\% = 50,1804\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	Masih dalam proses	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$	$\frac{256,117}{258,029} \times 100\% = 99.2590\%$	
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{67,740}{250,147} \times 100\% = 27.0801\%$	
		3. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{288,991}{327,987} \times 100\% = 88.1105\%$	
		4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{6}{7} \times 100\% = 85.7143\%$	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	Sudah tidak ada desa tertinggal	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100$	$\frac{97}{112} \times 100\% = 86.6071\%$	
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^{7} \text{ASFR i}$	$\frac{5 \times 345,41}{1000} = 1,73\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
	BERENCANA		$ASFR\ i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$ TFR : Angka Kelahiran Total ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i : Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 k : Bilangan Konstanta biasanya 1000		
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{141{,}410}{180{,}898} \times 100\%$ = 78.1711%	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	$\frac{18{,}174}{180{,}898} \times 100\%$ = 10.0465 %	
15.	PERHUBUNGAN	1. Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten tersebut) • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek	20	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten	0,55	
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{51}{52} \times 100\%$ = 98.0769%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	$\frac{86}{87} \times 100\% = 98.8506\%$	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{868.255}{1.117.033} \times 100\% = 77.7287\%$	
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{252}{904} \times 100\% = 27.8761\%$	
		2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{6.900}{35,511} \times 100\% = 19.4306\ \%$	
18.	PENANAMAN MODAL	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{4,529,076,183,502 - 3,305,345,722,393}{3,305,345,722,393} \times 100\% = 37.0228\%$	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{285}{249,438} \times 100\% = 0.1143\%$	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{25,174}{1,353,886} \times 100\% = 1.8594\%$	
		3. Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
20.	STATISTIK	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	
21.	PERSANDIAN	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{446}{645} \times 100\% = 69.1473\%$	
22.	KEBUDAYAAN	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	$\frac{94}{305} \times 100\% = 30.8197\%$	
23.	PERPUSTAKAAN	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	62.41%	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	Masih dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			$\Sigma \frac{\text{UPLM}}{\text{ALM}}$ x 100		
24.	KEARSIPAN	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{76.19 + 43.24 + 100 + 23.29}{4}$ = 60.68%	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	328.75	
25.	KELAUTAN & PERIKANAN	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Masih dalam proses	
26.	PARIWISATA	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}$ x 100%	Nihil	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}$ x 100%	$\frac{204,873-193,092}{193.092}$ x 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kabupaten		= 6.1012%	
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{21,481}{212,430} \times 100\%$ = 10.1120%	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$	$\frac{1,149,740,000,000}{30,819,790,000,000} \times 100\%$ = 3.7305%	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realiasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$	$\frac{1,525,678,285}{2,439,417,297,144} \times 100\%$ = 0.0625%	
27.	PERTANIAN	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)}}{\text{Luas panen (ha)}} \times 100\%$	$\frac{51.523.076}{82.047} \times 100\%$ = 62.7970%	
		2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	$\frac{6.953-3.756}{3.756} \times 100\%$ = 85.1171%	
28.	KEHUTANAN				
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	Nihil (Kab.Nganjuk tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral karena tidak memiliki kawasan panas bumi)	
30.	PERDAGANGAN	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100$	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}}$ x 100%	$\frac{85.573}{88.813}$ x 100% = 96.3519 %	
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten}}$ x 100%	Masih dalam proses	
31.	PERINDUSTRIAN	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1}}$ x 100%	Masih dalam proses	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK}}{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP}}$ x 100% Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	Masih dalam proses	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	Masih dalam proses	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	Masih dalam proses	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	Masih dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	Masih dalam proses	
32.	TRANSMIGRASI				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{741.069.183.303}{2.680.672.765.303} \times 100\% = 27.64\%$	
		2. Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{445.899.355.000,99}{2.501.196.777.618,99} \times 100\% = 17.83\ \%$	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$2.219.959.177.369 - 519.888.884.744 = 1.700.070.292.625$ $\frac{1.700.070.292.625}{2.680.672.765.303} \times 100\% = 63.42\%$	
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	
2.	PENGADAAN	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	Nihil	
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{277}{1.578} \times 100\% = 17.55\%$	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	$\frac{1.117.087.729.099}{2.145.348.606.701} \times 100\% = 52.07\%$	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$	$297.746.754.749 - 233.703.119.405 = 64.043.635.344$ $\frac{64.043.635.344}{233,703,119,405} \times 100\%$ = 27.40%	
3.	KEPEGAWAIAN	1. Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	$\frac{962}{1.963} \times 100\%$ = 49.01%	
		2. Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{604}{1.963} \times 100\%$ =30.77%	
		3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{135}{604} \times 100\%$ = 22.35%	
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right)-1\right) \times 100\%$	$\left(\left(\frac{2.665.222.765.303}{2.430.988.418.474}\right)-1\right) \times 100\%$ = 9.64%	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}}\right)-1\right) \times 100\%$	$\left(\left(\frac{445.589.935.500,99}{340.901.135.287,00}\right)-1\right) \times 100\%$ = 30.71%	
		3. Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	(Ya) 100%	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{551.538.103.297}{2.383.277.058.326} \times 100\%$ =23.14%	
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	$\frac{55}{55} \times 100\%$ = 100%	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Pada birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakansebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, di mana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5
Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	a. Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada ^)	%	100	Satpol PP
	b. Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat ^)	%	100	Satpol PP
	c. Persentase Antisipasi Penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama ^)	%	85	Bakesbangpol

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	BPKAD
	b. Rasio kemandirian keuangan daerah	%	18	Bapenda
	c. Maturitas SPIP	Nilai	3	Inspektorat
	d. Predikat SAKIP	Nilai	73	Sekretariat Daerah
	e. Predikat EKPPD ^)	Predikat	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
	f. Indeks SPBE	Skor	Baik (2,6 ≤ 3,5)	Dinas Komunikasi dan Infomartika
	g. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan ^)	%	66	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.	Skor	81,50	Sekretariat Daerah
	i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	%	100	BAPPEDA
	j. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ^)	%	100	BAPPEDA
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Indeks Profesionalitas ASN ^)	%	72,5	BKPSDM
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	%	11,80	Dinas Sosial PPPA
5. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan dan prestasi pemuda	a. Indeks Pendidikan	Skor	0,625	Dinas Pendidikan
	b. Pemuda yang berprestasi ^)	Orang	40	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	c. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ^)	%	10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	a. Indeks Kesehatan	Skor	0,794	Dinas Kesehatan
	b. Laju Pertumbuhan	%	0,38	Dinas PPKB
7. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	Skor	93,46	Dinas Sosial PPPA
	b. Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	71	Dinas Sosial PPPA
8. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,72	Dinas Pertanian

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
kesejahteraan petani	b. Nilai Tukar Petani	Nilai	107	Dinas Pertanian
9. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri	%	10,64	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	%	9,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,80	Dinas Tenaga Kerja
11. Meningkatnya Iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	Rp (milyar)	3.318,20	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	Indeks desa Membangun	Skor	0,7494	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	30,49	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	32,43	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	%	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Skor	72,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	92,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	%	92,02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	%	96,9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan/kota	%	64,40	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	g. Persentase Pemenuhan	%	91,10	Dinas Perumahan

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	drainase lingkungan			Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	h. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	%	92,96	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	i. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	12	Dinas Perhubungan
16. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW	%	81,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ^)	Skor	64,91	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	%	26	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	%	59	Dinas Lingkungan Hidup
18. Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulan gan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB) ^)	Indeks	82,76	BPBD

Keterangan : Indikator Kinerja Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.6
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten NganjukTahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	a. Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada	100	100	100
		b. Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	100	95,75	95,75
		c. Persentase Antisipasi Penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama	85	91	107

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
		b. Rasio kemandirian keuangan daerah	18	18,05	100,28%
		c. Maturitas SPIP	3	3	100%
		d. Predikat SAKIP	73 (BB)	66,59	91,20
		e. Predikat EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		f. Indeks SPBE	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2,18	83,85%
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan	66	66	100%
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.	81,50	84,33	103,47%
		i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	100	100%	100%
		j. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	80%	80%
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	72,5	68,2	94,07%
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	11,80	10,70	110,28%
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	a. Indeks Pendidikan	0,625	0.63	100,80%
		b. Pemuda yang berprestasi	40	45	112.5%
		c. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	10	16,72%	167,21%
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	a. Indeks Kesehatan	0,794	0,80	100,75%
		b. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,38	0,66	57,57%
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	93,46	93,76	100,32%
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	71	69,78	98,28%
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3,72	5,56	149,48%
		b. Nilai Tukar Petani (NTP)	107	106,83	99,84%
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri	10,64	11,69%	109,90%
		b. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	9,96	5,27%	52,90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,80	4.74	101,26%
11	Meningkatnya Iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	3.318,20	4.529,076	136,49%
12	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	Indeks desa Membangun	0,7494	0,7421	99%
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3	5,75	191,67%
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	30,49	30,82%	101,08%
		b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	32,43	35,14%	108,36%
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	92	88,11	95,78%
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	72,61	69,55	95,76%
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	92,35	89,71	97,14%
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	92,02	86,73	94,25%
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	96,9	96,41	99,49%
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan/kota	64,40	99,98	155,25%
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	91,10	87,78	96,36%
		h. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	92,96	86,22	92,74%
		i. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	12	20,19%	168,25%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW	81,23	81,94	100,87%
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,91	67,37	103,78%
		b. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	73	66,64	91,29%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		sampah rumah tangga			
		c. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	26	27,29	104,95%
		d. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	59	52,46	88,91%
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulan gan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	82,76	99,67	83,03%

Keterangan : * Data Tahun 2022

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib,dan religius	a.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	80	100	111,11%	-	-	
		b	Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada ^)	-	-	-	100	100	100
			Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat ^)	-	-	-	100	95,75	95,75
		c	Persentase Antisipasi Penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama ^)	-	-	-	85	91	107
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a.	Opini BPK terhadap LKPPD	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		b.	Rasio kemandirian keuangan daerah	14,80	19,88	134,32%	18	18,05	100,28%
		c.	Maturitas SPIP	2	2	100%	3	3	100%
		d.	Predikat SAKIP	75 (BB)	65,54 (B)	87,4%	73 (BB)	66,59	91,20
		e.	Nilai EKPPD	-	-	-			
			Predikat EKPPD ^)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		f.	Indeks SPBE	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2,14 (cukup)	82,30 %	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2,18	83,85%
		g.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	76	68	89,47%	-		
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan ^)				66	66	100%
		h.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	80	81,75	102 %	81,50	84,33	103,47%
		i.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	100	83,33%	83,33%	100	100%	100%

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
		j.	Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief)	80	91 %	113 %	-		
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ^)	-	-	-	100	80%	80%
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a.	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	47	35,74	76,05 %	-		
			Indeks Profesionalitas ASN ^)				72,5	68,2	94,07%
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.	Tingkat Kemiskinan	10,36	11,85	87,42 %	11,80	10,70	110,28%
		b.	Persentase penurunan PMKS ^)	0,4	3,18 %	795 %	-	-	-
			Menjadi indikator Perangkat Daerah				-	-	-
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	a.	Indeks Pendidikan	0,60	0,62	103 %	0,625	0,63	100,80%
		b.	Indeks Pembangunan Pemuda	0,57	0,48*	106,67*	-		
			Jumlah Pemuda yang berprestasi ^)				40	45	112.5%
		c	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ^)				10	16,72%	167,21%
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	a.	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	100%	0,794	0,80	100,75%
		b.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,32	0,23*	134,78*	0,38	0,66	57,57%
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a.	Indeks Pembangunan Gender	94,38	93,26*	99 %*	93,46	93,76	100,32%
		b.	Indeks Pemberdayaan Gender	67,16	69,90*	104,08%*	71	69,78	98,28%
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3,80	2,35*	61,84 %*	3,72	5,56	149,48%
		b.	Nilai Tukar Petani	104,1	100.34	96,39 %	107	106,83	99,84%
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri	4,50	10,70*	237,77 %*	10,64	11,69%	109,90%
		b.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan	20,45	8,26*	40,39 %*	9,96	5,27%	52,90%

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,10	4,98%	42,16 %	4,80	4.74	101,26%
11	Meningkatnya iklim investasi	a.	Nilai Investasi Daerah (milyard)	2.284,7	3.305,34	144,67 %	3.318,20	4.529,076	136,49%
12	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	a	Indeks Desa Membangun	0,6292	0,73197	116,33 %	0,7494	0,7421	99%
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	5	4,33	86,6 %	3	5,75	191,67%
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	29	29,18	100,62%	30,49	30,82%	101,08%
		b.	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	28	29,73	106,18%	32,43	35,14%	108,36%
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	66,00	87,07	131,92%	92	88,11	95,78%
		b.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	72,11	76,82	106,53%	72,61	69,55	95,76%
		c.	Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,70	89,10	116,17%	92,35	89,71	97,14%
		d.	Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	35,39	86,46	244,30%	92,02	86,73	94,25%
		e.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	83,36	90,98	109,14%	96,9	96,41	99,49%
		f.	Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/ kawasan/kota	64,03	38,14	59,57%	64,40	99,98	155,25%
		g.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	89,69	79,84	89,02%	91,10	87,78	96,36%
		h.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan (masuk indikator persentase jalan kabupaten	79,45	76,24	95,96%	-		

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			kondisi mantap fungsional)						
		i.	Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	92,46	86,62	93,68%	92,96	86,22	92,74%
		j.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	15	32,71	218,07%	12	20,19%	168,25%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	a.	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	80,63	81.44%	101 %	81,23	81,94	100,87%
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya	a.	Indeks Kualitas Air	69	54	78,26%	-		
		b.	Indeks Kualitas Udara	83,9	78,84	93,97%	-		
		c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,51	54,99	72,82%	-		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ^)				64,91	67,37	103,78%
		d.	Persentase cakupan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74	71,28	96,32%	73	66,64	91,29%
		e.	Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga melalui 3R	24	22,51	93.79%	26	27,29	104,95%
		f.	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	54,24	52,46	96,72%	59	52,46	88,91%
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	a.	Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	100	84,21	84,21%	-		
			Indeks Resiko Bencana (IRB)				82,76	99,67	83,03%

Keterangan : ^) Indikator Kinerja Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023

** (Data Sementara)

*** (Data Amat Sementara)

d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 2.8
Tabel Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram,tertib, dan religius	Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada ^)	100	100	100%
		Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat ^)	100	95,75	95,75%
		Persentase Antisipasi Penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama ^)	90	91	101,11%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yangbaik	a. Opini BPK terhadap LKPPD	WTP	WTP	100%
		b. Rasio kemandirian keuangan	18,50	18,05	97,56%
		c. Maturitas SPIP	3	3	100%
		d. Predikat SAKIP	A (80,01)	66,59	83,22%
		e. Nilai EKPPD	-		
		Predikat EKPPD ^)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		f. Indeks SPBE	Sangat Baik (3,5 ≤ 4,2)	2,18	62,28%
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-		
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan ^)	67	66	98,50%
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	81,80	84,33	103,09%
		i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%
		j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief)	-	-	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ^)	100	80%	80%
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	71%		
		Indeks Profesionalitas ASN ^)	73	68,2	93,42%
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	11,75	10,70	109,81%
		b. Persentase penurunan	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
		PMKS			
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	0,633	0,63	99,52%
		Jumlah Pemuda yang berprestasi	45	45	100%
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ^)	10	16,72%	167,20%
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	Indeks Kesehatan	0,796	0,80	100,50%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,37%	0,66	56,06%
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	93,56	93,76	100,21%
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	72	69,78	96,92%
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3,73%	5,56	149,06%
		b. Nilai Tukar Petani	107,5	106,83	99,84%
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	10,69%	11,69%	109,35%
		b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	10,01%	5,27%	52,64%
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))	4,65%	4.74	98,10%
11	Meningkatnya iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	3.450 milyar	4.529,076	131,27%
12	MeningkatnyaKemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	Indeks Desa Membangun	0,7695	0,7421	96,44%
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	5%	5,75	115%
14	Meningkatnyapelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31,15%	30,82%	98,94%
		b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	35,14%	35,14%	100%
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	95%	88,11	92,74%
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	73,11	69,55	95,13%
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	94,98%	89,71	94,45%
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	93,25%	86,73	93%
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan	97,1%	96,41	99,29%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
		air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan			
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/kawasan/ kota	64,6%	99,98	154,77%
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	92,51%	87,78	94,88%
		h. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	93,21%	86,22	92,5%
		i. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	15%	20,19%	134,6%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	81,83%	81,94	100,13%
17	Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Indeks Kualitas Air	-		
		b. Indeks Kualitas Udara	-		
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-		
		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ^)	65,05	67,37	103,56%
		e. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga	72%	66,64	92,55%
		f. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	27%	27,29	101,07%
		g. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	60%	52,46	87,43%
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	65,47%	99,67%	65,68%

Keterangan : ^) Indikator Kinerja Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan sasaran strategis yang telah dicapai

Tabel 2.9
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	Persentase Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada ^)	100	93%	7%
		Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat ^)	95,75	75%	20,75%
		Persentase Antisipasi Penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama ^)	107	88,93%	18,07%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPPD	100%	80,66%	19,34%
		b. Rasio kemandirian keuangan	100,28%	86,96%	13,32%
		c. Maturitas SPIP	100%	86,96%	13,04%
		d. Predikat SAKIP	91,20	81,42%	9,78%
		e. Nilai EKPPD	-	-	
		Predikat EKPPD ^)	100%	63,21%	36,79%
		f. Indeks SPBE	83,85%	91,05%	-7,2%
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan ^)	100%	97,78%	2,22%
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	103,47%	88%	23,47%
		i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	100%	100%	-
		j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*Policy Brief)*	-		
		k. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ^)	80%	80,83%	-0,83%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN ^)	94,07%	77,75%	16,32%
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	110,28%	95,98%	14,3%
		b. Persentase penurunan PMKS	-		
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	100,80%	86,54%	14,26%
		Jumlah Pemuda yang berprestasi	112.5%	99,09%	12.06%
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan ^)	167,21%	90,06%	77,15%
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	Indeks Kesehatan	100,75%	70%	30,75%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	57,57%	92,79%	-35,19%
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan genderserta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	100,32%	95,98%	4,34%
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	98,28%	95,98%	2,3%
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usahapertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	149,48%	91,74%	57,74%
		b. Nilai Tukar Petani	99,84%	79,97%	19,87%
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri danperdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	109,90%	88,95%	20,95%
		b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	52,90%	88,95%	-36,05%
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	101,26%	84,58%	16,68%
11	Meningkatnya Iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	136,49%	81,39%	67,74%
12	Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan perdesaaan	Indeks Desa Membangun	99%	86,75%	12,25%
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	191,67%	91,08%	100,59%
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan,	a. Persentase benda, situs, dan kawasan	101,08%	99,42%	1,66%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	kesenian, dan tradisi lokal Daerah	cagar budaya yang dilestarikan			
		b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	108,36%	99,42%	8,94%
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	95,78%	94,36%	1,42%
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	95,76%	89,87%	5,89%
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	97,14%	94,36%	2,78%
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	94,25%	98,38%	-4,13%
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	99,49%	80,78%	18,72%
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan/ kota	155,25%	99,42%	55,83%
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	96,36%	99,46%	-3,10%
		h. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	92,74%	97,36%	-4,62%
		i. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	168,25%	82,09%	86,16%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	100,87%	84,67%	16,2%
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumberdaya alam	a. Indeks Kualitas Air	-		
		b. Indeks Kualitas Udara	-		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-		
		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ^)	103,78%	90,97%	12,81%
		e. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	91,29%	94,88%	-3,59%
		f. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	104,95%	91,67%	13,28%
		g. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	88,91%	93,10%	-4,19%
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	83,03%	86,96%	-3,93%

Keterangan : * Data Tahun 2022

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. **Misi 1** : ***"Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban"***

Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman.

Sasaran : Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan keamanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran Rpjmd		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Persentase penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	100	100	100
		Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.	100	100	100

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran Rpjmd		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib dan religius	Persentase antisipasi penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama	85	91	107

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis operasional, untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Nganjuk yang aman dan tertib. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam penegakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Target persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada
Tahun 2022 : 100 %
Realisasi Tahun 2022 : 100 %
Capaian Kinerja Tahun 2022 : 100 %

Target persentase penanganan gangguan tramtibum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 : 100 %
Realisasi Tahun 2022 : 100 %
Capaian Kinerja Tahun 2022 : 100 %

Capaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSEN (%)
A	1. Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	164	164	100
	2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	72	72	100
	3. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	5	5	100
	4. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	1	1	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada			100
B	1. Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	180	180	100
	2. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10,531	10,531	100
	3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	3	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat			100

Target persentase penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama

Tahun 2022 : 85 %

Realisasi Tahun 2022 : 91 %

Capaian Kinerja Tahun 2022 : 107 %

Selama Tahun 2022 telah terjadi 11 konflik baik dalam skala kecil dan ringan dan dan telah tertangani secara baik sejumlah 10 konflik sehingga kinerja tahun

terealisasi 91%. Apabila diperbandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 85%, maka diperoleh capaian sebesar 107%.

Pencapaian sasaran "Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan hidup beragama" rata-rata tercapai 100% dengan kategori "tercapai". Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

2. **Misi 2** : ***"Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan".***

Tujuan : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang professional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih.

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Terdiri dari sepuluh indikator kinerja, adapun indikatornya sebagai berikut :

1) Opini BPK Terhadap LKPD

Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan/Fungsi Penunjang menjelaskan pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%

Analisis pencapaian sasaran pembangunan daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD dengan target WTP untuk LKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2022, dan berdasarkan hasil audit oleh BPK, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian capaian target untuk indikator kinerja Opini BPK Terhadap LKPD adalah sebesar 100%.

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator nomor 1 yaitu Opini BPK terhadap LKPD mencapai 100%. Berdasarkan skala ordinal pencapaian sasaran yang diperoleh tersebut dalam kategori "**tercapai**".

2) Rasio Kemandirian Keuangan

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana sasaran yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Hasil Reviu Tahun 2022. Indikator tersebut untuk mengukur sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi belanja daerah yang menjadi tuntutan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah meliputi kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan prosentase kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah yang pada Tahun 2022 ditetapkan target sebesar 18 %, realisasi mencapai 18,5 % sehingga capaian rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 100,28%.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Nilai
Realisasi PAD Tahun 2022	Rp	444.885.349.080,60
Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Rp	2.465.564.527.533,00
Target rasio kemandirian keuangan daerah	%	18
Realisasi rasio kemandirian keuangan daerah	%	18,5
Capaian kinerja rasio kemandirian keuangan daerah	%	100,28

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator nomor 2 yaitu rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 100,28%. Berdasarkan skala ordinal pencapaian sasaran yang diperoleh tersebut dalam kategori "**tercapai**".

3) Maturitas SPIP

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk memperoleh Indeks Maturitas SPIP dengan nilai

sebesar 3,111 pada Tahun 2022. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2022, maka realisasi Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Dengan demikian, dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", diukur dari indikator maturitas SPIP "**tercapai**".

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyatata kelola pemerintahan yang baik	Maturitas SPIP	3	3,111	103,7 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				103,7 %

4) Predikat SAKIP

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat SAKIP	73 (BB)	66,59 (B)	91,22%
Rata-Rata Capaian Kinerja				91,22%

Dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", diukur dari indikator nomor 4 yaitu predikat SAKIP Tahun 2022 dengan capaian 91,22%, Berdasarkan skala ordinal pencapaian sasaran yang diperoleh tersebut dalam kategori "**tercapai**".

5) Nilai EKPPD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai EKPPD	Sangat baik (3,2244)	3,2244	100
Rata-rata Capaian Kinerja				**100%**

Indikator Nilai EKPPD penilaian dari Kementrian Dalam Negeri dengan capaian kinerja **3,2244** dan **Status Kinerja Sangat Tinggi** atau **100 %** dari target Indikator Kinerja Kunci dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan **Status Kinerja Sangat Tinggi**. Realisasi capaian tersebut termasuk dalam kategori **"Tercapai".**

6) Nilai Indeks SPBE

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator Nilai indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Nilai Indeks SPBE	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2.18	**83,85 %**
Rata-Rata Capaian Kinerja					**83,85 %**

Pada tahun 2022, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 2,14 (cukup), sedangkan untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan dengan nilai 2,18 (cukup). Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan SPBE, domain Tata Kelola SPBE, domain Manajemen SPBE dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator. Adapun nilai masing-masing domain serta perbandingannya dengan nilai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NILAI SPBE MASING-MASING DOMAIN

Domain	2022	2022
Kebijakan Internal SPBE	1,9	2,4
Tata Kelola SPBE	1,9	1,6
Layanan SPBE	2,75	2,87
Domain Manajemen SPBE	1,0	1,0

Dari indikator sasaran “Nilai Indeks SPBE”, rata-rata capaian kinerja **83,85** % atau dapat dikategorikan “**belum tercapai**” Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk kurang berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

7) Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sesuai Hasil Reviu RPJMD Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD 2018-2023 muncul indicator kinerja sasaran baru yakni : “Persentase Perangkat

Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan" untuk menggantikan indikator kinerja sasaran " Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku". Pencapaian sasaran bidang kearsipan tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
2.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan	66	66	100 %

Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah OPD : 50
- Target OPD Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan : 33
- Persentase target OPD yang Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan : 66
- Realisasi OPD yang Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan : 33
- Persentase Realisasi OPD yang Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan : 66
- Prosentase capaian kinerja tahun 2022 : 100 %

Indikator sasaran/kinerja "Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan" menghasilkan nilai capaian 100%. Berdasarkan skala ordinal, pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**".

8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	84,33	103,47%
Rata-rata Capaian Kinerja				**103,47%**

Hasil perhitungan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing- masing perangkat daerah se Kabupaten Nganjuk melalui kuesioner yang sudah direkam melalui aplikasi Sukma-e Jatim dengan menghasilkan *record*

total responden sejumlah 12.467 orang, didapati hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,33 untuk tahun 2022 dengan target IKM sebesar 81,50 dengan capaian 103,47%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian kinerja 103,47% dapat dikatakan mutu pelayanan Kabupaten Nganjuk adalah B dengan kinerja Pelayanan BAIK dan dikategorikan "**tercapai**".

9) Persentase Indikator RPJMD yang Mencapai Target

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan dalam rangka capaian sasaran kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, yaitu **"Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik**". Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah **"Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target"**, dengan mengitung capaian kinerja per sasaran secara skala ordinal diatas 80 %. Hasil capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- Jumlah Sasaran dalam RPJMD : 18 Sasaran
- Jumlah sasaran yang tercapai : 18 Sasaran
- Jumlah sasaran yang kurang tercapai : - Sasaran
- Jumlah sasaran tidak tercapai : - Sasaran
- % capaian kinerja sasaran Tahun 2022 : 100 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari 18 sasaran strategis nilainya capaiannya ≥ 80 dan termasuk kategori **"Tercapai".**

10) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, maka terdapat perubahan indikator kinerja pada sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik" yaitu indikator "Persentase

Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*)" dirubah menjadi :"Persentase Pemanfaatan Kelitbangan".

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk.

Diukur dari hasil capaian inerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah dokumen hasil kajian yang dilaksanakan : 10 dokumen
- Jumlah dokumen yang dimanfaatkan : 8 dokumen
- % Target capain kinerja : 100%
- % Hasil capaian indikator kinerja : 80 %

10 (sepuluh) kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

1. Dokumen Sinkronisasi Data Penyandang Kesejahteraan Sosial
2. Dokumen Kajian Dampak Sosial Pembangunan Bendungan Margopatut;
3. Dokumen Laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
4. Dokumen Kajian Penyusunan Peta Citra Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk;
5. Dokumen Pra Studi Kelayakan Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk;
6. Dokumen Kajian Potensi Penanaman Tanaman Hutan Untuk Peningkatan Status Lahan Milik Menjadi Kawasan Hutan pada Lahan Kompensasi TMKH di Bondowoso;
7. Dokumen Kajian Pengembangan Pasar Hewan Kedondong;
8. Dokumen Kajian Potensi dan Pemanfaatan Air Tanah untuk merndukung Pengembangan Kawasan *Integrated Smart Farming System* di Nganjuk;
9. Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
10. Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

Dari target 10 (sepuluh) kegiatan litbang yang seharusnya ditindaklanjuti pemanfaatannya ada 2 (dua) kegiatan kajian kelitbangan di tahun 2022 yang tidak terealisasi karena terdapat permasalahan, yaitu kegiatan :

1. Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;

2. Kajian/Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

Adapun realisasi capaian kinerja dengan indicator kinerja "Persentase Pemanfaatan Kelitbangan" sebesar 80% maka dapat dikategorikan : **"Tercapai".**

b. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Misi 2 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dengan indikator capaian Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Indeks Profesinalitas ASN	72,5%	68,2%	94,07 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				**94,07 %**

Analisa dan evaluasi atas pencapaian Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan rincian sebagai berikut ;

1. Nilai Dimensi Kualifikasi 13,09
2. Nilai Dimensi Kompetensi 25,20
3. Nilai Dimensi Kinerja 25,00
4. Nilai Dimensi Disiplin 4,99

Total IP ASN 68,20

Dari capaian kinerja sebesar 94,07 % maka dapat disampaikan bahwa Sasaran "Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah" dengan indikator kinerja "Indeks Profesionalitas ASN" dapat dikategorikan "**tercapai**".

3. **Misi 3** : ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas"***

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat terdiri 1 indikator kinerja yaitu:

1) Tingkat Kemiskinan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	11,80% %	10,70 %	110,28%
Rata-Rata Capaian kinerja				**110,28%**

Dari hasil penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebesar Rp. 474.429 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.197 dibanding garis kemiskinan tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai penduduk non-miskin di Kabupaten Nganjuk, seseorang perlu mempunyai pendapatan minimal Rp. 474.429 per bulan.

Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Nganjuk adalah 10,70% dengan target 11,80%, dengan demikian realisasi ini apabila dihitung akan menghasilkan angka capaian sebesar 110,28%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator Tingkat Kemiskinan dapat dikategorikan "**tercapai**".

2) Persentase Penurunan PMKS

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penurunan PMKS	0,4 %	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, maka terdapat perubahan bahwa indikator kinerja pada sasaran "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat" dengan indikator kinerja "Persentase Penurunan PMKS" yang semula menjadi sasaran daerah maka diturunkan menjadi indicator kinerja perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan Dan Prestasi Pemuda

Sasaran meningkatnya kualitas dana aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda terdiri 3 indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Pendidikan

No	SasaranRPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	0,625	0,63	100,8%

Pencapaian indikator sasaran indeks pendidikan diukur dengan parameter sebagai berikut:

1. *Angka Partisipasi Murni*

Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan di SD/MI/Paket A dan usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs/Paket B.

a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Data APM SD/MI/Paket A Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APM SD/MI/Paket A Tahun 2022 sebesar 99,05%
- Jumlah anak sekolah SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 90.821 anak
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 101.625 anak
- Realisasi APM SD/MI/Paket A sebesar 89,37 %
- Capaian kinerja adalah 90,23 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Data APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APM SMP/MTs/Paket B Tahun2022 sebesar 93,10%
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 49.281 anak
    a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 51.990 anak
    b. Realisasi APM SMP/MTs/Paket B sebesar 94,79 %
    c. Capaian kinerja adalah 101,81 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

2. *Angka Partisipasi Kasar*

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah siswa usia 4-6 tahun dibanding jumlah penduduk usia 4-6 tahun, sedangkan untuk SD/MI/Paket A atau SMP/MTs/Paket B merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI/Paket A dibanding penduduk usia 7-12 tahun atau jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibanding jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Data APK PAUD Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APK PAUD Tahun 2022 sebesar 80 %
- Jumlah siswa usia 4-6 tahun sebanyak 31.157 siswa
- Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 30.265 orang
- Realisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 102,95 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 128,68 %

  Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Data APK SD/MI/Paket A Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APK SD/MI/Paket A Tahun 2022sebesar 108%
- Jumlah siswa sekolah SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun sebanyak 95.551 siswa
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 1106.625 orang
- Realisasi APK SD/MI/Paket A sebesar 94,02 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 87,06 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Data APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2022 sebesar 106,15%

- Jumlah siswa sekolah SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 51.648 siswa
- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 51.990 orang
- Realisasi APK SMP/MTs/Paket B sebesar 99,34 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 93,59 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
   b. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
   b. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
   a. Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan

3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah indikator yang menunjukkan besarnya jumlah anak didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan karena berbagai alasan baik ditingkat SD/MI maupun SMP/MTs.

3.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Data APS SD/MI Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APS SD/MI Tahun 2022 sebesar 0,00%
- Jumlah anak sekolah SD/MI sebanyak 96.649 anak
- Jumlah anak sekolah SD/MI yang putus sekolah sebanyak 0 anak
- Realisasi APS SD/MI sebesar 0,00%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00%

Capaian kinerja tersebut jika dibanding dengan target RPJM termasuk dalam kategori "**tercapai**".

3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Data APS SMP/MTs Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target persentase APS SMP/MTs Tahun 2022 sebesar 0,00%
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs sebanyak 51.990 anak
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0 anak
- Realisasi APS SMP/MTs sebesar 0,00%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100%

Dari indikator tersebut rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% yang masuk katagori tercapai. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    a. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
    b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
    c. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar.
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    a. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
    b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
    c. Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
    d. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

4. Angka Kelulusan

Indikator angka kelulusan merupakan salah satu indicator yang mengukur kualitas kegiatan belajar mengajar.

4.1 Angka Kelulusan SD/MI

Data Angka kelulusan untuk SD/MI Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target angka kelulusan SD/MI Tahun 2022 adalah sebesar 100 %
- Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 17.506 anak
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI sebanyak 17.506 anak
- Realisasi persentase angka kelulusan SD/MI sebesar 100 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %

Capaian diatas menunjukkan bahwa target kelulusan tingkat SD/MI dapat dicapai dengan baik.

4.2 Angka Kelulusan SMP/MTs

Data Angka kelulusan untuk SMP/MTs Tahun 2022 sebagai berikut :

- Target angka kelulusan SMP/MTs Tahun 2022 sebesar 100%
- Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 17.714 anak
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs sebanyak 17.714 anak
- Realisasi persentase angka kelulusan SMP/MTs sebesar 100%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100%

Capaian diatas menunjukkan bahwa target kelulusan tingkat SMP/MTs yang ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai dengan baik. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan,dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda**" dari indikator 1 (Indeks Pendidikan) memperoleh capaian kinerja sebesar **100,80%** yang masuk dalam kategori **"tercapai".** Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

2) Jumlah Pemuda yang Berprestasi

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	40	45	112,5 %

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
	pendidikan dan prestasi pemuda				

Analisis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

"Jumlah Pemuda yang berprestasi" merupakan indikator kinerja baru yang digunakan sebagai pengganti indikator "Indeks Pembangunan Pemuda" berdasarkan hasil reviu terhadap RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam Tahun 2022 ada 45 pemuda berhasil mencetak prestasi dari target 40 pemuda, dengan daftar prestasi Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Nama Event	Tingkat	Keterangan
1	Pentas Rias Busana Terbaik Festival Karya Tari	Jatim	3 orang
2	Penyaji Terbaik Pentas Tari	Jatim	3 orang
3	Pekan Kebudayaan Daerah	Jatim	
4	Penyaji Terbaik Festival Wayang Kulit Dalang Muda	Jatim	5 orang
5	Garap lakon Terbaik Festival Wayang Kulit Dalang Muda	Jatim	5 orang
6	Dalang Terbaik Festival Wayang Kulit Dalang Muda	Jatim	5 orang
7	Sabet Terbaik Festival Wayang Kulit Dalang Muda	Jatim	5 orang
8	Pemuda Pelopor	Nasional	Juara I
9	MSQ	Nasional	Juara II
10	World Youth Invention and Innovation Award	Nasional	Juara III
11	Duta Batik	Jatim	Juara III
12	Paskibraka (Juara I)	Jatim	2 orang
13	Asean Paragames Cabor Renang	Internasional	Juara I, II
14	Kejurnas Angkat Berat Senior	Nasional	Juara I
15	Porprov Jatim Cabor Bridge	Jatim	Juara I
16	Porprov Jatim Cabor Jujitsu	Jatim	Juara I
17	Porprov Jatim Cabor Kick Boxing	Jatim	Juara II,III
18	Porprov Jatim Cabor Gulat	Jatim	Juara II,III
19	Porprov Jatim Cabor Angkat Berat	Jatim	Juara I, II, III

Dari sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda", dengan indikator kinerja "Jumlah Pemuda yang Berprestasi" rata-rata capaian kinerja 112,5% atau dapat dikategorikan **"tercapai".** Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda.

3) Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	10	16,72	167,21%

Analisis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

"Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan" merupakan indikator kinerja baru yang digunakan berdasarkan hasil reviu terhadap RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.

Pengunjung perpustakaan selama Tahun 2022 tercatat 86.305 orang meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 51.615 orang. Dari target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 10%, terealisasi 16,72%.

Dari sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda", dengan indikator kinerja "Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan" rata-rata capaian kinerja 167,21% atau dapat dikategorikan **"tercapai".** Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda.

a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Serta Pengendalian Penduduk

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk terdiri 2 indikator kinerja yaitu:

1) Indeks Kesehatan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, target indikator tujuan Tahun 2022 yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah :

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk	Indeks Kesehatan	0,794	0,80	100,75%

Indeks kesehatan Tahun 2022 diukur dengan variabel usia harapan hidup, Rata-rata usia harapan hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah 71,95 Tahun meningkat apabila dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup tahun 2021 sebesar 71,60 Tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk ini masih diatas Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 71,74. Untuk menunjang indikator sasaran Indeks Kesehatan diukur dengan parameter sebagai berikut :

a) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi
   - Target Fasilitas Kesehatan terakreditasi 100 %
   - Realisasi Fasilitas Kesehatan terakreditasi 44 %
   - Capaian kinerja 44 %

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

   Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 per 100.000 kelahiran hidup memiliki target :
   - Target Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2022 sebesar <83 per 100.000 kelahiran hidup
   - Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan sebesar 167,24 kematian per 100.000 kelahiran hidup
   - Realisasi capaian Angka Kematian Ibu sebesar 167,24.
   - Capaian kinerja adalah 49,57%

c) Angka Kematian Bayi (AKB)

   Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Keberhasilan pemberantasan dan pencegahan penyakit yang menyebabkan kematian bayi ditunjukkan dengan menurunnya AKB, sehingga AKB digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi Tahun 2022 per 1.000

kelahiran hidup memiliki target :

- Target Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022 sebesar <8,5 per 1.000 kelahiran hidup
- Realiasai Angka kematian bayi (AKB) yang dilaporkan sebesar 12,98 per 1.000 kelahiran hidup
- Capaian kinerja 64,71 %

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai berikut:

- Kegiatan Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi (Gerdaristi) yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk;
- Keberlanjutan Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk;
- Monitoring dan Evaluasi berkala baik di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas;
- Peningkatan kulitas pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas PONED;
- Rumah Sakit PONEK berfungsi dengan baik;
- Penyusunan regulasi yang mengatur kepatuhan petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibudan anak;
- Terjalinnya kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait dalam menurunkan AKB di Kabupaten Nganjuk;
- Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk baik berupa dana maupun kebijakan-kebijakan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nganjuk.

d) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat.

- Target Balita Stunting 14 %
- Jumlah balita (0-59 bulan) 57.982 anak, jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur tinggi dan berat badan pada tahun 2022 adalah 46.619 anak, jumlah balita stunting 537 anak dan didapatkan angka balita

stunting sebesar 1,15%.

- Realisasi 1,15%
- Capaian kinerja 1,00

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA), dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya;
- Program Pendampingan Balita Gizi Buruk (Gentasibu).

e) *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator *Universal Child Immunization* (UCI) untuk menunjukkan desa/kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi anak secara lengkap. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan UCI adalah melalui Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya imunisasi anak secara lengkap.

- Target desa UCI sebesar 90%
- Jumlah desa UCI tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk 209 desakelurahan dengan jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 284.
- Realisasi 73,59 %
- Capaian kinerja 81,77%

f) Tuberculosis (TB)

Prevalensi Tuberculosis adalah jumlah pasien Tuberculosis semua kasus terduga per 100.000 penduduk.

- Target 49,60
- Realisasi 26,26
- Capaian kinerja 188,88%

g) Prevalensi *Humman Immunodeficiency Virus* (HIV)

Adalah seseorang yang hasil pemeriksaan HIV positif dengan alat pemeriksaan reagen rapid test. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) HIV, meliputi edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, skrining yang dilakukan dengan pemeriksaan test cepat HIV minimal 1 kali dalam

setahun. Capain indikator dengan formulasi penghitungan jumlah seluruh kasus dibagi jumlah penduduk dalam satu kurun waktu.

- Target 0,01%
- Realisasi 0,00508%
- Capaian Kinerja 196,85%

Dari ketujuh indikator tersebut capaian kinerja urusan kesehatan adalah **100%** yang masuk dalam kategori "**tercapai**". Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

b. Laju Petumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, target indikator tujuan tahun 2022 yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	laju pertumbuhan penduduk	0,38	0,66	57,57%

Data kependudukan terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

- Data migrasi masuk
- Data migrasi keluar
- Jumlah kelahiran
- Jumlah kematian

LPP pada tahun 2021 sebesar 0,50, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,66. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nganjuk terdapat lonjakan penduduk sebesar 0,16. Pencapaian indikator Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk didukung dengan parameter berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total.

   Jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 WUS (15-49) dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

   Dengan rumus sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFRi$$

Dimana :

ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur

i = 1 : kelompok umur 20-24 tahun

i = 7 untukkelompok umur 45-49 tahun.

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

   Dengan rumus sebagai berikut :

   $$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

3. Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan.

   Dengan rumus sebagai berikut :

   $$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok kegiatan yang PUS}}{\text{Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok}} \times 100\%$$

Adapun hasil pencapaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas”

   1.1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total.

   TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Data dan capaian TFR Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

   - Jumlah Kelahiran : 12.643
   - Jumlah Wanita Usia Subur (usia 15-49) : 268.231
   - Realisasi *Total Fertility Rate* : 1,73 %
   - Target *Total Fertility Rate* : 2,00 %
   - Capaian *Total Fertility Rate* : 115,61%

   Sampai dengan Tahun 2022, indikator prosentase pencapaian Total Fertility Rate tercapai sebesar 115,61 %. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan

program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

1.2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu). Data dan capaian CPR Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah peserta KB aktif : 141.709
- Jumlah pasangan usia subur : 180.968
- Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* : 78,31 %
- Target *Contraceptive Prevalence Rate* : 80,03 %
- Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* : 97,85%

Selanjutnya untuk indikator Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* tercapai sebesar 97,85%. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

1.3. Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan. Data dan capaian Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah anggota kelompok kegiatan yang PUS : 47.770
- Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan : 67.715
- Realisasi Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 70,55%
- Target Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 88,00 %
- Capaian Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 80,17%

Indikator prosentase keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan tahun 2022 tercapai sebesar 80,17%. Keluarga yang ber-KB

yang mengikuti kelompok kegiatan yang mampu menjalankan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) melalui kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

c. Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri 2 indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG mengukur kesenjangan tingkat kesejahteraan antara laki-laki dengan perempuan. Aspek kesejahteraan ini diukur dari indeks pendidikan (lama sekolah dan harapan lama sekolah), indeks kesehatan (usia harapan hidup), serta indeks daya beli (pengeluaran/kapita). IPG Kabupaten Nganjuk tahun 2022 targetnya sebesar 94,46 sedangkan realisasi sebesar 93,76 dengan capaian sebesar 100,32%.

Dengan demikian Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indicator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dikategorikan "Tercapai"

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.Indeks pemberdayaan gender (IDG) dimaksudkan untuk mengukur peran serta perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, keanggotaan dalam DPRD serta pengambil keputusan, maupun peran serta dalam berbagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Proyeksi realisasi IDG tahun 2022 yaitu sebesar 71, sedangkan realisasinya sebesar 69,78 dengan capaian Tahun 2022 sebesar 98,28%.

Dengan demikian Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan

indicator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dikategorikan "Tercapai"

4. **Misi 4** : ***"Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Lokal Serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna"***

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal.

Sasaran yang ingin dicapai :

4.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Dan Perikanan, Serta Kesejahteraan Petani

Sasaran meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani terdiri 2 indikator kinerja yaitu :

4.1.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Sasaran	IndikatorSasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	3,72%	5,56%	149,48%

Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan. PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) sebagai berikut:

No	Subsektor Usaha	PDRB Tahun (dalam Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan	2.684.688,9	2.753.118,5	2.843.987,90	2.651.242,20	2.651.242,20
2.	Tanaman Hortikultura Semusim	966.907,3	1.016.397,3	1.105.715,30	1.244.053,	1.244.053,
3.	Perkebunan Semusim	278.769,8	286.697,6	308.628,4	351.064,00	351.064,00
4.	Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya	285.807,8	299.778,4	303.355,0	321.667,10	321.667,10
5.	Perkebunan Tahunan	192.453,0	203.218,1	205.020,8	220.190,10	220.190,10
6.	Peternakan	2.145.379,4	2.252.713,8	2.309.683,8	2.410.585,10	2.410.585,10

No	Subsektor Usaha	PDRB Tahun (dalam Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
7.	Jasa Pertanian dan Perburuan	89.721,6	92.750,8	95.186,8	97.567,00	97.567,00
8.	Perikanan	262.675,1	266.764,1	275.887,1	298.875,30	298.875,30
	Jumlah	**6.906.402,8**	**7.171.438,4**	**7.767.690,52**	**7.950.246,10**	**8 422 272,23**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2022
Keterangan:
** Angka Sementara
*** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp. 8,422 triliun, meningkat kurang lebih Rp. 472 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti angka pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan year-on-year 2021-2022 mencapai 5,93%. Dibandingkan dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 3,72%, maka berdasarkan realisasi untuk tahun 2022 tersebut, sasaran sudah tercapai dengan nilai capaian sebesar 149,48%.

4.1.2 Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa Sasaran meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani dengan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan dapat disimpulkan :"Tercapai".

4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan Dan Hortikultura)

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2022 dengan target 107% terealisasi 106,83% . Hal ini berarti capaian kinerja indikator NTP mencapai 99,84%. Kontribusi NTP terbesar diperoleh dari tanaman pangan (100,88%) serta dari sub sektor peternakan (107,10%), yang dapat diartikan bahwa nilai penerimaan petani tanaman pangan dan peternak sebesar masing-masing 100,88% dan 107,10% daripada nilai pengeluaran yang ditanggung oleh petani tersebut.

Di sisi lain, komoditas padi dan jagung memberikan kontribusi terbesar secara agregat bagi pencapaian NTP Kabupaten Nganjuk, dimana masing- masing memberikan kontribusi sebesar 60,69% dan 24,53% dikarenakan kedua komoditas ini mempunyai luas panen yang lebih besar daripada komoditas lainnya.

Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut, hal-hal yang menjadi fokus Dinas Pertanian antara lain adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian serta upaya penurunan kasus/kejadian penyakit hewan menular; yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

1) Produksi Tanaman Pangan

- Produksi Padi pada tahun 2022 sebesar 505.444,04 ton atau mengalami kenaikan produksi 0,027% dibanding tahun 2021 yang sebesar 491.961,21.
- Produksi Jagung pada tahun 2022 sebesar 186.993.61 ton mengalami penurunan 0,036% dibanding produksi Jagung Pada tahun 2021 sebesar 193.990,82 ton.
- Produksi bawang merah tahun 2022 sebesar 181.270,10 ton mengalami penurunan hasil produksi 0,064% dibanding produksi tahun 2021 sebesar 193.668,60 ton.
- Produksi cabe merah tahun 2022 sebesar 135,10 ton atau mengalami penurunan produksi 0,535% dibanding produksi tahun 2021 sebesar 290,40 ton.
- Produksi tebu tahun 2022 tercapai sebesar 20.630,01 ton atau mengalami kenaikan 6,63% dibanding produksi tebu tahun 2021 sebesar 19.292,98 ton.
- Produksi tembakau tahun 2022 tercapai sebesar 967,47 ton mengalami penurunan 0,1% dibanding produksi tahun 2021 sebesar 1.079 ton.

b. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Pada Tahun 2022 target persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,07%. Dari target ini dapat terealisasi 84,92% dengan capaian 2.086%.

Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan Perikanan, serta kesejahteraan petani” dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) dengan capaian 99,84%. berdasarkan skala ordinal predikat capaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **“tercapai”**.

4.2 Meningkatnya Volume Sektor Usaha Industri dan Perdagangan

Sasaran Meningkatnya Volume Sektor Usaha Industri dan Perdagangan terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

4.2.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Urusan Industri

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri	10,64	11,69	109,90%

Pada Tahun 2022 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dengan data sebagai berikut :

- PDRB industri tahun 2022 : 4.897.907,05
- PDRB industri Tahun 2021 : 4.188.847,00
- Target Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Tahun 2022 : 10,64%
- Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Tahun 2022 : 11,69 %
- Capaian Kinerja Tahun 2022 : 109,90%

Indikator sasaran "**Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri**" dengan capaian sebesar 109,90%, berdasarkan skala ordinal, termasuk dalam kategori "**tercapai**".

4.2.2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	9,96	5,27%	52,90%

Pada Tahun 2022 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dengan target sebesar 9,96%. Dari target kinerja tersebut telah terealisasi sebesar 5,27% atau dengan capaian kinerja sebesar 52,90 %.

- PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022 : 6.235.160,11
- PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021 : 5.636.348,03
- Target Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022 : 9,96%
- Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2022 : 5,27%
- Capaian Kinerja Tahun 2022 : 52,90%

Indikator sasaran "meningkatnya volume usaha sektor perdagangan" rata-rata dibawah **60%** berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tidak tercapai"**.

4.3 Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat

Capaian sasaran indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,80%	4,74	101,26%

Persentase TPT Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 sebesar 4,74% mengalami penurunan sebesar 0,24 % dibanding Tahun 2021 sebesar 4,98%. Jumlah pengangguran Tahun 2022 sebesar 26.852 orang dengan angkatan kerja sebanyak 566.095 orang. Realisasi Tingkat pengangguran Terbuka pada tahun 2022 ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,80%.

Sasaran **"**Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat" dengan indikator kinerja "Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka" dengan nilai capaian 101,26%. Berdasarkan skala ordinal predikat capaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"tercapai".**

4.4 Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kondusif

Indikator sasaran meningkatnya iklim investasi adalah Nilai Investasi Daerah dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Capaian %
Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi Daerah	3.318,20	4.529,076	136,49%
Rata-rata Capaian Kinerja				**136,49%**

Analisis atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Realisasi Investasi PMDN/PMA yang ditanamkan/ diinvestasikan merupakan indikator yang menunjukkan meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk. Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk PMDN sebagai berikut:

- Target realisasi Investasi tahun 2022 : 3.318.210.000.000
- Realisasi Investasi Tahun 2022 : 4.529.076.183.502
- Capaian Kinerja Tahun 2022 : 136,49%

Indikator Sasaran/Kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Nganjuk” pada urusan Penanaman Modal Daerah berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut mencapai 136,49% termasuk dalam kategori **“tercapai”**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditargetkan di tahun Anggaran 2022.

4.5 Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan

Pencapaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Nganjuk dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,7494	0,7421	99%
Rata-rata capaian kinerja				**99%**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkani

mplementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.Sumber data dalam pengambilan data dilakukan di seluruh Desa dengan harapan mendapatkan Data dan Informasi sesuai fakta yang ada di Desa.

Dalam Penentuan Status IDM, klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,70724 Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
4. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Bahwa Pada Tahun 2022 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 16 desa pada Tahun 2021 menjadi 23 desa.

Sasaran "Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan" dengan indicator Indeks Desa Membangun menghasilkan nilai capaian 99%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**". Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan.

5. **Misi 5** : ***"Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata"***

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal.

Sasaran yang ingin dicapai :

5.1 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

Sasaran "Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah", diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah kunjungan wisatawan baik regional maupun mancanegara baik dewasa maupun anak-anak di obyek wisata unggulan (obyek daya tarik wisata) baik yang berestribusi maupun yang tidak beretribusi, yaitu :

semua lokasi wisata alam, wisata buatan, wisata religi dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2022. Indikator tersebut juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah wisatawan Tahun 2021 (orang) : 193.092
- Target Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Tahun 2022 : 3 %
- Realisasi jumlah wisatawan data Tahun 2022 (orang) : 204.873
- Persentase realisasi jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2022 5,75%
- Capaian Kinerja Tahun 2022 : 191,67%

Dari sasaran "Meningkatnya daya saing pariwisata daerah", dengan indikator kinerja "Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan" mendapatkan capaian kinerja 191,67% dan dikategorikan **"tercapai"**.

5.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan, Kesenian, dan Tradisi Lokal Daerah

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnyapelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokaldaerah	1	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	30,49	30,82	101,08%
	2	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokalyang dilestarikan (%)	32,43	35,14	108,36%
Rata-Rata Capaian Kinerja					**104,72%**

Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Capaian kinerja persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2022, dihitung berdasarkan :
   - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2022 = 94 buah
   - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 = 305 buah

Target dari persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2022 adalah 30,49% terealisasi sejumlah 30,82% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 101,08%.

2. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Capaian kinerja persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Tahun 2022, dihitung berdasarkan :
   - Jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan pada Tahun 2022 = 13
   - Jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022= 37

   Target dari persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Tahun 2022 adalah 32,43% terealisasi sejumlah 35,14% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 108,36%.

   Sasaran "Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah" menghasilkan nilai capaian 104,72%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah.

6. **Misi 6** : **"*Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana*"**

Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai :

6.1 Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

a. Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Prosentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan maupun peningkatan jembatan untuk

memperlancar perekonomian antar desa maupun kecamatan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah jembatan Kabupaten Nganjuk	661 Unit
- Jumlah target jembatan dalam kondisi baik di jalan Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2022	610 Unit
- Persentase target jembatan di jalan Kabupaten Nganjuk dalm kondisi baik pada tahun 2022	92,35 %
- Jumlah jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2021	589 Unit
- Rekapitulasi jumlah jembatan yang mengalami penyusutan di Kabupaten Nganjuk dalam akhir tahun 2022	7 Unit
- Realisasi jumlah pembangunan/pemeliharaan jembatan di Kabupaten Nganjuk dalam tahun 2022	11 Unit
- Total rekapitulasi jumlah jembatan di Kabupaten dalam kondisi baik s/d akhir tahun 2022	593 Unit
- Presentase realisasi jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022	89,71 %
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2022	97,14 %

Keberhasilan ini disebabkan karena terselesainya dokumen perencanaan yang tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan jembatan dapat selesai sesuai target.

b. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional

Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Panjang jalan Kabupaten Nganjuk	1.153,482 Km
- Panjang target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2022	1.061,203 Km
- Persentase target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2022	92 %

- Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional s/d akhir tahun 2022 — 1.016,419 Km
- Total panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak s/d tahun 2022 — 137,063 Km
- Persentase realisasi jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2022 — 88,12%
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2022 — 95,78 %

c. Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik

Prosentase bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan menjaga kondisi Bangunan Gedung Negara sehingga layak untuk dipergunakan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah seluruh bangunan gedung fasilitas umum tahun 2022 — 98 unit
- Jumlah target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2022 — 90 unit
- Persentase target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2022 — 92,02 %
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai akhir tahun 2020 — 83 unit
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2022 — 2 unit
- Total realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai dengan akhir tahun 2022 — 85 unit
- Persentase realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2022 — 86,73 %
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2022 — 94,25 %

d. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Sistem Kinera Sistem Irigasi merupakan salah satu indikator yang menyatakan luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Total luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk 14.951 Ha

- Jumlah target luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2022 10.856 Ha
- Persentase target luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2022 72,61 %
- Realisasi luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2022 seluas 10.398 Ha
- Persentase luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2022 69,55 %
- Persentase capaian kinerja pada Tahun 2022 95,76 %

e. Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan.	96,9%	96,41	99,49%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**99,49%**

Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembangunan perekonomian daerah. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 (jiwa) 1.117.000
- Jumlah target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2022 1.082.373
- Target persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2022 96,9%
- Realisasi persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system 96,41%

perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2022

- Capaian kinerja Tahun 2022 99,49%

Dengan capaian kinerja sebesar 99,49%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2022 termasuk kategori **"Baik"**.

f. Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas kawasan/ kota	64,40	99,98	155,25%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**155,25%**

Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/ kawasan/ kota merupakan salah satu indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun dan menyediakan unit pengolah setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau sistem pengolahan terpusat. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 (jiwa) 1.117.000
- Jumlah target penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2022 719.348
- Persentase target penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2022 64,40%
- Realisasi Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2022 1.116.777
- Realisasi persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2022 99,98%
- Capaian kinerja Tahun 2022 155,25%

Dengan capaian kinerja sebesar 155,25%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah

tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2022 termasuk kategori **"Sangat Baik"**.

g. Persentase Pemenuhan Drainase Lingkungan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase pemenuhan drainase lingkungan	91,10	87,78	96,36%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**96,36%**

Persentase pemenuhan drainase lingkungan merupakan indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun dan menyediakan drainase bagi lingkungan perumahan dalam rangka pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk Tahun 2022 (jiwa) 1.117.000
- Target Jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2022 1.017.587
- Persentase target penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2022 91,1%
- Realisasi jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2022 980.500
- Realisasi persentase penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2022 87,78%
- Capaian kinerja Tahun 2022 96,36%

Dengan capaian kinerja sebesar 96,36%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2022 termasuk kategori **"Baik"**.

h. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan Lingkungan.

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja				-

Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan merupakan indikator diturunkan menjadi indicator kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil reviu RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

i. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,96	86,22	92,74%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**92,74%**

Persentase ketersediaan rumah layak huni merupakan indikator yang menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah rumah s.d akhir tahun 2022 (unit) 327.281
- Jumlah rumah layak huni sampai Tahun 2021 (unit) 281.761
- Persentase target rumah layak huni sampai Tahun 2022 92,96%
- Realisasi penanganan rumah tidak layak huni tahun 2022 419
- Realisasi rumah layak huni s.d. tahun 2022 282.180
- Persentase realisasi rumah layak huni sampai Tahun 2022 86,22%
- Capaian kinerja Tahun 2022 92,74%

Dengan capaian kinerja sebesar 92,74%, maka indikator kinerja persentase jumlah rumah layak huni sampai Tahun 2022 termasuk kategori "**Baik**".

j. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas.

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	12	20,19	168,25%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**168,25%**

Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan indikator dalam rangka menciptakan transportasi di Kabupaten Nganuk yang aman dan tertib. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2018 (tahun dasar) 743
- Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2022 593
- Persentase target penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2022 12%
- Persentase realisasi penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2022 20,19%
- Capaian kinerja Tahun 2022 168,25%

Dengan capaian kinerja sebesar 168,25%, maka indikator kinerja persentase penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2022 termasuk kategori "**sangat baik**". Sasaran "Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal" menghasilkan nilai capaian 110,55%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal di Kabupaten Nganjuk.

6.2 Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Prosentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata ruang tahun 2022	153.058.800 m2
Luas target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2022	124.329.663 m2
Persentase target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2022	81,23 %
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sampai akhir tahun 2020	124.658.263 m2
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2022	750.531 m2
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan	125.408.794 m2

rencana tata ruang s/d akhir tahun 2022

Persentase realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2022 — 81,94 %

Capaian kinerja Tahun 2022 — 100,87%

Keberhasilan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang. Sasaran "Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah" menghasilkan nilai capaian 100,87% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"tercapai"**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam Tahun 2022.

6.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam terdiri dari 4 Indikator kinerja antara lain :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,91	67,37	103,78%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**103,78%**

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks kualitas air (IKA)	53,49	30%	16,04
2	Indeks kualitas udara (IKU)	80,62	30%	24,17
3	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	54,91	40%	21,96
IKLH Kabupaten				67,37

Rumus penghitungan IKLH adalah : 0,3 x IKA + 0,3 x IKU+ 0,3 x ITL sehingga diperoleh skor akhir 63,37 dari target sebesar 64,91. Dengan demikian diperoleh capain sebesar 103,78% sehingga dikategorikan "**Sangat Baik**".

b. Persentase Cakupan Penanganan Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkiraan produksi sampah tahun 2022 (ton) — 10.190,22

Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022 (ton/tahun)	7.438,86
Realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022 (ton)	6.790,75
Target cakupan penanganan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022	73%
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2022	66,64%
Persentase capaian Tahun 2022	91,29 %

Dengan capaian kinerja sebesar 91,29 %, maka indikator kinerja persentase cakupan penanganan persampahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk kategori **"Baik"**.

c. Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui 3R

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perkiraan produksi sampah tahun 2022 (ton)	10.190,22
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022 melalui 3 R tahun 2022 (ton)	2.649,46
Realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022 (ton)	2.780,59
Target Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022	26%
Realisasi persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2022	27,29%
Persentase capaian Tahun 2022	104,95 %

d. Persentase RTH Perkotaan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (TRH)	59	52,46	88,91%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**88,91%**

Peningkatan Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan merupakan indikator yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memilliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, fungsi sosial-ekonomi, bahwa RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota, sedangkan fungsi evakuasi adalah RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jumlah RTH di setiap kota minimal sebesar 30% dari luas kota.

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk (Ha)	28.950.710
Luas RTH perkotaan yang seharusnya ada (Ha)	8.685.21
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2021 (Ha)	4.556,55
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2022 (Ha)	4.556,83
Target RTH perkotaan tahun 2022	59 %
Realisasi RTH perkotaan tahun 2022	52,46 %
Capaian Kinerja Tahun 2022	88,91%

Dengan capaian kinerja sebesar 88,91 %, maka indikator kinerja persentase Peningkatan RTH Perkotaan termasuk kategori **"Baik"**.

6.4 Meningkatnya Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	82,76%	99,67%	83,03%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**83,03%**

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana tahun 2022, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa dilihat juga dari Indeks Risiko Bencana yang setiap tahun dihitung oleh provinsi Jawa Timur.

IRB	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Nganjuk	152,80	152,80	152,80	152,80	132,87	118,22	107,88	99.67
Provinsi Jawa Timur	171,39	168,94	165,79	152,40	138	126,42	117,26	108.69
Nasional	156,8	150,7	148,9	146,1	143,6	179,0	143,0	Proses

Dari data diatas IRB Kabupaten Nganjuk untuk tahun ini tergolong baik dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan data diatas.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 83,03% maka sasaran meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil dalam upaya penanganan penanggulangan bencana.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, di samping didanai dari APBD juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBN. Dana tersebut dialokasikan melalui penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Alokasi Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 meliputi :

3.1 Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

3.1.1. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
    a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
        1) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3203/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
        2) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3204/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.
        3) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor:

3205/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

4) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3206/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
5) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3207/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
6) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3208/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
7) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 4820/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Kebonagung (2) Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
8) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 4820/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Pule (2) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan

penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 adalah **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.** Alokasi anggaran yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pembantuan yang dilimpahkan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bentuk pemberian tugas pembantuan yaitu menyelenggarakan program kegiatan nasional dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

1) Target Kinerja

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai target kinerjaberdasarkan lokasi tugas pembantuan sebagai berikut :

- Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong target 20 Unit Rumah
- Desa Pule Kecamatan Jatikalen target 20 Unit Rumah
- Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan target 18 Unit Rumah
- Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon target 6 Unit Rumah
- Desa Ngujung Kecamatan Gondang target 20 Unit Rumah
- Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot target 13 Unit Rumah
- Desa Kebonagung (2) Kecamatan Sawahan target 2 Unit Rumah
- Desa Pule (2) Kecamatan Jatikalen target 1 Unit Rumah

2) Realisasi

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai realisasikinerja berdasarkan lokasi tugas pembantuan sebagai berikut :

- Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong realisasi 20 Unit Rumah
- Desa Pule Kecamatan Jatikalen realisasi 19 Unit Rumah
- Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan realisasi 18 Unit Rumah
- Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon realisasi 6 Unit Rumah
- Desa Ngujung Kecamatan Gondang realisasi 20 Unit Rumah

- Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot realisasi 13 Unit Rumah
- Desa Kebonagung (2) Kecamatan Sawahan realisasi 2 Unit Rumah
- Desa Pule (2) Kecamatan Jatikalen realisasi 1 Unit Rumah

Tabel. 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3203/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembang-nya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100	20 Unit Rumah	100	
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3204/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk					Desa Pule Kecamatan Jatikalen	Dinas PRKPP	400.000.000	380.000.000	95	19 Unit Rumah	95	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3205/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk					Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan	Dinas PRKPP	360.000.000	360.000.000	100	18 Unit Rumah	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3206/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk					Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon	Dinas PRKPP	120.000.000	120.000.000	100	6 Unit Rumah	100	
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3207/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Ngujung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk					Desa Ngujung Kecamatan Gondang	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100	20 Unit Rumah	100	
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 3208/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk					Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot	Dinas PRKPP	260.000.000	260.000.000	100	13 Unit Rumah	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 4820/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Kebonagung (2) Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk					Desa Kebonagung (2) Kecamatan Sawahan	Dinas PRKPP	40.000.000	40.000.000	100	2 Unit Rumah	100	
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 4820/KPTS/Rb9.4.3/2022 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Pule (2) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk					Desa Pule (2) Kecamatan Jatikalen	Dinas PRKPP	20.000.000	20.000.000	100	1 Unit Rumah	100	

3.2 Tugas Pembantuan Dinas Pertanian

3.2.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1) Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-018.08.4.059185/2021 tanggal 28 Oktober 2022 (Refisi ke-3)
2) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 932/2304/110.2/2022 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 932/1309/110.2/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Tugas Pembantuan Provinsi di Kabupaten / Kota Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian APBN Tahun Anggaran 2022
3) DIPA TA. 2021 Nomor. SP-DIPA-018-06.4.059181/2022 tanggal 17 November 2021

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

1) Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
2) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
2) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana kegiatan

d. Program dan Kegiatan

A. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Aktivitas :

1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

   Komponen : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

   - Irigasi Perpipaan
   - Embung Pertanian
   - Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat
   - Jaringan Irigasi Tersier

2. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

   Komponen : Koordinasi

   Sub Komponen : Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

   Komponen :

   - Pelayanan Publik kepada Masyarakat

     Sub Komponen : E-RDKK untuk Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi

   - Pelayanan Publik Lainnya

     Sub Komponen : Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi

4. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

   Komponen : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

   Sub Komponen : Asuransi Pertanian

   Program : Dukungan Manajemen

   Aktivitas : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

   Komponen : Layanan Dukungan Manajemen Internal

   Sub Komponen : Layanan Umum

B. Program Peningkatan Produksi Sapi Dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

1. Inseminasi Buatan (IB)

   - Aktivitas : Meningkatkan produktivitas sapi dan kerbau yang menjadi andalan ternak penghasil daging
   - Komponen : Pelayanan Umum kepada peternak
   - Sub Komponen : Pelayanan inseminasi buatan (IB) pada sapi dan kerbau betina produktif

2. Pelaporan Kelahiran

   - Aktivitas : Meningkatkan produktivitas sapi dan kerbau yang menjadi andalan ternak penghasil daging
   - Komponen : Pelayanan Umum kepada peternak

- Sub Komponen : Pelaporan Kelahiran pedet hasil Inseminasi Buatan

➢ Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Sumber Dana, Jumlah Anggaran dan Serapan Anggaran

No.	Program dan Kegiatan	Sumber Dana		Serapan Anggaran
		APBN (Rp)	APBD (Rp)	
1.	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**2.629.590.000**		**2.321.970.000**
	a. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	1. Irigasi Perpipaan	200.000.000		199.800.000
	2. Embung Pertanian	120.000.000		120.000.000
	3. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	127.000.000		126.250.000
	4. Jaringan Irigasi Tersier	1.725.000.000		1.725.000.000
	b. Pengelolaan Sisitem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			
	1. Bimtek, Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	15.000.000		14.850.000
	c. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	1. E-RDKK untuk Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi	240.555.000		238.635.000
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	1. Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	181.850.000		181.750.000
	e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	1. Asuransi Pertanian	20.185.000		15.685.000
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**77.410.000**		**77.410.000**
	a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	1. Layanan Umum	77.410.000		71.410.000
3.	**Program Peningkatan Produksi Sapi Dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)**	**1.022.865.000**		**939.195.000**
	Kegiatan SIKOMANDAN			

No.	Program dan Kegiatan	Sumber Dana		Serapan Anggaran
		APBN (Rp)	APBD (Rp)	
	1. Inseminasi Buatan (IB)	798.810.000		798.330.000
	2. Pelaporan Kelahiran	224.055.000		140.865.000
	TOTAL	**3.729.865.000**		**3.632.575.000**

Keterangan :

* Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan adalah bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk (Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur)

b. Sumber Dana

Sumber dana dari APBN Pusat dan Provinsi

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Pelaksana program kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dalam DIPA pada butir a diatas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Bidang Perlindungan Pertanian.

d. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan tugas pembantuan, secara umum cukup representatif.

3.2.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

a. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Keterbatasan waktu dalam penyusunan RAB sehingga penyusunan RAB dan gambar dibuat belum sesuai dengan kondisi awal/existing.

2. Solusi

Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dibuat seragam tiap unit titik lokasi kegiatan sedangkan anggaran yang disediakan ditiap paket nominalnya sama. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan dibuat ulang Rancangan Anggaran Belanja dan gambar pelaksanaanya.

3.3 Tugas Pembantuan Dinas Perhubungan

3.3.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

1. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jatim dan Kepolisian Resort Nganjuk.

   a) Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

   Kerja sama mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jatim dan Kepolisian Resort Nganjuk

   Nomor : 188/560/411.314/2022

   Nomor : 188/98/202.2/2022

   Nomor : 01/HUK.8.1.1/2022/POLRES

   tentang Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Secara Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Nganjuk.

   b) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

   Adapun kerjasama tersebut mengatur beberapa hal diantaranya Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut :

   ✓ Pemerintah Kabupaten Nganjuk :

   - Menyediakan, menerbitkan, dan menyerahkan stiker dan/atau bukti lain yang dipersamakan dan bernomor seri, untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan.
   - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pemungutan retribusi parkir secara berlangganan.
   - Bersama Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jatim melakukan koordinasi untuk menentukan target penerimaan retribusi parkir secara berlangganan.
   - Menyelenggarakan perparkiran dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan di kawasan parkir tepi jalan umum.
   - Memberikan bagi hasil pemungutan parkir berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jatim dan Kepolisian Resort Nganjuk.

✓ Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jatim :

- Memfasilitasi pemungutan retribusi parkir secara berlangganan dengan memanfaatkan basis data (data base) pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk serta jaringan komunikasi data.
- Menerima pembayaran, merekap, dan menyetor hasil pemungutan retribusi parkir secara berlangganan secara bruto setiap hari kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Melakukan sosialisasi Bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kepolisian Resort Nganjuk kepada masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor tentang Parkir Secara Berlangganan.

✓ Kepolisian Resort Nganjuk :

- Membantu kelancaran kegiatan fasilitasi pemungutan retribusi parkir secara berlangganan pada Kantor Bersama SAMSAT nganjuk.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kawasan area parkir secara berlangganan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Parkir Secara Berlangganan secara tertib, lancar dan aman.
- Menerima dan menyelesaikan pengaduan dari Wajib Retribusi terhadap pelayanan parkir secara berlangganan di Kabupaten Nganjuk

c) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Nganjuk. Realisasi PAD Parkir Berlangganan Dinas Perhubungan Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut :

Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
6.745.766.409	6.598.773.500	6.879.237.389	7.626.177.090	6.130.115.000	7.456.528.535	7.480.316.700

Target parkir berlangganan tahun 2022 sebesar Rp. 7,421,400,800,-, sehingga capaian kinerjanya 100.79%.

d) Permasalahan dan Solusi

Tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama pemungutan retribusi parkir berlangganan.

2. Koordinasi dengan Kepolisian Resort Nganjuk dan KODIM 0810

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan Polres dan Kodim 0810 dalam rangka pengamanan dan ketertiban lalu lintas, dalam hal :
   - Penentuan lokasi dan waktu pengamanan
   - Jumlah personel yang diperlukan
   - Akomodasi yang diperlukan
b. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan ketertiban lalu lintas dalam rangka Hari Besar Keagamaan, HUT Proklamasi, HUT Kab. Nganjuk, dan kegiatan tertentu sesuai dengan hasil koordinasi.
c. Mengadakan monitoring selama kegiatan berlangsung.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, antara lain :

- Mengadakan pengamanan dan ketertiban lalu lintas dalam rangka HUT Proklamasi, HUT Kab. Nganjuk, Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan kegiatan tertentu yang meliputi Kirab Adipura, Jalan Sehat, dll.
- Mengadakan monitoring pada posko pengamanan dan ketertiban lalu lintas.

c. Permasalahan dan solusi

Tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lalu lintas yang telah dilaksanakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
		Ketenteraman dan Ketertiban)	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

Masing-masing urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut di atas, dinilai berdasarkan kategori indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kategori Indeks Pencapaian SPM

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Adapun capaian kinerja penerapan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang diwajibkan untuk difasilitasi pelayanan dasarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 3 (tiga) jenis, yakni :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS) merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.

Dengan adanya optimalisasi bidang pendidikan melalui implementasi standar pelayanan minimal, maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk. Hal ini cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tertuang di dalam Tricita Bhakti dan salah

satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala terus melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Ketiga jenjang pendidikan tersebut memiliki pengukuran capaian yang sama yaitu didasarkan pada pengukuran angka partisipasi murni pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan tertentu diasumsikan sebagai tolok ukur yang diyakini mampu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memberikan fasilitas layanan pendidikan bagi penduduknya. Namun perlu dipahami bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemenuhan tersebut belum mampu dilaksanakan secara menyeluruh karena adanya beberapa hambatan yang diantaranya dukungan anggaran dan validitas data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di satuan pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2022. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang optimal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Mininal Pendidikan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh satuan pendidikan dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi bagi peserta didik. Ketika seluruh pencapaian 8 standar nasional pendidikan, perlengkapan dasar serta pembiayaan pendidikan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka optimalisasi terhadap capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.1.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang pendidikan. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang pendidikan hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan. Secara keseluruhan, capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2022, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan anak usia dini dapat tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan pada perhitungan prosentase antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini (TK dan RA) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Nganjuk. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.028}{30.265} \times 100\%$$

$$= 99{,}22\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat angka partisipasi murni pada anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini di satuan TK dan RA telah terealisasi sebesar 99,22% dan belum mencapai target 100%, karena tidak secara keseluruhan anak pada usia 5-6 tahun bersekolah pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal. Hal ini disebabkan adanya selisih sebanyak 237 peserta didik berusia 6 tahun yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar atas dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa salah satu persyaratan calon peserta didik baru yang akan bersekolah pada jenjang sekolah dasar paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Bahkan, calon peserta didik usia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sudah diperbolehkan untuk mendaftar pada Sekolah Dasar dengan prasyarat memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa serta kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 97,73%, maka pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan terhadap angka partisipasi murni PAUD sebesar 1,49%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya dalam memberikan fasilitas pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada para peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar menjadi tujuan ketuntasan penduduk usia sekolah pada rentang usia 7-15 tahun untuk bersekolah. Hal ini sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dalam meningkatkan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Berdasarkan pada hasil perhitungan standar pelayanan minimal, jenjang pendidikan dasar telah terealisasi sebesar 89,61% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{APM Dikdas} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun pada jenjang Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{137.651}{153.615} \times 100\%$$

$$= 89{,}61\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi anak rentang usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar adalah sebesar 89,61%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa anak usia 7-15 tahun telah mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan dasar dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 83,73%, maka pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan terhadap angka partisipasi murni Pendidikan Dasar sebesar 5,88%.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jenjang pendidikan non formal yang dimanfaatkan beberapa anak usia sekolah pada rentang usia 7-18 tahun sebagai alternatif jalur pendidikan non formal ketika terdapat peserta didik yang

belum mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan formal. Jalur pendidikan kesetaraan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan capaian angka partisipasi murni di Kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui realisasi standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{APM P. Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}} \times 100\%$$

$$= \frac{323}{323} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi murni pendidikan kesetaraan telah tercapai sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan atas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk melalui pemberian fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas sehingga menurunkan angka putus sekolah dan berdampak pada tingkat partisipasi murni pada pendidikan kesetaraan yang mengalami penurunan pula.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 :

Tabel 4.4
Capaian SPM Urusan Pendidikan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**96.72%**
1 .	***Pendidikan Dasar Usia Dini***				***98.89%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**79.37%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	30,265	30,028	237	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.52%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase capaian mutu 100%**
	1. Buku gambar	9,180	9,180	0	100.00%
	2. Alat mewarnai	1,530	1,530	0	100.00%
	3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	21,417	21,417	0	100.00%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	787	787	0	100.00%
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,742	2,413	329	88.00%
	JUMLAH	**35,656**	**35,327**	**329**	**488.00%**
2 .	***Pendidikan Dasar***				***91.27%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.69%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	153,615	137,651	15,964	90%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.59%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**97.94%**
	Buku teks pelajaran	153,615	137,651	15,964	89.61%
	Perlengkapan belajar	275,302	275,302	0	100.00%
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	904	860	44	95.13%
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	1,848	1,848	0	100.00%
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	6,848	6,848	0	100.00%
	Penyediaan biaya personil peserta didik	153,615	153,615	0	100.00%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	10,959	10,959	0	100.00%
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	904	893	11	98.78%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	JUMLAH	**603,995**	**587,976**	**16,019**	**783.52%**
3 .	***Pendidikan Kesetaraan***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	323	323	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	100.00%
	1. Modul belajar	323	323	0	100.00%
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	37	37	0	100.00%
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	323	323	0	100.00%
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	181	181	0	100.00%
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13	13	0	100.00%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	45	45	0	100.00%
	7. Perlengkapan belajar	355	355	0	100.00%
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	11	11	0	100.00%
	JUMLAH	**1,288**	**1,288**	**0**	**800.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan pada tabel pencapaian di masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada seluruh jenjang pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan komponen pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan telah secara keseluruhan terpenuhi dan terfasilitasi secara memadai dan optimal. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2022	2,430,988,418,747
2	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan	989,191,977,994
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Dinas Pendidikan	989,191,977,994
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil dan Lain-Lain)	107,416,159,403
	a. APBN	0
	b. DAK	91,888,479,403
	c. Lainya	15,527,680,000

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2022 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
01,01,02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**252.313.041.605**	**235.087.694.914**	**93,17**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**135.355.520.505**	**127.018.506.773**	**93,84**
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.487.946.000	1.283.628.600	86,27
1.01.02.2.01.03	Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu yang dibangun	205.000.000	205.000.000	100,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	380.550.000	375.000.000	98,54
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.587.920.000	2.558.233.300	98,85
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.454.102.000	2.326.695.960	94,81
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.504.463.000	14.118.355.420	97,34
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.470.279.000	1.446.754.000	98,40
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	266.292.500	259.000.000	97,26
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.037.192.500	1.977.473.750	97,07
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	389.830.000	382.000.000	97,99
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	25.000.000	25.000.000	100,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	16.534.915.000	16.327.550.000	98,75

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.255.350	8.753.750	21,75
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.190.833.300	3.697.276.550	88,22
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	544.688.600	484.521.650	88,95
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	380.898.100	246.194.250	64,64
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.209.490.500	71.134.799.112	93,34
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.020.529.655	9.542.270.431	86,59
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	415.335.000	102.500.000	24,68
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	210.000.000	210.000.000	100,00
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**94.264.314.400**	**85.693.768.632**	**90,91**
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	240.200.000	206.595.550	86,01
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	330.270.000	330.000.000	99,92
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.220.500.000	1.111.022.250	91,03
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	365.000.000	365.000.000	100,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.206.607.000	3.002.727.820	93,64
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19.137.835.500	19.072.829.100	99,66
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	2.504.632.500	2.497.450.000	99,71
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	590.292.500	583.000.000	98,76
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.959.830.000	2.952.622.500	99,76
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	7.221.982.500	7.197.966.000	99,67
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.371.257.000	5.355.050.500	99,70
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	873.070.000	860.243.500	98,53
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	449.091.350	408.623.150	90,99
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.882.787.600	1.840.329.100	97,74
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	545.717.200	512.029.900	93,83
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	278.800.000	238.342.220	85,49
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	41.035.879.500	33.862.895.892	82,52
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.101.751.750	2.360.618.650	76,11
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	2.516.517.500	2.509.997.500	99,74
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	432.292.500	426.425.000	98,64
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**21.647.548.550**	**21.395.147.519**	**98,83**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	284.419.000	283.613.750	99,72
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	294.340.000	294.331.600	100,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	74.110.000	74.110.000	100,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	25.000.000	23.965.000	95,86
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	292.999.550	257.471.500	87,87
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	260.000.000	223.392.450	85,92
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.416.680.000	20.238.263.219	99,13
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.045.658.150**	**980.271.990**	**93,75**
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	144.380.000	98.582.790	68,28
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.578.150	0	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	881.700.000	881.689.200	100,00
01.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**35.535.581.600**	**32.796.297.760**	**92,29**
01.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**35.535.581.600**	**32.796.297.760**	**92,29**
01.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.849.859.200	32.341.647.700	92,80
01.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	685.722.400	454.650.060	66,30

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Berikut ini jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.7
Jumlah ASN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

No.	Kepala Dinas/Bidang/Sub Bagian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	18
3	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (AUD) dan Pendidikan Non Formal	8

No.	Kepala Dinas/Bidang/Sub Bagian	Jumlah Pegawai (Orang)
4	Bidang Sekolah Dasar	8
5	Bidang Sekolah Menengah Pertama	9
6	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	12
7	Pengawas TK	17
8	Pengawas SD	52
9	Pengawas SMP	5
	Jumlah Keseluruhan	**130**

Adapun jumlah pegawai guru yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di satuan pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Guru di Satuan Pendidikan Per Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP
1	Kec. Nganjuk	141	55	10	0	1	12	422	368
2	Kec. Tanjunganom	116	63	0	4	5	0	467	200
3	Kec. Kertosono	92	40	0	0	0	0	268	214
4	Kec. Loceret	105	51	0	1	0	0	355	113
5	Kec. Rejoso	76	60	1	0	0	0	307	117
6	Kec. Prambon	75	31	0	8	0	0	286	110
7	Kec. Ngronggot	74	43	0	0	5	0	272	105
8	Kec. Bagor	102	21	0	4	0	0	256	59
9	Kec. Gondang	73	23	0	3	0	0	255	101
10	Kec. Pace	65	39	0	7	0	0	278	93
11	Kec. Berbek	69	19	0	0	0	0	280	98
12	Kec. Baron	58	31	3	0	15	0	232	94
13	Kec. Patianrowo	58	39	0	0	0	0	199	76
14	Kec. Sukomoro	58	22	0	1	0	0	213	60
15	Kec. Lengkong	39	25	0	0	17	0	161	71
16	Kec. Sawahan	48	34	0	0	0	0	202	72
17	Kec. Ngetos	64	24	0	0	0	0	187	52
18	Kec. Wilangan	29	18	0	0	0	0	142	41
19	Kec. Jatikalen	19	20	0	1	5	0	117	30
20	Kec. Ngluyu	14	3	0	0	0	0	84	22
	TOTAL	**1375**	**661**	**14**	**29**	**48**	**12**	**4983**	**2096**

Sumber data : Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek Per Semester 2022/2023 Genap

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Ruang kelas belum memadai;

2. Pemenuhan perlengkapan dan biaya personil bagi Peserta didik belum menyeluruh;
3. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan belum merata;
4. Kuantitas pengawas/penilik sekolah terbatas;
5. Kuantitas Kepala Sekolah dan guru terbatas;
6. Belum seluruh satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka/sebagai sekolah penggerak;
7. Belum optimalnya satuan pendidikan PAUD berstatus negeri;
8. Kompentensi Guru belum sesuai dengan standarisasi pendidikan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1. Menyediakan ruang kelas yang memadai;
2. Menyediakan perlengkapan dan biaya personil bagi Peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan;
3. Pemetaan dan Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Mengangkat pengawas sekolah;
5. Mengangkat Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah;
6. Melaksanakan sosialisasi kurikulum merdeka/sebagai sekolah penggerak;
7. Mendirikan satuan pendidikan PAUD negeri;
8. Melaksanakan Peningkatan Kompentensi Guru melalui Diklat Manajerial.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

1) Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
2) Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan standarisasi pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan kesehatan. Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada seluruh penduduk di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tertuang di dalam Tricita Bhakti dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan tersebut bukan hal yang mudah, namun memerlukan perumusan secara lebih terstruktur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada setiap hasil program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.838}{15.519} \times 100\%$$

$$= 76{,}28\%$$

Pada tahun 2022, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 11.838 orang, sedangkan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Nganjuk sebanyak 15.519 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 76,28%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.567}{14.812} \times 100\%$$

$$= 84{,}84\%$$

Pada tahun 2022, jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 12.567 orang sedangkan jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk sebanyak 14.812 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 84,84%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada bayi usia 0-28 hari di wilayah

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.271}{14.108} \times 100\%$$

$$= 86{,}97\%$$

Pada tahun 2022, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 12.271 bayi sedangkan jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk sebanyak 14.108 bayi. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 86,97%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada balita di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran balita di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{46.619}{57.983} \times 100\%$$

$$= 80{,}40\%$$

Pada tahun 2022, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 46.619 balita sedangkan jumlah sasaran balita di Kabupaten Nganjuk sebanyak 57.983 balita. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Nganjuk mencapai 80,40%.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

$$= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{99.500}{128.661} \times 100\%$$

$$= 77{,}33\%$$

Pada tahun 2022, jumlah anak usia pendididkan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 99.500 anak sedangkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 128.661 anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk mencapai 77,33%.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada penduduk yang berusia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dilaksanakan melalui edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia produktif di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{373.342}{661.392} \times 100\%$$

$$= 56,44\%$$

Untuk capaian tahun 2022, jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 373.342 jiwa, sedangkan jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Nganjuk sebanyak 661.392 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk usia produktif mencapai 56,44%.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia lanjut di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{101.599}{184.629} \times 100\%$$

$$= 55,02\%$$

Pada tahun 2022, jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 101.599 jiwa sedangkan jumlah sasaran warga lansia di Kabupaten Nganjuk sebanyak 184.629 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Nganjuk mencapai 55,02%.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{90.038}{381.081} \times 100\%$$

$$= 23{,}62\%$$

Pada tahun 2022, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tercatat sebanyak 90.038 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 381.081 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi mencapai 23,62%.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{22.018}{22.018} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 22.018 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita DM di Kabupaten Nganjuk sebanyak 22.018 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus mencapai 100%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.018}{2.018} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah sebanyak 2.018 orang, sedangkan jumlah penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 2.018 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ berat mencapai 100%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Seluruh orang terduga penderita TBC dilakukan pemeriksaan/test lebih lanjut untuk memastikan gejala yang diderita adalah benar-benar TBC. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan

minimal kepada orang terduga penderita tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.501}{14.180} \times 100\%$$

$$= 31{,}74\%$$

Pada tahun 2022, jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 4.501 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC di Kabupaten sebanyak 14.180 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai 31,74%.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*) yang meliputi: (1) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan (2) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang memiliki risiko terinfeksi virus HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{16.679}{16.679} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari 16.679 orang yang beresiko terinfeksi HIV, sebanyak 16.679 orang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Capaian SPM Urusan Kesehatan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PRATAMA**			**74.07%**
1.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil***				***77.11%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**61.02%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	15,519	11,838	3,681	76%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**16.08%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**80.42%**
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit)	5,000	773	4,227	15.46%
	2. Tablet tambah darah	742,622	604,335	138,287	81.38%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	15,519	12,754	2,765	82.18%
	4. Kartu ibu/rekam medis ibu	15,519	12,754	2,765	82.18%
	5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	15,519	12,754	2,765	82.18%
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	266	266	0	100.00%
	7. Bidan	694	694	0	100.00%
	8. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	JUMLAH	**796,173**	**645,364**	**150,809**	**643.38%**
2.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin***				***85.29%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**67.87%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	14,812	12,567	2,245	85%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.41%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**87.06%**
	1. Formulir Partograf	14,812	12,567	2,245	84.84%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	14,812	12,567	2,245	84.84%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8,581	4,521	4,060	52.69%
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	266	266	0	100.00%
	5. Bidan	694	694	0	100.00%
	6. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	JUMLAH	**40,199**	**31,649**	**8,550**	**522.37%**
3.	***Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir***				***87.43%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**69.58%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	14,108	12,271	1,837	87%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.85%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**89.25%**
	1. Vaksin Hepatitis B0	14,108	12,271	1,837	86.98%
	2. Vitamin K1 injeksi	14,108	12,271	1,837	86.98%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	7,054	6,134	920	86.96%
	4. Formulir bayi baru lahir	14,108	12,271	1,837	86.98%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	14,108	12,271	1,837	86.98%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7,936	5,425	2,511	68.36%
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	264	264	0	100.00%
	8. Bidan	694	694	0	100.00%
	9. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	JUMLAH	**73,414**	**62,635**	**10,779**	**803.24%**
4.	***Pelayanan Kesehatan Balita***				***81.35%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**64.32%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	57,983	46,619	11,364	80%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.03%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**85.14%**
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	57,982	46,619	11,363	80.40%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	57,982	46,619	11,363	80.40%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	19,131	10,336	8,795	54.03%
	4. Vitamin A Biru	14,950	14,950	0	100.00%
	5. Vitamin A Merah	73,500	73,500	0	100.00%
	6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	16,600	14,926	1,674	89.92%
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	62,453	56,816	5,637	90.97%
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	96,514	57,982	38,532	60.08%
	9. Peralatan Anafilaktik	249	53	196	21.29%
	10. Bidan	694	694	0	100.00%
	11. Dokter	252	252	0	100.00%
	12. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	13. Ahli Gizi	48	48	0	100.00%
	14. Guru PAUD	518	518	0	100.00%
	15. Kader Kesehatan	3,449	3,449	0	100.00%
	JUMLAH	**405,356**	**327,796**	**77,560**	**1277.09%**
5.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar***				***75.73%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**61.87%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	128,661	99,500	29,161	77%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**13.86%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**69.29%**
	1. Buku raport kesehatanku	128,661	2,420	126,241	1.88%
	2. Buku pemantauan kesehatan	128,661	2,255	126,406	1.75%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	128,661	10,035	118,626	7.80%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	20	20	0	100.00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	20	4	16	20.00%
	6. Dokter/Dokter gigi	279	279	0	100.00%
	7. Bidan	694	694	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	9. Ahli Gizi	48	48	0	100.00%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	30	0	100.00%
	11. Guru	751	751	0	100.00%
	12. Kader Kesehatan	1,634	1,634	0	100.00%
	JUMLAH	**390,493**	**19,204**	**371,289**	**831.43%**
6.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif***				***63.03%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**45.16%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	661,392	373,342	288,050	56%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.88%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**89.38%**
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5,000	221	4,779	4.42%
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	846,000	846,000	0	100.00%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20	0	100.00%
	4. Dokter	252	252	0	100.00%
	5. Bidan	694	694	0	100.00%
	6. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	7. Ahli Gizi	48	48	0	100.00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	30	0	100.00%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	78	78	0	100.00%
	JUMLAH	**853,156**	**848,377**	**4,779**	**804.42%**
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				**58.93%**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**44.02%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	184,629	101,599	83,030	55%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**14.91%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**74.54%**
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	184,629	101,599	83,030	55.03%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	184,629	14,071	170,558	7.62%
	3. Buku kesehatan lansia	184,629	15,116	169,513	8.19%
	4. Dokter	252	252	0	100.00%
	5. Bidan	694	694	0	100.00%
	6. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	7. Ahli Gizi	48	48	0	100.00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	30	0	100.00%
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	361	361	0	100.00%
	JUMLAH	**556,306**	**133,205**	**423,101**	**670.84%**
8.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi***				***34.45%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**18.90%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	381,081	90,038	291,043	24%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**15.55%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**77.75%**
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5,000	327	4,673	6.54%
	2. Tensimeter	284	107	177	37.68%
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20	0	100.00%
	4. Dokter	252	252	0	100.00%
	5. Bidan	694	694	0	100.00%
	6. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	30	0	100.00%
	JUMLAH	**7,314**	**2,464**	**4,850**	**544.22%**
9.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus***				***97.66%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	22,018	22,018	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.66%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**88.32%**
	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	846,000	846,000	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20	0	100.00%
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5,000	327	4,673	6.54%
	4. Dokter	252	252	0	100.00%
	5. Bidan	694	694	0	100.00%
	6. Perawat	1,034	1,034	0	100.00%
	7. Ahli Gizi	48	48	0	100.00%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	30	30	0	100.00%
	JUMLAH	**853,078**	**848,405**	**4,673**	**706.54%**
10.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat***				***88.70%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	2,018	2,018	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**8.70%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**43.51%**
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	40	7	33	17.50%
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	20	0	20	0%
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	20	20	0	100.00%
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	5,000	2	4,998	0.04%
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	40	40	0	100.00%
	JUMLAH	**5,120**	**69**	**5,051**	**217.54%**
11.	***Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis***				***41.15%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**25.39%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	14,180	4,501	9,679	32%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**15.75%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**78.76%**
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	14,180	222	13,958	1.57%
	2. Reagen Zn TB	55	55	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	893,340	95,857	797,483	10.73%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	14,180	13,577	603	95.75%
	5. Catridge tes cepat molekuler	14,180	2,250	11,930	15.87%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	14,180	14,180	0	100.00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	13	13	0	100.00%
	8. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	35	35	0	100.00%
	9. Perawat	25	25	0	100.00%
	10. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	25	25	0	100.00%
	11. Penata Rontgen	5	5	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	25	25	0	100.00%
	13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	284	284	0	100.00%
	JUMLAH	**950,527**	**126,553**	**823,974**	**1023.92%**
12.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)***				***98.03%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	16,679	16,679	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**18.03%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**90.16%**
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	16,694	267	16,427	1.60%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	29,975	29,975	0	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	50,082	50,082	0	100.00%
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	21,055	21,055	0	100.00%
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	30	30	0	100.00%
	6. Perawat	25	25	0	100.00%
	7. Bidan	25	25	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	25	25	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	25	25	0	100.00%
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	284	284	0	100.00%
	JUMLAH	**118,220**	**101,793**	**16,427**	**901.60%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
1	Alokasi APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022	2,430,988,418,747
2	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan	185,509,208,800
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Dinas Kesehatan	4,497,764,855
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-lain)	346,829,000
	a. APBN	-
	b. DAK	346,829,000
	c. Lainnya	-

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4,222,520,278**	**3,485,601,676**	**82.55**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25,000,000**	**16,316,875**	**65.27**
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	16,316,875	65.27
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**548,100,000**	**368,477,850**	**67.23**
	Pengadaan pakaian dinas besertaatribut kelengkapannya	188,700,000	177,990,000	94.32
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	359,400,000	190,487,850	53.00
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**647,616,578**	**505,132,466**	**78.00**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,650,500	97.67
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	13,948,500	92.99
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237,636,578	220,387,925	92.74
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80,000,000	30,934,448	38.67
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,980,000	225,211,093	75.08
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,166,603,700**	**1,074,635,317**	**92.12**
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326,000,000	295,501,401	90.64
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	209,776,700	200,056,221	95.37
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	578,327,000	546,101,260	94.43
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ bangunan lainnya	52,500,000	32,976,435	62.81
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**629,200,000**	**428,294,218**	**68.07**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	2,516,000	62.90
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577,200,000	378,290,218	65.54
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,000,000	47,488,000	98.93
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,206,000,000**	**1,092,744,950**	**90.61**
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000	424,873,687	84.97
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000	14,590,000	97.27
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	676,000,000	640,577,263	94.76
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	12,704,000	84.69
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**149,502,470,787**	**82,280,801,783**	**55.04**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**41,764,910,314**	**33,458,802,313**	**80.11**
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	7,633,205,876	7,347,761,912	96.26

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	1,775,000,000	1,467,829,780	82.69
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	519,494,000	411,477,000	79.21
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1,201,278,602	811,668,701	67.57
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	676,143,000	624,252,595	92.33
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	357,400,000	337,736,773	94.50
1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,756,000,000	2,353,698,559	85.40
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,732,283,835	6,883,172,646	89.02
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	11,064,978,066	6,873,859,019	62.12
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,911,508,235	4,911,471,668	83.08
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	948,599,700	935,832,614	98.65
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25,000,000	482,500	1.93
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.	121,080,000	59,682,546	49.29
1.02.02.2.01.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	1,042,939,000	439,876,000	42.18
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**106,624,560,473**	**47,941,088,508**	**44.96**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,646,303,980	971,486,123	59.01
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	307,354,200	161,355,650	52.50
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	101,930,800	41,329,825	40.55
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	442,772,700	161,656,400	36.51
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	763,972,225	402,339,020	52.66
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	199,147,500	171,279,850	86.01
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	137,268,400	96,865,750	70.57
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	97,650,000	75,589,000	77.41
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	518,466,000	503,516,000	97.12
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	715,396,750	430,014,000	60.11
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,498,192,300	1,308,870,057	52.39
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	617,881,900	315,923,480	51.13
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	651,838,400	269,902,280	41.41
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,436,342,275	867,446,700	60.39

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	75,000,000	52,188,700	69.58
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122,379,735	68,267,400	55.78
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50,000,000	45,696,700	91.39
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,906,475,350	1,064,201,300	55.82
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73,077,813,975	24,358,260,126	33.33
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	25,000,000	16,880,000	67.52
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	150,000,000	94,075,052	62.72
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19,523,888,133	16,033,176,215	82.12
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	408,868,250	332,064,690	81.22
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	942,800,000	0	0.00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	85,000,000	65,200,250	76.71
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon Wabah Puskesmas	122,817,600	33,503,940	27.28
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**226,000,000**	**101,899,930**	**45.09**
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	126,000,000	68,033,430	53.99
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000,000	33,866,500	33.87
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**887,000,000**	**779,011,032**	**87.83**
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	425,000,000	357,229,500	84.05
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	462,000,000	421,781,532	91.29
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**5,610,440,000**	**1,189,132,969**	**21.20**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**20,000,000**	**9,311,550**	**46.56**
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20,000,000	9,311,550	46.56
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**5,502,940,000**	**1,108,090,639**	**20.14**
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart	5,432,940,000	1,092,556,289	20.11
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	70,000,000	15,534,350	22.19
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**87,500,000**	**71,730,780**	**81.98**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87,500,000	71,730,780	81.98
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**515,554,000**	**271,000,953**	**52.56**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**69,035,000**	**52,575,800**	**76.16**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	55,505,000	45,199,900	81.43
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13,530,000	7,375,900	54.52
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**173,662,000**	**101,951,356**	**58.71**
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	173,662,000	101,951,356	58.71
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**120,000,000**	**42,281,900**	**35.23**
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	120,000,000	42,281,900	35.23
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**152,857,000**	**74,191,897**	**48.54**
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	152,857,000	74,191,897	48.54
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1,727,883,150**	**1,308,481,456**	**75.73**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat**	**715,557,850**	**500,852,596**	**69.99**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	715,557,850	500,852,596	69.99
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**250,000,000**	**141,396,110**	**56.56**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250,000,000	141,396,110	56.56
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**762,325,300**	**666,232,750**	**87.39**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	762,325,300	666,232,750	87.39

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki pegawai yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kertosono, Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pegawai sebagaimana dimaksud di atas berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Rincian tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nganjuk

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		JENIS SDM KESEHATAN																				
		FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KETERSEDIAAN (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PARU	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	DOKTER SPESIALIS GIGI	PERAWAT	BIDAN	KESEHATAN MASYARAKAT	KESLING	GIZI	LABORAT	TENAGA MEDIK LAINNYA	KETERAPIAN FISIK	KETEKNISIAN MEDIS	KEFARMASIAN	APOTEKER	PENATA RONTGEN
1	2	3	4	5																				
1	BAGOR	Puskesmas Bagor	1	2							2			10	32	1	1	1	2	2		2	1		
2	BARON	Puskesmas Baron	1	6							5	1		19	21	1	2	1	1	1		1	2		
3	BERBEK	Puskesmas Berbek	1	3							2	1		19	35	1	2		2	2		4	3	1	
4	GONDANG	Puskesmas Gondang	1	4							3	1		17	28	2	1	1	2	2		3	1	1	
5	JATIKALEN	Puskesmas Jatikalen	1	2							2			7	14		1	1	1	1		1	2	1	
6	KERTOSONO	Puskesmas Kertosono	1	5							3	2		12	22	2	2	2	2	2		1	1	1	
7	KERTOSONO	RSD Kertosono	1	50	26	3	3	2	1	1	20	3	1	190	52	1	5	8	13	27	3	14	11	4	10
8	LENGKONG	Puskesmas Lengkong	1	4							3	1		19	19	1	1	1	1	1		3	1	1	
9	LOCERET	Puskesmas Loceret	1	3							2	1		20	34		2	1	2	2		1	1		
10	LOCERET	RSIA Al Subtin	1	11	5	2	1				5	1		25	15		1	1		4		2		2	
11	NGANJUK	Puskesmas Nganjuk	1	2							1	1		8	23	1	2	1	2	4		4	2	1	
12	NGANJUK	RSD Nganjuk	1	56	32	3	3	4	1	1	20	2	2	300	47	4	4	13		36	4	17	22	10	12
13	NGANJUK	RS Bhayangkara	1	33	21	3	3	2			10	1	1	110	31		1	1		6		6	4	3	2
14	NGANJUK	RSI Aisyiyah	1	29	19	3	2	3	1		9	1		82	24		1	2		11	1	2	8	3	2
15	NGETOS	Puskesmas Ngetos	1	4							3	1		12	17	2	1	1	1			1	1	1	
16	NGLUYU	Puskesmas Ngluyu	1	5							4	1		10	15	1	1	3	2	2		2	2	1	
17	NGRONGGOT	Puskesmas Ngronggot	1	4							3	1		25	27		1	1	1	1		3			
18	PACE	Puskesmas Pace	1	2							1	1		14	30	1	2	1	1	1		1	1	1	
19	PATIANROWO	Puskesmas Patianrowo	1	5							4	1		13	28	1	1	1	3	3		1	1		
20	PRAMBON	Puskesmas Prambon	1	4							3	1		21	44	3	1	1	1	1		3	1	1	

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		JENIS SDM KESEHATAN																				
		FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KETERSEDIAAN (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PARU	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	DOKTER SPESIALIS GIGI	PERAWAT	BIDAN	KESEHATAN MASYARAKAT	KESLING	GIZI	LABORAT	TENAGA MEDIK LAINNYA	KETERAPIAN FISIK	KETEKNISIAN MEDIS	KEFARMASIAN	APOTEKER	PENATA RONTGEN
1	2	3	4	5																				
21	REJOSO	Puskesmas Rejoso	1	4							3	1		33	37		2	1	2	2		3	4		
22	SAWAHAN	Puskesmas Sawahan	1	4							3	1		14	19	2	2	1	1	1		1	1	1	
23	SUKOMORO	Puskesmas Sukomoro	1	3							2	1		18	23	2	2	2	1	1		2	1		
24	TANJUNGANOM	Puskesmas Tanjunganom	1	3							2	1		18	37	2	1	1	2	2		2	1		
25	WILANGAN	Puskesmas Wilangan	1	4							3	1		18	20	2	1	1	1	1		1		1	
	TOTAL			**252**	**103**	**14**	**12**	**11**	**3**	**2**	**118**	**27**	**4**	**1034**	**694**	**30**	**41**	**48**	**44**	**116**	**8**	**81**	**72**	**34**	**26**

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Tahun 2022 adalah 11.838 orang dengan sasaran ibu hamil 15.519 orang sehingga prosentase capaian sebesar 76,28%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Sasaran proyeksi terlalu tinggi
b. Sebagian ibu hamil datang berkunjung/diperiksa pada trimester 2 dan 3 sehingga tidak memenuhi standar K4 (K1 akses tinggi, K1 murni rendah)
c. Kurangnya evaluasi pencatatan dan pelaporan karena minimnya kuantitas SDM dan tingginya beban kerja

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di wilayah Kabupaten Nganjuk agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100% antara lain :

a. Melakukan update data sasaran riil by name by address
b. Meningkatkan kualitas penggunaan buku KIA untuk melengkapi informasi yang didapatkan oleh ibu hamil dan petugas kesehatan
c. Review pelaksanaan pencatatan kohort dan pelaporan PWS KIA yang benar secara berkala dan diintegrasikan dalam monev KIA
d. Validasi pencatatan dan pelaporan KIA
e. Melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk memberikan informasi kepada ibu hamil agar memeriksakan diri sedini mungkin dan teratur ke fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar Tahun 2022 adalah 12.567 orang dengan sasaran ibu bersalin 14.812 orang sehingga prosentase capaian sebesar 84,84%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Sasaran proyeksi terlalu tinggi
b. Ada sebagian ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten Nganjuk, misalnya ibu bersalin yang melahirkan di daerah orang tua yang ada di luar kabupaten Nganjuk.

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah kurangnya cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di wilayah Kabupaten Nganjuk agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin mencapai 100% antara lain:

a. Melakukan update data sasaran riil by name by address
b. Menyediakan rumah tunggu kelahiran dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada kegiatan Jaminan Persalinan untuk mendekatkan akses ibu hamil dan bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan
c. Meningkatkan kualitas penggunaan buku KIA untuk melengkapi informasi yang didapatkan oleh ibu hamil
d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya persalinan dilakukan di fasilitas pelayan kesehatan dengan melibatkan peran dari lintas program dan lintas sektor.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar Tahun 2022 sebanyak 12.271 bayi dengan jumlah sasaran bayi baru lahir 14.108 orang sehingga prosentase capaian sebesar 86,98%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Sasaran proyeksi terlalu tinggi
b. Masih kurangnya kesadaran ibu nifas untuk berkunjung ke pelayanan kesehatan dengan berbagai alasan diantaranya kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya kunjungan neonatal, keengganan membawa anak yang masih terlalu kecil ke fasilitas pelayanan kesehatan

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah kurangnya cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Nganjuk agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai 100% antara lain:

a. Bidan wilayah melakukan kunjungan rumah bagi bayi yang tidak melakukan kunjungan neonatal
b. Meningkatkan kualitas penggunaan buku KIA untuk melengkapi informasi yang didapatkan oleh ibu hamil tentang pentingnya kunjungan neonatal
c. Meningkatkan kerjasama lintas sector,peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar ibu nifas agar mengingatkan tentang pentingnya kunjungan neonatal

4. Pelayanan kesehatan balita

Capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar Tahun 2022 adalah 46.619 orang dengan sasaran balita 57.982 orang sehingga prosentase capaian sebesar 80,40%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Sasaran proyeksi terlalu tinggi
b. Masih kurangnya kesadaran ibu balita akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan anak balita yang ditunjukkan dengan masih adanya ibu yang enggan datang ke Posyandu dengan berbagai alasan pribadi atau anggapan hanya berkunjung ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi sehingga setelah usia pemberian imunisasi berakhir anak tidak dibawa ke Posyandu lagi

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah kurangnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita di wilayah Kabupaten Nganjuk agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan anak balita mencapai 100% antara lain :

a. Menggunakan aplikasi e-PPGBM untuk mengetahui secara update sasaran dan perkembangan anak balita yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk
b. Memberikan dukungan penuh kepada masing-masing Puskesmas untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Posyandu.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar Tahun 2022 adalah 99.500 orang dengan sasaran anak usia pendidikan dasar 128.661 orang sehingga prosentase capaian sebesar 77,34%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Adanya perubahan definisi operasional yang mengharuskan seluruh anak usia pendidikan dasar diskrining
b. Jumlah sasaran kegiatan yang tidak sebanding dengan jumlah dan jadwal petugas kesehatan sehingga kegiatan penjaringan kesehatan baru dilaksanakan pada anak usia sekolah dasar

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mencapai 100% antara lain:

a. Merubah sistem pelaksanaan skrining tidak pada waktu baru masuk tahun ajaran baru tetapi dimulai pada awal tahun dengan mengikuti kalender anggaran

b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan agar memudahkan dan mempercepat pelaporan.

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar Tahun 2022 adalah 373.342 orang dengan sasaran usia produktif 611.392 orang sehingga prosentase capaian sebesar 56,45%. Capaian masih dibawah 100 % dikarenakan :

a. Jumlah sarana yang dimiliki oleh puskesmas untuk pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada
b. Posbindu belum terbentuk disemua desa

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif mencapai 100% antara lain:

a. Mengusulkan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan kesehatan pada usia produktif
b. Revitalisasi posbindu yang ada (jumlah pobindu yang ada sampai dengan saat ini 193 posbindu) dan pembentukkan posbindu didesa yang belum terbentuk posbindu
c. Menambah alokasi anggaran untuk revitalisasi posbindu

7. Pelayanan kesehatan pada lanjut usia

Capaian pelayanan kesehatan pada lanjut usia sesuai standar tahun 2022 adalah 101.599 orang dengan sasaran lanjut usia 184.629 orang sehingga prosentase capaian 55,03%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Sasaran proyeksi terlalu tinggi
b. Jumlah posyandu lansia hanya satu posyandu untuk satu desa sehingga belum bisa menjangkau penduduk lansia secara keseluruhan di wilayah tersebut
c. Kurangnya kesadaran masyarakat yang berusia lanjut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas pelayanan kesehatan

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut mencapai 100% antara lain:

a. Pemberian makanan tambahan bagi lansia dalam bentuk susu dalam rangka meningkatkan cakupan kunjungan Posyandu lansia
b. Pelatihan kader lansia di tingkat puskesmas
c. Pelaksanaan senam lansia secara rutin di beberapa wilayah Puskesmas

d. Peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan lansia melalui pelatihan dan pembinaan
e. Pelaksanaan kunjungan rumah pada lansia resti dan dukungan lintas sektor dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada lansia.

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar Tahun 2022 adalah 90.038 orang dengan sasaran 381.018 (45% x jumlah penduduk diatas 15 tahun) orang sehingga prosentase capaian sebesar 23,63%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan. Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi mencapai 100% yaitu mengusulkan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan pada penderita hipertensi.

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetus melitus

Capaian pelayanan kesehatan penderita diabetus melitus sesuai standar tahun 2022 adalah 22.018 orang dengan sasaran 22.018 orang (2,6% x jumlah penduduk diatas 15 Tahun) sehingga prosentase capaian sebesar 100%.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar tahun 2022 adalah 2.018 orang dengan sasaran 2.018 orang (0,19% x Jumlah Penduduk) sehingga prosentase capaian sebessar 100%.

11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Capaian pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar adalah 4.501 orang dengan sasaran 14.180 orang sehingga prosentase capaian sebesar 31,74%. Capaian ini belum memenuhi target indikator 100% hal ini disebabkan antara lain :

a. Penemuan terduga kasus belum optimal
b. Belum semua kasus dilakukan investigasi kontak karena keterbatasan sdm dan anggaran
c. Masih ada pasien yang putus berobat
d. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun
e. Belum semua fasyankes swasta bekerjasama dalam penanggulangan TB Kabupaten Nganjuk

f. Adanya kerusakan alat TCM sehingga utilitas alat menurun dan mempengaruhi pelayanan.
g. Belum terbentuk tim percepatan penanggulangan TB di Kabupaten Nganjuk
h. Belum ada koalisi organisasi profesi yang berperan mendukung penanggulangan TB di Kabupaten

Intervensi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut agar capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut mencapai 100% antara lain:

a. Mengoptimalkan penemuan terduga kasus secara aktif maupun pasif
b. Mengoptimalkan investigasi kontak pada pasien TB dengan memanfaatkan kader yang ada dan pembentukan kader TB yang baru.
c. Mengoptimalkan peran kader pendamping untuk mendukung keberhasilan program TB
d. Mendorong semua layanan melaksanakan terapi pencegahan tuberkulosis dan semua pasien TB dites HIV
e. Pemeliharaan dan penambahan alat TCM
f. Mendorong semua fasyankes swasta untuk bekerja sama dalam penanggulangan TB di Kabupaten Nganjuk
g. Segera membentuk tim percepatan penanggulangan TB di kabupaten nganjuk
h. Segera membentuk koalisi organisasi profesi yang berperan mendukung penanggulangan TB di Kabupaten

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar tahun 2022 adalah 16.679 orang dengan sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV sebanyak 16.679 orang sehingga prosentase capaian sebesar 100%.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari sumbernya sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Air limbah domestik yang diolah adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{348.021}{348.021} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sebanyak 348.021 KK sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 348.021 KK. Dengan demikian, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 100%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengukuran SPM Bidang Air Limbah Domestik adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{348.021}{348.021} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Hingga tahun 2022, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 348.021 unit. Sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Nganjuk sebanyak 348.021 unit. Dengan demikian, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan pekerjaan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.15
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	348,021	348,021	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	348	348	0	100.00%
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1	1	0	100.00%
	3. Jaringan perpipaan	348,021	348,021	0	100.00%
	4. Jaringan bukan perpipaan	16,113	16,113	0	100.00%
	JUMLAH	**364,483**	**364,483**	**0**	**400.00%**
2.	***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	348,021	348,021	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1	1	0	100.00%
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	1	1	0	100.00%
	3. Sub-Sistem pengolahan setempat	348,021	348,021	0	100.00%
	4. Sub-sistem pengangkutan	1	1	0	100.00%
	5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100.00%
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1	1	0	100.00%
	JUMLAH	**348,026**	**348,026**	**0**	**600.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk	2,430,988,418,747
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	269,391,352,198
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	11,962,950,000
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	11,962,950,000
	a. APBN	0
	b. APBD	0
	c. DAK	11,962,950,000
	d. Lainya	0

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**6,907,950,000**	**5,580,122,592**	**80.78**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**6,907,950,000**	**5,580,122,592**	**80.78**
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	0	0	0
	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	6,362,950,000	5,104,589,192	80.22
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	145,000,000	75,533,400	52.09
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	400,000,000	400,000,000	100.00
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	0	0	0
	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**5,055,000,000**	**5,025,612,300**	**99.42**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**5,055,000,000**	**5,025,612,300**	**99.42**
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	5,055,000,000	5,025,612,300	99.42
	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	0	0	0
	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Unaudited)

4.3.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 72 orang, baik yang berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Data pegawai menurut golongan dan jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.18
Jumlah Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1

	- Eselon III	3
	- Eselon IV	13
2.	Jumlah Pejabat Fungsional	14
3.	Jumlah Staf PNS	159
	Jumlah	190

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Permasalahan

1) Jumlah sumber mata air yang difungsikan untuk penyediaan air minum SPAM masih terbatas. Hal ini dibuktikan bahwa di Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong pada musim kemarau kesulitan dalam memperoleh air sehingga pengelolaan dan penyediaan air minum SPAM belum dapat dikelola secara keseluruhan dan maksimal. Dengan adanya hal tersebut, maka untuk daerah yang kesulitan dalam memperoleh air juga berimbas pada sulitnya pengelolaan air limbah.
2) Masih terdapat beberapa data SPM yang tidak sinkron antar OPD terkait.

b. Solusi

1) Untuk di wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air, diadakan kerjasama untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam menampung air hujan yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari.
2) Mengupayakan sinkronisasi data dengan melakukan pertemuan dengan OPD terkait serta melakukan pembahasan secara efisien dan jelas.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

   Indikator yang digunakan adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan :

   1) Pada saat masa pasca bencana;
   2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
   3) Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

   Indikatornya adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dalam rangka mendukung:

   1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	Setiap Tahun

No	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung dengan membandingkan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{86}{86} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2022, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 86 rumah, sedangkan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022 sebanyak 86 rumah. Dengan demikian, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100%.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

dihitung dengan membandingkan antara rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	=	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	x 100%
	=	271 / 271	x 100%
	=	100%	

Pada tahun 2022, rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, dan rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 271 rumah, sedangkan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2022 sebanyak 271 rumah. Dengan demikian, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.20
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1 .	***Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	86	86	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	86	86	0	100.00%
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0	0%
	JUMLAH	**86**	**86**	**0**	**100.00%**
2.	***Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	271	271	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	258	258	0	100.00%
	2. Subsidi uang sewa	13	13	0	100.00%
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0%
	JUMLAH	**271**	**271**	**0**	**200.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk	2,430,988,418,747
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	29,255,917,297
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	8,083,439,722
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0
	A. APBN	0
	B. APBD	0
	B. DAK	0
	C. LAINNYA	0

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Kode Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.04.02	**Program:** Pengembangan Perumahan	**8.083.439.722**	**7.411.626.868**	**91,69**
1.04.02.2.01	**Kegiatan:** Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**170.080.000**	**146.655.400**	**86,23**
1.04.02.2.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	57.000.000	54.704.900	95,97
1.04.02.2.01.02	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	57.000.000	51.826.750	90,92
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	23.000.000	16.480.750	71,66
1.04.02.2.01.04	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	33.080.000	23.643.000	71,47

Kode Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.04.02.2.03	**Kegiatan:** Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**7.913.359.722**	**7.264.971.468**	**91,81**
1.04.02.2.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	7.665.439.722	7.034.460.268	91,77
1.04.02.2.03.06	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	247.920.000	230.511.200	92,98

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.4.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 40 pegawai ASN dan 8 pegawai Non ASN. Data pegawai menurut golongan dan jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.23
Jumlah Pegawai ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	IV/B	1
2	Sekretaris Dinas	S1	IV/A	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	0
4	Perencana Ahli Muda	S2	IV/A	1
5	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	S2	IV/A	1
6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	S1	III/D	3
7	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan	S2	III/D	1
8	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	S1	III/D	1
9	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	S1	III/A	2
10	Staf	S1	III/D	2
11	Staf	S1	III/C	1
12	Staf	S1	III/A	4
13	Staf	D3	III/C	1

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan	Jumlah
14	Staf	D3	III/B	2
15	Staf	D3	II/C	1
16	Staf	SLTA	IID	13
17	Staf	SLTA	IIC	1
18	Staf	SLTP	ID	4
JUMLAH				**40**

Tabel 4.24
Jumlah Pegawai Non ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Staf Non ASN	S1	5
2	Staf Non ASN	D3	1
3	Staf Non ASN	D2	1
4	Staf Non ASN	SLTA	1
JUMLAH			**8**

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Nihil

4.5 SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan pada sub urusan trantibum adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Terdapat 4 (empat) mutu pelayanan dasar pada sub bidang trantibum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, yakni:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut memiliki pengukuran capaian yang didasarkan pada :

a. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
    1) Pelayanan kerugian materil

       Kerugian materil adalah kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

       - Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
       - Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

    2) Pelayanan pengobatan

       Pelayanan pengobatan adalah tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada adalah yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2022. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun penetapan target awal Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun

Ketika seluruh Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka optimalisasi terhadap capaian angka layanan dasar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.5.3 Realisasi

Pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah

tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk bidang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 :

Tabel 4.26
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	269	269	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	**0**	**100.00%**
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	**0**	**100.00%**
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	11	11	**0**	**100.00%**
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	27	27	**0**	**100.00%**
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	12	12	**0**	**100.00%**
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	**0**	**100.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**			**3,447,756,439**	**3,212,144,947**	**93.17%**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**2,749,096,689**	**2,576,507,267**	**93.72%**
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	680,757,250	635,872,746	93.41%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	99,116,500	98,766,200	99.65%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	11,995,500	7,920,000	66.02%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	459,771,000	403,878,720	87.84%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	240,117,750	199,602,000	83.13%
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,136,247,000	1,121,220,551	98.68%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	108,707,689	107,155,050	98.57%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2,134,000	2,092,000	98.03%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10,250,000	0	0%
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**686,371,750**	**623,750,830**	**90.88%**
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	285,884,000	271,365,780	94.92%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	73,990,000	72,270,000	97.68%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	326,497,750	280,115,050	85.79%
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**12,288,000**	**11,886,850**	**96.74%**
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	12,288,000	11,886,850	96.74%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berikut ini tersaji data personil di Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 4.28
Dukungan Personil Urusan Trantibum

No.	Kepala / Sekretariat/ Bidang / Subbag / Seksi	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Satpol PP	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum	7
	- Sub. Bagian Program Evaluasi dan Keu	6
	Jumlah	**15**
3.	Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat	1
	- Seksi Ops Dal	54
	- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	4
	Jumlah	**59**
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1
	- Seksi Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan	5
	- Seksi Ketertiban Umum	5
	Jumlah	**11**
	Jumlah Keseluruhan	**85**

Sumber data : Sekretariat Satpol PP Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada belum akuntabel;
2. Standar operasional prosedur belum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Sarana prasarana Satpol PP belum memadai;
4. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat belum terpenuhi;
5. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada yang akuntabel;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memenuhi kebutuhan Sarana prasarana Satpol PP yang memadai;
4. Meningkatkan Standar kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sesuai ketentuan;
5. Mengoptimalkan pelayanan bagi warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.6 SUB URUSAN KEBAKARAN

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit harus memuat :

a. Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2022. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Adapun penetapan target awal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan penyelamatan dan	Jumlah warga negara yang memperoleh	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	evakuasi korban kebakaran	layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		

4.6.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk sub urusan kebakaran. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dengan teknis perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota :

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			**98.07%**
1 .	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran***				***98.07%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	192	192	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**18.07%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**90.37%**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15	14	1	93.33%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	150	123	27	82.00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	65	56	9	86.15%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**			**1,610,995,250**	**1,470,125,175**	**91.26%**
	1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**1,576,567,000**	**1,437,587,354**	**91.18%**
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	960,240,000	873,051,254	90.92%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	113,172,500	90,675,500	80.12%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	1,950,000	560,000	28.72%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	4,875,000	4,242,000	87.02%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	462,992,000	440,868,600	95.22%
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	27,227,500	23,568,500	86.56%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1,300,000	1,300,000	100.00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	4,810,000	3,321,500	69.05%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	0	0	0%
	2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**3,384,000**	**2,331,050**	**68.88%**
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1,305,000	451,000	34.56%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	2,079,000	1,880,050	90.43%
	3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**3,500,000**	**3,500,000**	**100.00%**
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	3,500,000	3,500,000	100.00%
	4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**25,054,250**	**24,216,771**	**96.66%**
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	14,045,750	13,614,381	96.93%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	10,008,500	9,602,390	95.94%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	1,000,000	1,000,000	100.00%
	5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**2,490,000**	**2,490,000**	**100.00%**
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	2,490,000	2,490,000	100.00%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Berikut ini tersaji data personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.32
Dukungan Personil Urusan Kebakaran

No	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	Pegawai Tetap (ASN)	8	4	12
2	Pegawai Tidak Tetap	43	1	44
	TOTAL	51	5	56

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebakaran, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu- isu urusan kebakaran, maka terdapat beberapa isu penting Kabupaten Nganjuk yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebakarandan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
3. Agar pemadaman kebakaran dapat menjangkau hingga kampung sehingga perlu adanya pembangunan hidran kampung.
4. Kemampuan masyarakat masih cukup rendah dalam penggunaan APAR sehingga perlu adanya penyuluhan kebakaran sampai pada wilayah kampung.
5. Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum

4.7 SUB URUSAN KEBENCANAAN

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, antara lain :

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten yang rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah Kabupaten/Kota.

Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas (rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, avian influenza/flu burung) dan Covid-19. Informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, antara lain adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta Covid-19.

Beberapa indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan informasi rawan bencana :

1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana

3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana
4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana terhadap bencana yang ada. Seperti kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) pada desa rawan bencana, sosialisasi pengurangan risiko bencana dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana;
3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana;
4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana; dan
6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas

4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2022. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang sub urusan bencana. Berikut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, yaitu :

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

4.7.3 Realisasi

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.34
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1,134,617	1,134,617	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	386,547	386,547	0	100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	937	937	0	100.00%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	26	26	0	100.00%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	386,547	386,547	0	100.00%
2.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	386,547	386,547	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	434	434	0	100.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	37	37	0	100.00%
3.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	14	14	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	18	18	0	100.00%
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	0%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	6	6	0	100.00%

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**			**1,940,824,340**	**74,925,000**	**3.86%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**144,854,000**	**0**	**0.00%**
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	144,854,000	0	0%
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1,389,448,940**	**74,925,000**	**5.39%**
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	214,936,400	74,925,000	34.86%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	34,600,000	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	41,637,540	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	911,952,000	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	125,000,000	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	61,323,000	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	0	0%
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**370,249,000**	**0**	**0.00%**
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	115,020,000	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	26,353,900	0	0%

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	228,875,100	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	0	0	0%
	4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**36,272,400**	**0**	**0.00%**
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	36,272,400	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebanyak 52 orang dengan rincian :

a) PNS : 15 orang
b) THL Tim Reaksi Cepat (TRC) : 26 orang
c) THL Tenaga Administrasi : 12 orang
d) THL Tenaga Kebersihan : 2 orang

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

a) PNS / CPNS :
   1) S2 : 2 orang
   2) S1 : 13 orang
b) THL Tim Reaksi Cepat (TRC) :
   1) S2 : 1 orang
   2) S1 : 9 orang
   3) D4 : 0 orang
   4) D3 : 0 orang
   5) D2 : 0 orang
   6) D1 : 0 orang

7) SLTA : 15 orang
8) SLTP : 0 orang

c) THL Tenaga Administrasi :
1) S1 : 6 orang
2) D3 : 2 orang
3) SLTA : 4 orang

d) THL Tenaga Kebersihan :
1) SLTA : 2 orang

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM oleh BPBD Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa masalah dan kendala diantaranya :

1. Beberapa indikator pelayanan SPM pada kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana salah satunya sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya yaitu berupa dropping air bersih di daerah yang mengalami kekeringan tidak dapat terealisasi dikarenakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2022 mengalami curah hujan kategori menengah. Jadi, untuk penerapan SPM pada indikator tersebut belum tercapai.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka solusi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana harus segera dilegalitaskan sebagai dasar untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.
2. Perlunya perhatian khusus dari Kepala Daerah dengan dibantu Bappeda untuk merencanakan alokasi anggaran SPM sesuai aturan yang berlaku karena BPBD berkewajiban melakukan penerapan SPM sub urusan bencana yang dijamin pelaksanaannya dan sanksinya sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 pasal 20 yaitu Kepala Daerah dan/atau wakil kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.
3. Harus membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana.

4. Indikator dan formula pelayanan SPM bisa ditetapkan sendiri pada awal tahun perencanaan sehingga penetapan target bisa menyesuaikan APBD yang ada, yang pada akhirnya capaian kinerja pada tahun tersebut dapat terukur maksimal.

1.8 URUSAN SOSIAL

1.8.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

   Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Kriteria penerima layanan rehabilitasi per satu kali kejadian bencana adalah sebagai berikut :

1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang sosial.

1.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Sosial diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2022. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang Sosial. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang sosial yang optimal, Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Mininal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar teknis pembiayaan pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

1.8.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di

Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang sosial. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang sosial hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sosial. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang sosial :

Tabel 4.37
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	2,609	2,609	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	276	276	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	103	103	0	100.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	0	100.00%
	4. Penyediaan permakanan	1,625	1,625	0	100.00%
	5. Penyediaan sandang	63	63	0	100.00%
	6. Penyediaan alat bantu	115	115	0	100.00%
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	20	20	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	155	155	0	100.00%
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	23	23	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	4	4	0	100.00%
	11. Akses ke layanan pendidikan	4	4	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	23	23	0	100.00%
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	23	23	0	100.00%
	14. Layanan rujukan	165	165	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	5	5	0	100.00%
2.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	310	310	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan	30	30	0	100.00%
	2. Penyediaan permakanan	16	16	0	100.00%
	3. Penyediaan sandang	13	13	0	100.00%
	4. Penyediaan alat bantu	4	4	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	9	9	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	9	9	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	11	11	0	100.00%
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	134	134	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan	4	4	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	11	11	0	100.00%
	12. Layanan rujukan	44	44	0	100.00%
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	0	100.00%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	5	5	0	100.00%
3.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	3,473	3,473	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	8	8	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	3,279	3,279	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	28	28	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu	7	7	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	28	28	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	28	28	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	10	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	13	13	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan	7	7	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100.00%
	13. Layanan rujukan	20	20	0	100.00%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	5	5	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	**0**	**100.00%**
4.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	250	250	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan	25	25	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	5	5	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	44	44	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang	20	20	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu	11	11	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	20	20	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	25	25	0	100.00%
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	5	5	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan	6	6	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	25	25	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25	25	0	100.00%
	13. Layanan rujukan	9	9	0	100.00%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	5	5	0	100.00%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	5	5	0	100.00%
5.	***Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	179	179	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Penyediaan permakanan	150	150	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	15	15	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	7	7	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	3	3	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	4	4	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.8.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**14,345,477,350**	**13,939,611,429**	**97.17%**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**8,677,616,600**	**8,592,715,875**	**99.02%**
		1	Penyediaan permakanan	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	9,408,800	8,830,600	93.85%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	766,000,000	735,956,000	96.08%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	7,353,984,050	7,346,933,900	99.90%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	548,223,750	500,995,375	91.39%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	0	0	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**5,667,860,750**	**5,346,895,554**	**94.34%**
		1	Penyediaan makanan	5,667,860,750	5,346,895,554	94.34%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**					
		1	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan	350,368,400	344,585,750	98.35%
		2	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56,086,950	45,742,275	81.56%
		3	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10,000,000	8,489,000	84.89%
		4	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	786,260,000	784,080,000	99.72%
		5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	109,999,850	84,719,850	77.02%
		6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,670,300,000	3,556,641,000	96.90%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 (Unaudited)

4.8.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 4.39
Jumlah Pegawai Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

No.	Kepala Dinas / Bidang / Subag / Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Sosial PPPA	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum	3
	- Sub. Bagian Keuangan	2
	- Sub. Bagian Program dan Evaluasi	1
	Jumlah	**8**
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	1
	- Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	0
	- Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	1
	-Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia	0
	Jumlah	**2**
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1
	- Seksi Pemberdayaan Sosial	1
	- Seksi Kesejahteraan masyarakat	2
	- Seksi Fakir Miskin	1
	Jumlah	**5**
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak	1
	- Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	2
	- Seksi Fasilitasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1
	- Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak	1
	Jumlah	**5**
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat	1
	- Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1
	- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1
	- Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan	1
	Jumlah	**4**
Jumlah Keseluruhan		**24**

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

4.8.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Sosial di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan pengumpulan data karena kurangnya SDM dalam penanganan SPM
2. Setiap kegiatan terkendala kurangnya anggaran, dikarenakan anggaran tinggi terdapat pada bansos dan hibah
3. Terbatasnya anggaran yang diberikan untuk setiap kegiatan
4. Sarana dan prasarana untuk pelayanan rehabilitasi di luar panti masih kurang

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Membangun data yang berkualitas
2. Integrasi Aplikasi Data Pokok Kependudukan
3. Membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
4. Peningkatan Sarana & Prasarana layanan Rehabilitasi Sosial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, kami telah menyusun sesuai dengan kondisi riil yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami menyadari apabila terdapat keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Nganjuk tidak lain merupakan hasilkerja keras, dukungan, peran serta dan komitmen seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dari DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian di samping keberhasilan yang dapat dicapai tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kami yakin dan optimis bahwa segala permasalahan yang belum dapat diselesaikan tersebut akan menjadi motivasi kami untuk terus berkarya dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi Kabupaten Nganjuk "***Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)***".

Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan penulisan. Untuk itu demi kesempurnaan laporan ini kami mengharap masukan dan sumbang saran dari berbagai pihak baik dari Tim Evaluasi Provinsi maupun Pusat.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk terus meningkatkan semangat dan pengabdian dalam membangun Kabupaten Nganjuk yang kami cintai sehingga semakin maju dan sejahtera. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nganjuk, 30 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA